

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Dr. Dede Ruslan, M.Si



UNIMED PRESS

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA PASAL 72
KETENTUAN PIDANA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Dede Ruslan, M.Si

PENGANTAR EKONOMI MAKRO



UNIMED PRESS

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Copyright©2016 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, menscan atau memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin
tertulis dari penulis/Penerbit

Penulis Naskah :

Dr. Dede Ruslan, M.Si

Desain Sampul :

Team Kreatif

Penerbit

UNIMED PRESS

Gedung Lembaga Penelitian Lantai 1

Jl. Willem Iskandar Psr V, Medan

Contact person : Ramadhan 081265742097

www.unimed.ac.id

Cetakan Pertama : 2015

X , 241halaman; 16 x 22 cm

ISBN : 978-602-0888-74-3

Diterbitkan :

Penerbit Unimed Press. Universitas Negeri Medan,

Jl. Willem Iskandar Pasar V

Medan Estate 20222

Email: unimedpress13@gmail.com

Kata Pengantar

Buku ini sengaja dirancang untuk digunakan dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro. Struktur dan gaya penulisan buku ini ditujukan bagi para mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi yang ingin mempelajari secara mendasar tentang ilmu ekonomi makro. Buku ini juga dapat digunakan oleh pembaca yang tertarik untuk mendalami masalah ilmu ekonomi makro. Buku ini mencoba menggunakan tiga pendekatan untuk menjelaskan tentang pernyataan teori ekonomi makro, yaitu deskriptif, grafik dan matematika ekonomi secara sederhana, dengan harapan para pembaca dapat memahami sejara rinci dan jelas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan para pembaca tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam mempelajari buku ini. Selain itu, buku ini juga sengaja dirancang untuk melengkapi pembelajaran yang berisi materi-materi pokok pengantar ekonomi makro selama satu semester, dengan capaian pembelajaran dan kompetensi yang sudah diarahkan sedemikian rupa dalam setiap babnya, kemudian pada setiap bab juga disertai soal dan latihan yang dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mempelajari pengantar ekonomi makro. Namun demikian, penulis terbuka pada kritik dan saran agar buku ini selalu mengalami peningkatan pada isi dan kualitas tulisan. Akhirul kalam, semoga buku ini dapat bermanfaat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penulis,

Dr. Dede Ruslan, M.Si

DAFTAR ISI

| | | |
|-------|---|----|
| BAB 1 | Konsep Dasar Ekonomi Makro | 1 |
| | 1.1 Pendahuluan..... | 2 |
| | 1.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi Makro..... | 5 |
| | 1.3 Permasalahan Ekonomi Makro..... | 7 |
| | 1.4 Peran Pemerintah di Bidang Ekonomi | 10 |
| | 1.5 Tujuan dan Instrumen Ekonomi Makro | 12 |
| | 1.6 Permintaan dan Penawaran Agregat | 14 |
| | 1.7 Siklus Aliran Pendapatan dan Interaksi Pasar | 16 |
| | Soal Latihan | 20 |
| BAB 2 | Konsep Pengukuran Pendapatan Nasional | 22 |
| | 2.1 Konsep PDB, PDRB, PND dan PN | 23 |
| | 2.2 Metode Perhitungan Pendapatan Nasional (PDB) | 27 |
| | 2.3 Pengukuran Aktivitas Ekonomi Lainnya | 35 |
| | Soal dan Latihan | 43 |
| BAB 3 | Konsumsi, Tabungan dan Investasi | 45 |
| | 3.1 Pendahuluan | 46 |
| | 3.2 Fungsi Konsumsi | 47 |
| | 3.3 Fungsi Tabungan | 54 |
| | 3.4 Fungsi Investasi | 61 |
| | Soal dan Latihan | 64 |
| BAB 4 | Pendapatan Nasional Kesimbangan | 65 |
| | 4.1 Pengertian Pendapatan Nasional | |

| | | |
|-------|---|-----|
| | Keseimbangan | 66 |
| 4.2 | Penentuan Keseimbangan Pendapatan Nasional Dua Sektor | 68 |
| 4.3 | Multiplier | 73 |
| | Soal dan Latihan | 76 |
| Bab 5 | Peranan Pemerintah Dalam Ekonomi Makro Melalui Kebijakan Fiskal | 78 |
| 5.1 | Model Perekonomian Tiga Sektor | 79 |
| 5.2 | Penentuan Keseimbangan Pendapatan Nasional Dalam Model Tiga Sektor | 89 |
| 5.3 | Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) | 94 |
| 5.4 | Kebijakan Fiskal dan Pendapatan Nasional Keseimbangan | 101 |
| 5.5 | Multiplier Kebijakan Fiskal | 107 |
| | Soal dan Latihan | 109 |
| Bab 6 | Perdagangan Nasional dan Pendapatan Nasional Keseimbangan | 111 |
| 6.1 | Model Perekonomian Terbuka | 112 |
| 6.2 | Penentuan Keseimbangan Pendapatan Nasional dalam Perekonomian Terbuka | 119 |
| 6.3 | Multiplier dalam Perekonomian Terbuka | 125 |
| 6.4 | Perdagangan Internasional | 131 |
| | Soal dan Latihan | 136 |
| Bab 7 | Neraca Pembayaran dan Nilai Tukar | 138 |
| 7.1 | Pendahuluan | 139 |
| 7.2 | Konsep dan Struktur Neraca Pembayaran | 140 |
| 7.3 | Nilai Tukar | 151 |
| | Soal dan Latihan | 161 |

| | | |
|--------|--|-----|
| Bab 8 | Uang dan Lembaga Keuangan | 163 |
| | 8.1 Defenisi Uang dan Fungsi Uang | 164 |
| | 8.2 Fungsi Permintaan Uang | 169 |
| | 8.3 Fungsi Penawaran | 179 |
| | 8.4 Lembaga Keuangan | 191 |
| | 8.5 Kebijakan Moneter | 200 |
| | Soal dan Latihan | 206 |
| | | |
| Bab 9 | Ekonomi Pembangunan | 207 |
| | 9.1 Pendahuluan | 208 |
| | 9.2 Masalah Pokok Pembangunan Ekonomi | 209 |
| | 9.3 Karakteristik Negara Sedang Berkembang | 213 |
| | 9.4 Pengertian dan Ukuran Pembangunan Ekonomi | 215 |
| | Soal dan Latihan | 222 |
| | | |
| Bab 10 | Pertumbuhan Ekonomi | 224 |
| | 10.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi | 225 |
| | 10.2 Model-model Pertumbuhan Ekonomi .. | 226 |
| | Soal dan Latihan | 240 |
| | | |
| | Daftar Pustaka | 241 |

KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO

1

Capaian Pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari bab 1 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan berbagai konsep dasar yang terkait dengan ilmu ekonomi makro.

Dalam bab ini Sdr diharapkan dapat mencapai kompetensi dasar sebagai berikut :

1. Dapat menjelaskan pengertian dari ilmu ekonomi makro
2. Dapat menjelaskan ruang lingkup ekonomi makro
3. Dapat Menjelaskan berbagai permasalahan Ekonomi Makro baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang
4. Dapat menjelaskan Tujuan dan Instrumen Ekonomi Makro
5. Dapat mendeskripsikan konsep dasar permintaan dan penawaran Agregat
6. Dapat deskripsikan Siklus Pendapatan dan Interaksi Pasar.



1.1



Pendahuluan

Setiap masyarakat selalu memperhatikan berbagai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Sumberdaya ini disebut dengan sumberdaya produksi yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok: sumberdaya alam (*natural resources*), sumberdaya manusia (*human resources*) dan sumberdaya modal (*capital resources*). Yang termasuk kedalam sumberdaya alam biasanya terkait dengan tanah seperti batubara, air, pepohonan dan tanah itu sendiri. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi suatu barang berasal dari berbagai sumberdaya alam. Sumberdaya manusia yang berkaitan dengan tenaga kerja (*labor*) menggambarkan usaha manusia dalam bekerja, baik secara fisik maupun mental yang dicurahkan dalam proses produksi. Sedangkan sumberdaya modal terkait dengan sumberdaya fisik buatan manusia seperti gedung-gedung, peralatan, mesin dan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi.

Ilmu ekonomi menjelaskan bagaimana sumberdaya produksi tersebut digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena sumberdaya produksi terbatas dan barang-barang dan jasa yang dihasilkannya juga terbatas, hal ini tentunya berlawanan dengan barang-barang dan jasa yang diinginkan oleh setiap individu ataupun masyarakat yang sebenarnya tidak terbatas. Keterbatasan itulah yang menyebabkan banyak hal terasa langka (*scarce*). Kelangkaan tersebut mencakup kuantitas, kualitas, tempat dan waktu dari berbagai sumber daya yang tersedia. Sesuatu menjadi tidak akan langka jika jumlah (kuantitas) yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, berkualitas baik, tersedia di mana saja dan kapan saja dibutuhkan. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumberdaya yang tersedia (kuantitas, kualitas, tempat dan waktu) terbatas merupakan penggerak aktivitas ekonomi. Artinya terbatasnya sumberdaya tersedia dibandingkan dengan

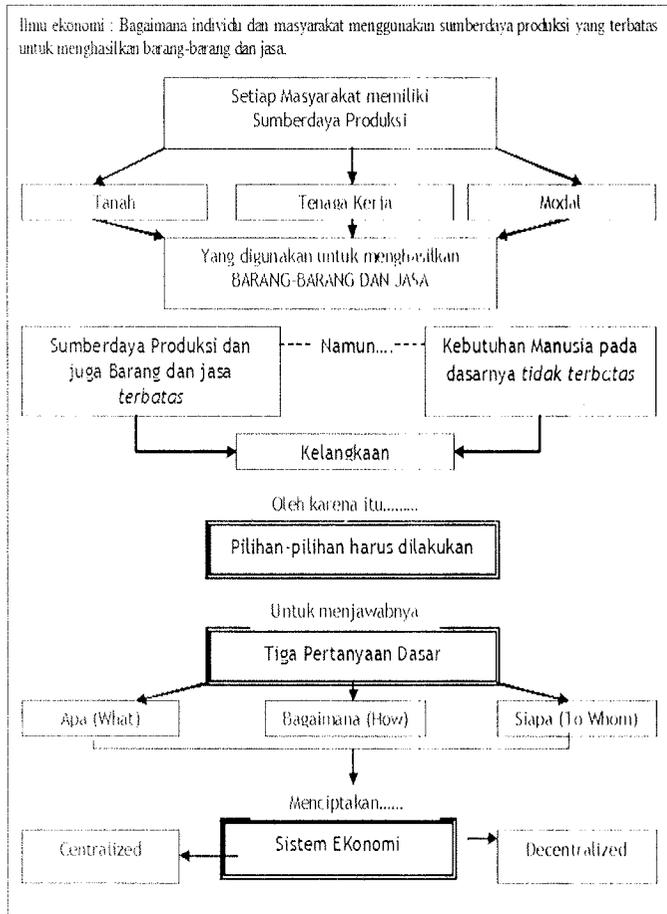
kebutuhan/keinginan, menyebabkan manusia harus menentukan pilihan-pilihan baik yang bersifat individu maupun kolektif. Dalam ilmu ekonomi, manusia dipandang sebagai makhluk rasional, sehingga pilihan yang dibuatnya selalu berdasarkan pertimbangan untung rugi dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh atau dengan kata lain setiap pilihan yang dilakukan manusia selalu memperhitungkan biaya kesempatan (*opportunity cost*), yaitu kesempatan (untuk memperoleh sesuatu) yang hilang karena kita memilih alternatif lain.

Keadaan antara ketidakterbatasan kebutuhan dengan keterbatasan sumberdaya produksi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ekonomi berkaitan dengan kelangkaan (*Scarcity*). Kelangkaan ini menyebabkan timbulnya masalah dasar ekonomi yang dihadapi oleh setiap masyarakat, kaya ataupun miskin. Bagaimana menentukan penggunaan sumberdaya produksi yang terbatas ini secara baik, untuk memenuhi keinginan manusia. Untuk menjawab masalah dasar tersebut, maka harus mampu menjawab tiga pertanyaan dasar dalam ekonomi, yaitu :

- Apa barang-barang dan jasa yang akan dihasilkan?
- Bagaimana barang-barang dan jasa dihasilkan?
- Siapa yang akan mengkonsumsi barang-barang dan jasa?

Disebabkan oleh kelangkaan itu, pada suatu waktu pilihan harus dilakukan untuk menentukan alternatif terbaik dari berbagai pilihan tersebut. Hal itu dalam ekonomi disebut dengan *opportunity cost*. Baik produsen (orang yang menghasilkan barang dan jasa) maupun konsumen (orang yang menggunakan barang dan jasa) selalu dihadapkan pada *opportunity cost* pada saat pengambilan keputusan dilakukan.

Cambar 1.1
Ilmu Ekonomi



Berdasarkan hal tersebut diatas, ilmu ekonomi seringkali diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan masing-masing

sumber daya mempunyai alternatif penggunaan (*opportunity cost*). Ilmu ekonomi sangat terkait dengan optimisasi penggunaan sumber daya untuk memenuhi penyelesaian masalah antara yang tersedia dengan yang diminta.

Defenisi ini berkembang dari pemahaman motif-motif ekonomi yang dijelaskan oleh pemikir ekonomi konvensional F.Y. Edgworth (1881) merupakan tokoh utama yang mengemukakan motif *self interest (egoism and utilitarianism)* dari perilaku ekonomi manusia (Sen, 1979). Landasan nilai egoisme ini menurut Sen kemudian menjadi motif ekonomi yang mempergunakan pendekatan *rational (rational choice)*. Pendekatan ini sebenarnya menunjukkan konsistensi internal dari seorang individu dalam berperilaku serta dengan landasan inilah, kemudian secara substansi ekonomi konvensional dibangun dan dikembangkan melalui berbagai model sistem ekonomi.

1.2



Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi Makro

Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas (alokasi sumber daya yang langka) dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan (*opportunity cost*). Ilmu ekonomi sangat terkait dengan proses optimisasi (alokasi optimum) penggunaan sumber daya untuk memenuhi penyelesaian masalah antara yang tersedia dengan yang diminta.

Proses alokasi sumber daya secara efisien di tingkat individu, perusahaan dan industri berkaitan dengan aspek teori ekonomi mikro, sedangkan proses alokasi sumberdaya secara efisien di tingkat *aggregat (menyeluruh)* berkaitan dengan aspek teori ekonomi makro. Hal ini menunjukkan bahwa secara

garis besar ilmu ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.

A. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang menitikberatkan pada perilaku ekonomi individu rumah tangga, perusahaan dan pasar, dalam mengelola sumberdaya ekonomi secara efisien dalam menetapkan berbagai pilihannya dengan penekanan pada bagaimana harga-harga ditentukan dan bagaimana harga-harga tersebut mempengaruhi keputusannya.

Dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum bersama dengan individu-individu lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi *ceteris paribus*.

B. Ilmu Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang menganalisis secara keseluruhan (*agregat*) kegiatan perekonomian yang bersifat global seperti total produksi nasional (*pendapatan nasional*), tingkat inflasi, kesempatan kerja dan atau pengangguran, merapa pembayaran dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam ilmu ekonomi makro ini dipelajari tentang masalah-masalah ekonomi utama diantaranya adalah (i) sejauh mana suatu perekonomian akan menghasilkan barang-barang dan jasa, (ii) sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut *full employment*. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan *under employment* atau terdapat pengangguran dan belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh, (ii) sejauh mana

perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi, (iii) sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan, (iv) sejauhmana kebijakan pemerintah (kebijakan fiskal dan kebijakan moneter) dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, khususnya masalah inflasi dan pengangguran.

1.3



Permasalahan Ekonomi Makro

Secara umum masalah dalam ekonomi makro terbagi menjadi dua yaitu masalah jangka pendek (atau masalah stabilisasi) dan masalah jangka panjang (masalah pertumbuhan). Permasalahan utama ekonomi makro dalam masalah jangka pendek atau sering juga disebut dengan masalah stabilisasi, diantaranya adalah masalah inflasi, pengangguran dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Sedangkan masalah utama ekonomi makro dalam jangka panjang atau disebut dengan masalah pertumbuhan terkait dengan masalah pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas produksi dan ketersediaan dana investasi.

Inflasi memang suatu masalah ekonomi yang kerap kali terjadi, inflasi bukan hanya terjadi di Negara Indonesia saja melainkan terjadi pada semua Negara yang ada di dunia ini. Inflasi merupakan tolak ukur kondisi harga-harga barang di dalam negeri sekaligus pengukur perekonomian nasional. Inflasi itu sendiri merupakan kejadian dimana harga-harga barang dan juga jasa mengalami kenaikan secara bersama sama dalam kurun waktu yang lama. Naiknya harga – harga komoditi secara umum itu disebabkan oleh tidak sinkronnya

program pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan sebagai) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.

Pengangguran adalah banyaknya tenaga kerja dalam angkatan kerja yang ingin bekerja dan sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan tersebut yang terjadi karena adanya kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja atau ketidaksesuaian pekerjaan yang tersedia. Pengangguran suatu permasalahan yang terjadi pada setiap negara terutama negara – negara yang sedang berkembang. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Dari beberapa studi menunjukkan bahwa tingginya angka pengangguran disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah (i) besarnya angkatan kerja tidak seimbangan dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi, (ii) struktur lapangan kerja tidak seimbang, (iii) kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang dan lain-lain. Angka pengangguran yang cukup tinggi dalam suatu negara akan berdampak bagi perekonomian negara tersebut. Tingginya angka pengangguran akan membawa dampak diantaranya adalah (i) timbulnya masalah kemiskinan, (ii) timbulnya dan meningkatnya tindakan kriminal, (iii) dapat memacu meningkatnya jumlah anak jalanan, pengemis, dan gelandangan yang berkeliaran di jalanan, dan (iv) masalah sosial lainnya.

Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. Pembayaran-

pembayaran tersebut meliputi penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk import, aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri, dan aliran keluar/masuk modal jangka pendek (misal deposit uang ke luar negeri). Permasalahan yang sering muncul dalam neraca pembayaran adalah timpangnya neraca pembayaran. Neraca Pembayaran Yang Timpang adanya kesenjangan antara jumlah perolehan negara dari ekspor dan pembayaran untuk impor. Jika kondisi volume impor lebih besar (defisit) mengakibatkan valuta menurun sehingga nilai mata uang lokal akan jatuh. Jika Kondisi volume ekspor lebih besar (surplus) mengakibatkan nilai uang menguat terhadap luar negeri sehingga akan berdampak makin naiknya impor (ekspor relatif turun). Untuk itu maka Neraca Pembayaran harus terkondisi seimbang dengan demikian apabila terjadi surplus, ada kekuatan ekonomi yang dapat mengendalikan impor dan mempertahankan ekspor.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi, sesuai dengan teori Maltus menyatakan bahwa penambahan jumlah penduduk mengikuti deret ukur sementara penambahan pangan mengikuti deret hitung. Pertambahan penduduk selalu lebih cepat daripada pertumbuhan pangan, maka tanpa dukungan teknologi yang memadai, pertumbuhan penduduk bisa masalah besar yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, jika pertumbuhan penduduk tersebut tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas penduduk. Namun pertumbuhan penduduk yang besar bila diikuti oleh tingkat produktivitas yang tinggi akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi.

Kapasitas produksi dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar, semakin tinggi kapasitas produksi yang dapat diusahakan maka semakin banyak produk yang mampu dihasilkan setiap jam, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya. Peningkatan

kapasitas produksi berhubungan dengan tingkat investasi dan investasi berhubungan dengan tingkat tabungan masyarakat, sedangkan tingkat tabungan masyarakat berhubungan dengan tingkat pendapatan dan konsumsinya. Jadi, bila kapasitas produksi ingin ditingkatkan maka tabungan haruslah ditingkatkan agar investasi dapat pula meningkat. Sehingga dengan demikian peningkatan kapasitas produksi, bagaimana mengupayakan tingkat investasi masyarakat meningkat namun juga diiringi dengan tingkat konsumsi masyarakat yang juga meningkat. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Kapasitas produksi nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi nasional yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara

1.4 Peran Pemerintah di Bidang Ekonomi

Semakin kompleksnya aktivitas kegiatan ekonomi dan tingginya keterkaitan aktivitas ekonomi dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, sangat sulit bagi suatu sistem ekonomi termasuk yang paling liberal sekalipun untuk menolak kehadiran peran negara atau pemerintah dalam perekonomian. Walaupun mekanisme pasar merupakan cara yang dapat dilakukan dan dikehendaki dalam memproduksi dan mengalokasikan barang dan jasa akan tetapi, mekanisme pasar sering gagal berfungsi. Kegagalan pasar tersebut akan mengurangi hasil ekonomi. Untuk memperbaiki kegagalan tersebut, seringkali menuntut campur tangan pemerintah untuk menjamin adanya efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi.

Dengan demikian peran pemerintah di bidang ekonomi sangat dibutuhkan.

Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah) sebagai regulator yang memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan., fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon dan fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian tersebut karena beberapa hal, diantaranya yaitu bahwa (i) pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar pasar (market failure) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya adalah pencemaran lingkungan. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas), seperti rusaknya ekosistem lingkungan (ii) mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi.

(iii) Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.

Disisi lain juga, negara atau pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan publik. Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat.

Untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah secara langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen dapat dilakukan melalui kebijakan penetapan harga minimum (floor price) dan kebijakan penetapan harga maksimum (ceiling price). Sedangkan intervensi Pemerintah secara Tidak Langsung dapat dilakukan melalui kebijakan penetapan pajak dan Pemberian Subsidi. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi.

1.5 Tujuan dan Instrumen Ekonomi Makro

Tujuan utama dari ekonomi makro adalah mengembangkan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (*maximize the welfare of society*). Secara khusus, para

ahli ekonomi memfokuskan pada beberapa tujuan utama dari makroekonomi seperti :

- a. Rendahnya tingkat pengangguran (*a low rate of unemployment*)
- b. Stabilitas harga (*price stability*)
- c. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*)

Selain tujuan utama, beberapa ahli ekonomi menambahkan bahwa tujuan ekonomi makro ini termasuk juga tentang distribusi pendapatan, pengurangan defisit anggaran pemerintah, keseimbangan neraca perdagangan, efisiensi ekonomi, pengurangan polusi dan lain-lain. Para ahli ekonomi ekonomi selalu mengamati prestasi kegiatan perekonomian dari waktu ke waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diperhatikan data statistik yang menggambarkan perubahan – perubahan dalam kegiatan ekonomi negara. Data statistik tersebut dinamakan indikator makroekonomi. Terdapat banyak indikator diantaranya pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi dan neraca pembayaran.

Instrumen yang dilakukan dalam mencapai tujuan ekonomi makro tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan perubahan dalam tingkat pembelian pemerintah, transfer dan struktur pajak, untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian atau mempengaruhi jalannya perekonomian dalam rangka mencapai tujuan makroekonomi seperti full employment, pertumbuhan ekonomi dan kestabilan tingkat harga

- b. Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (BI/bank sentral) dengan melakukan perubahan dalam jumlah uang yang beredar atau tingkat bunga untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian atau mempengaruhi jalannya perekonomian dalam rangka (i) mencapai tujuan makroekonomi yaitu full employment, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga serta (ii) mencapai stabilitas pasar uang (tingkat bunga, nilai tukar dan stock market)

Instrumen lainnya yang seri dilakukan oleh pemerintah juga adalah kebijakan dari sisi penawaran yang bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barang dan jasanya dengan harga yang lebih murah namun dengan mutu kualitas yang baik.

1.6

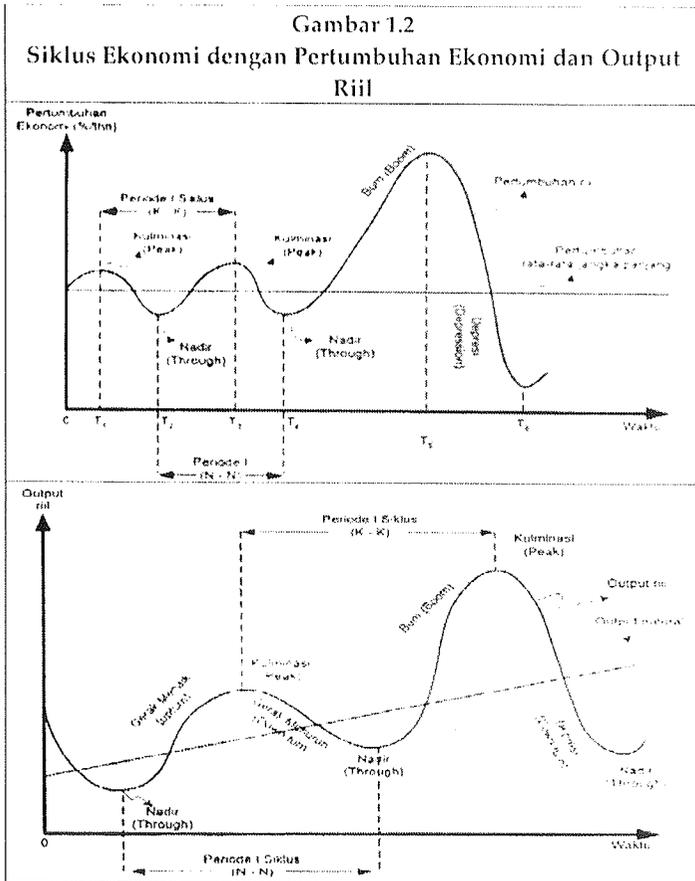


Permintaan dan Penawaran Agregat

Kegiatan perekonomian berfluktuasi dari tahun ketahun. Pada tahun tertentu perekonomian suatu negara dapat mengalami peningkatan yang ditandai dengan adanya peningkatan jumlah produksi barang serta peningkatan pada faktor produksi lainnya, sehingga suatu negara akan dapat menikmati standar hidup yang lebih baik. Namun sebaliknya pada tahun tertentu lainnya, perekonomian suatu negara dapat mengalami penurunan dimana produksi barang dan jasa akan menurun.

Kondisi tersebut merupakan gambaran dari siklus ekonomi yang dapat dapat digambarkan pola konjungtur yang berfluktuasi dari ekspansi (pemulihan) dan kontraksi (resesi) dalam aktivitas perekonomian di sekitar jalur dari trend pertumbuhan. Gelombang naik-turun aktivitas ekonomi yang terdiri atas :

- a. Gerakan menaik (*upturn* atau *expansion*)
- b. Titik puncak atau kulminasi (*peak*)
- c. Gerakan menurun (*downturn* atau *recession*)
- d. Titik terendah atau nadir (*trough*)



Fluktuasi dalam perekonomian tersebut secara keseluruhan dapat dianalisis melalui model permintaan dan penawaran agregat. Model permintaan aggerat menunjukkan

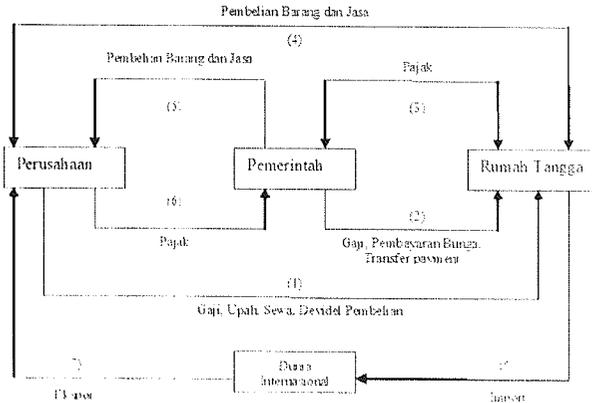
jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh sektor rumah tangga, perusahaan dan pemerintah pada tingkat harga tertentu, sedangkan model penawaran agregat menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dipilih oleh perusahaan untuk diproduksi dan dijual pada tingkat harga tertentu.

Dalam jangka pendek pergeseran-pergeseran pada permintaan agregat dapat menyebabkan fluktuasi pada output barang dan jasa dalam perekonomian sedangkan dalam jangka panjang pergeseran pada permintaan agregat mempengaruhi keseluruhan tingkat harga tetapi tidak mempengaruhi output. Disisi lain pergeseran-pergeseran pada penawaran agregat dapat menyebabkan stagflasi yakni periode merosotnya output (stagnasi) dan naiknya harga-harga (inflasi) .

1.7 Siklus Aliran Pendapatan dan Interaksi Pasar

Siklus aliran pendapatan (circular flow) merupakan sebuah model yang dapat menggambarkan bagaimana interaksi para pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk berbagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan (utility) masing-masing pelaku ekonomi. (Lihat Gambar 1.3) Jika merujuk pada gambaran arus perputaran output dan pengeluaran (circular flow of economic activities), maka aliran output (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh sektor bisnis dinamakan produk nasional, sedangkan aliran balas jasa terhadap penggunaan faktor produksi oleh sektor bisnis ke sektor rumah tangga dinamakan pendapatan nasional.

Gambar 1.3
Siklus aliran pendapatan



Siklus aliran pendapatan tersebut membagi perekonomian menjadi empat sektor:

- 1) Sektor Rumah Tangga (Households Sector), yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap memiliki sifat dan karakteristik yang sama (homogen dan identik).

Sektor ini memiliki faktor produksi yang dibutuhkan oleh sektor perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi yang dimilikinya berupa kesediaan menjadi tenaga kerja, kepemilikan barang modal (tanah, bangunan), barang modal, uang dalam kegiatan investasi untuk membantu sektor perusahaan. Dalam hal ini, sektor rumah tangga akan menerima pendapatan berupa gaji dan bunga serta deviden. Sebaliknya sektor ini akan mengalami pengeluaran dalam mengkonsumsi barang dan jasa hasil produksi sektor perusahaan. Sektor rumah tangga juga berhubungan dengan sektor pemerintah. Sektor rumah tangga dapat menerima pendapatan dari pemerintah berupa gaji, apabila bekerja sebagai pegawai di kantor

pemerintahan. Selain itu pendapatan dari sektor pemerintah dapat berupa tunjangan untuk orang yang tidak mampu, dan juga subsidi yang diberikan. Sektor rumah tangga akan mengalami pengeluaran kepada pemerintah melalui pembayaran pajak.

- 2) Sektor Perusahaan (Firms Sector), yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa.

Sektor ini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Sektor ini menerima pendapatan dari konsumsi sektor rumah tangga dan pemerintah, serta konsumsi sektor luar negeri melalui ekspor. Pengeluaran pada sektor ini yakni untuk membayar upah tenaga kerja sektor rumah tangga, sewa tanah atau bangunan, bunga pinjaman atau deviden, dan pembayaran pajak pada sektor pemerintah.

- 3) Sektor Pemerintah (Government Sector), yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan.

Sektor ini merupakan pihak pemerintah yang memiliki hak untuk mengatur sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Selain yang telah dijelaskan pada sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, sektor ini memiliki kewajiban dalam penyediaan barang-barang publik. Pendanaan penyediaan barang publik dilakukan melalui penarikan pajak dari kedua sektor tersebut. Selain itu sektor ini menerima pajak dari sektor luar negeri.

- 4) Sektor Luar Negeri (Foreign Sector), yaitu sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor-impor.

Sektor luar negeri ini terdapat pada perekonomian terbuka (*Open Economy*). Sektor ini menerima pendapatan dari kegiatan impor di dalam negeri. Dan melakukan pengeluaran dari kegiatan ekspor dari dalam negeri, serta pembayaran pajak saat barang masuk ke dalam negeri.

Berdasarkan konsep aliran siklus pendapatan juga dapat dianalisis bahwa secara makro terdapat tiga pasar utama yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, yaitu :

- 1) Pasar Barang dan Jasa (Goods and Services market)
Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa. Dalam perekonomian tertutup, permintaan utamanya berasal dari sektor rumah tangga dan pemerintah. Permintaan tersebut umumnya merupakan permintaan barang dan jasa akhir. Penawaran barang dan jasa berasal dari sektor perusahaan.
- 2) Pasar Tenaga Kerja (Labour Market)
Pasar tenaga kerja adalah interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam perekonomian tertutup, penawaran tenaga kerja berasal dari sektor rumah tangga. Sedangkan permintaannya berasal dari sektor perusahaan dan sektor pemerintah. Dalam perekonomian terbuka, penawaran dan permintaan tenaga kerja dapat berasal dari sektor luar negeri
- 3) Pasar Uang dan Modal (Money and Capital Market)
Pasar uang adalah interaksi antara permintaan uang dengan penawaran uang. Penawaran uang berasal dari pihak-pihak yang bersedia menunda hak penggunaan uangnya, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Permintaan akan uang berasal dari pihak-pihak yang membutuhkan uang dengan berbagai alasan. Jika hak penggunaan uang yang diperjualbelikan lamanya setahun atau kurang, maka pasar tersebut masuk kategori pasar uang (money market). sedangkan jika hak penggunaan

uang yang diperjualbelikan lamanya lebih dari setahun, maka pasar tersebut termasuk katagori pasar modal (capital market).

**Soal dan
Latihan**



**Pertanyaan Untuk Diskusi dan
Latihan**

1. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mendorong muncul dan berkembangnya ilmu ekonomi?
2. Coba Saudara pahami dan jelaskan kembali tentang pengertian ilmu ekonomi makro?
3. Coba Saudara diskusikan tentang berbagai permasalahan ekonomi makro di Indonesia?
4. Diskusikan dan Uraikan bagaimana peran pemerintah di bidang ekonomi ?
5. Coba Saudara nyatakan kembali tentang tujuan dan instrumen ekonomi makro ?
6. Diskusikan dan berikan contoh-contoh fakta dan peristiwa di Indonesia tentang siklus ekonomi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi maupun output riil!
7. Jelaskan dan analisis bagaimana siklus aliran pendapatan serta interaksi pasar yang terjadi dalam perekonomian!

STUDI KASUS

Untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara, para pakar ekonomi menggunakan banyak jenis data. Tiga variabel makro ekonomi terpenting adalah produk domestik bruto riil, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Para ekonom makro mempelajari bagaimana variabel-variabel tersebut diukur dan bagaimana variabel-variabel itu saling berinteraksi dan berubah sepanjang waktu. Gunakan data perekonomian Indonesia 10

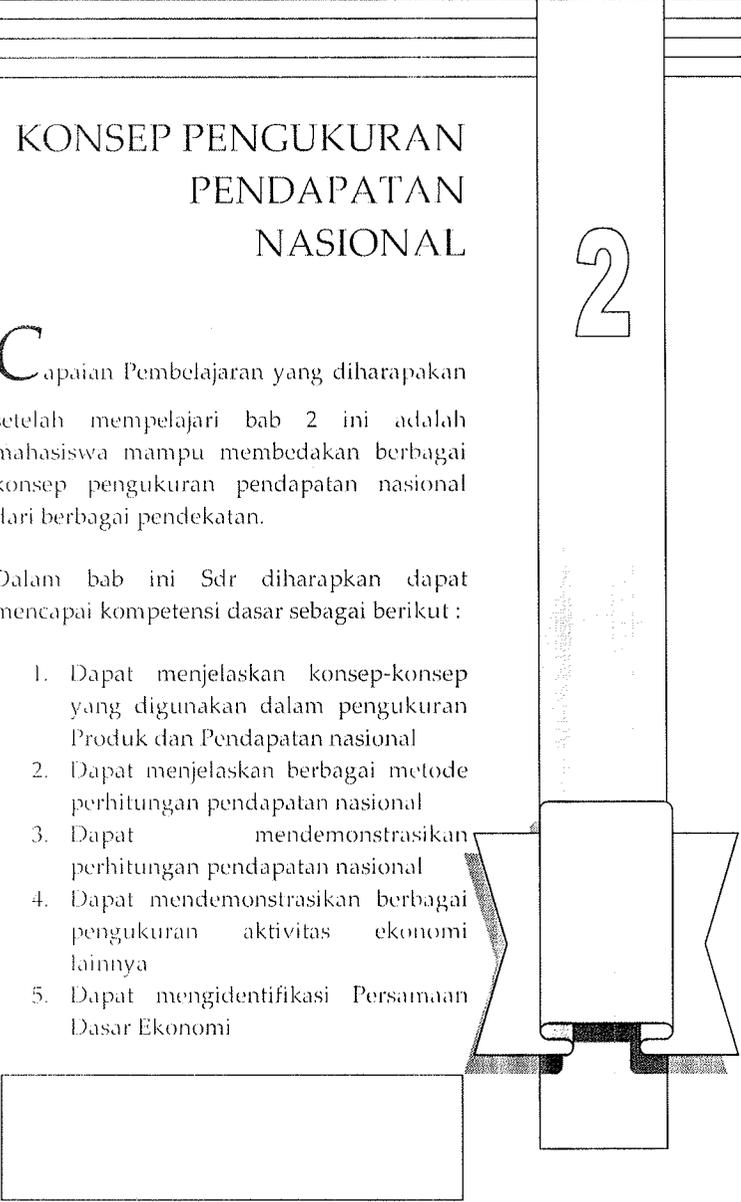
tahun terakhir, lalu gambarkan dengan mempergunakan grafik serta lakukan analisis atas ketiga variabel tersebut.

KONSEP PENGUKURAN PENDAPATAN NASIONAL

2

Capaian Pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari bab 2 ini adalah mahasiswa mampu membedakan berbagai konsep pengukuran pendapatan nasional dari berbagai pendekatan.

Dalam bab ini Sdr diharapkan dapat mencapai kompetensi dasar sebagai berikut :

1. Dapat menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam pengukuran Produk dan Pendapatan nasional
 2. Dapat menjelaskan berbagai metode perhitungan pendapatan nasional
 3. Dapat mendemonstrasikan perhitungan pendapatan nasional
 4. Dapat mendemonstrasikan berbagai pengukuran aktivitas ekonomi lainnya
 5. Dapat mengidentifikasi Persamaan Dasar Ekonomi
- 

2.1



Konsep PDB, PDRB, PND dan PN

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab satu, bahwa ilmu ekonomi sangat terkait dengan proses optimisasi (alokasi optimum) penggunaan sumber daya untuk memenuhi penyelesaian masalah antara yang tersedia dengan yang diminta. Proses alokasi sumber daya secara efisien di tingkat agregat (menyeluruh) yang berkaitan dengan aspek teori ekonomi makro dapat diukur melalui nilai *output* nasional yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Dijadikannya output nasional sebagai indikator terjadinya alokasi yang efisien secara makro karena (i) besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang seberapa efisiensi sumber daya yang ada dalam perekonomian (tenaga kerja dan kapital) digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, (ii) output nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara, (iii) output nasional merupakan gambaran awal tentang masalah struktural yang dihadapi suatu perekonomian.

Sejauh ini alat ukur terbaik dari kinerja perekonomian secara menyeluruh (agregat output) yang digunakan untuk mengetahui arah, intensitas dan kecepatan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi suatu negara diukur melalui output nasional atau yang lebih dikenal dengan istilah pendapatan nasional atau **Produk Domestik Bruto (PDB)** atau *Gross Domestic Product (GDP)*.

Beberapa konsep yang saling berkaitan dan perlu dipahami adalah sebagai berikut :

1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)

Terdapat tiga cara untuk mendefinisikan produk domestik bruto (PDB), yaitu :

- 1) Barang jadi (Final good), dimana produk domestik bruto (PDB) merupakan nilai akhir dari barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian selama periode waktu tertentu;
- 2) Nilai tambah (Value added), dimana produk domestik bruto merupakan jumlah dari nilai tambah didalam perekonomian selama periode waktu tertentu;
- 3) Pendapatan (income), dimana produk domestik bruto merupakan jumlah dari pendapatan didalam perekonomian selama periode waktu tertentu.

Dengan demikian produk Domestik Bruto dapat didefenisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi selama satu periode waktu tertentu.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan perolehan nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah atau daerah pada periode waktu tertentu

3. Produk Nasional Bruto (Gross National Product)

PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu Negara (warga negara) dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk

didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara tersebut yang berada di luar negeri.

Jika Pendapatan Faktor-faktor produksi perekonomian yang ada di Luar negeri menggunakan notasi PFLN dan Pendapatan Faktor-faktor produksi perekonomian yang ada di Dalam negeri dinotasikan PFDN, maka Pendapatan Nasional Bruto (PNB) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{GNP} = \text{GDP} - \text{PFLN} + \text{PFDN}$$

Selisih antara PFLN dengan PFDN merupakan Pendapatan Faktor Produksi Netto (PFN) atau net factor income, maka GNP dapat disederhanakan menjadi :

$$\text{GNP} = \text{GDP} - \text{PFN} \text{ atau}$$

$$\text{GNP} = \text{GDP} + \text{PFN}$$

Artinya, jika PFN bernilai negatif, maka pembayaran terhadap pendapatan faktor produksi luar negeri lebih besar daripada penerimaan atas balas jasa faktor produksi yang digunakan oleh perekonomian. Hal ini bermakna bahwa nilai import faktor produksi lebih besar daripada nilai ekspor faktor produksi. Sedangkan jika PFN bernilai positif, maka pembayaran terhadap pendapatan faktor produksi luar negeri lebih kecil daripada penerimaan atas balas jasa faktor produksi yang digunakan oleh perekonomian. Hal ini bermakna bahwa nilai impor faktor produksi lebih kecil daripada nilai ekspor faktor produksi

4. Product Nasional Netto (Net National Product)

Produk Nasional Netto atau PNN adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam

periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.

$$PNN = GNP - \text{Penyusutan}$$

5. Pendapatan Nasional (National Income)

Pendapatan Nasional atau PN adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax) dan ditambahkan subsidi.

$$PN = PNN - \text{Pajak tidak langsung} + \text{subsidi}$$

6. Pendapatan Personal (Personal Income)

Pendapatan persoal atau PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan social, pajak perseorangan dan ditambah dengan *transfer payment*.

$$PI = (PN + \text{transfer payment}) - (\text{Laba ditahan} + \text{iuran asuransi} + \text{iuran jaminan social})$$

7. Pendapatan Personal Disposable (Disposable personal income)

Pendapatan personal disposable atau PPD adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya

$$DI = PI - \text{Pajak langsung}$$

Berdasarkan konsep tersebut di atas, dari produk domestik bruto hingga pendapatan personal disposable dapat diringkaskan sebagai berikut :

| | |
|---------------------|---|
| $C + I + G + X - M$ | = <i>Produk Domestik Bruto (PDB)</i> |
| Ditambah | : PFDN |
| Dikurangi | : PFLN |
| <hr/> | |
| Dikurangi | = <i>Produk Nasional Bruto (PNB)</i> |
| | : Penyusutan |
| <hr/> | |
| Dikurangi | = <i>Produk Nasional Netto (PNN)</i> |
| Ditambah | : Pajak Tidak Langsung |
| | : Subsidi |
| <hr/> | |
| Dikurangi | = <i>Pendapatan Nasional (PN)</i> |
| Dikurangi | : Laba ditahan |
| Dikurangi | : Iuran Asuransi |
| Dikurangi | : Iuran Jaminan Sosial |
| Ditambah | : Transfer payment |
| <hr/> | |
| Dikurangi | = <i>Pendapatan Personal (Personal income=PI)</i> |
| | : Pajak Pendapatan personal |
| <hr/> | |
| | = <i>Pendapatan Personal Disposable</i> |

2.2  **Metode Perhitungan Pendapatan Nasional (PDB)**

Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan pendapatan nasional, yaitu (1) Pendekatan pengeluaran (expenditure approach); (2)

Pendekatan pendapatan (Income Approach) dan (3) Pendekatan produksi (production approach).

1. Pendekatan Pengeluaran (expenditure approach)

Pendekatan pengeluaran melakukan penghitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan sektor ekonomi, yakni dari rumah tangga (C), perusahaan (I), pemerintah (G) dan sektor luar negeri berupa ekspor (X) dan Impor (M) pada suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu. Angka yang diperoleh dari perhitungan ini menunjukkan besarnya Produk Nasional bruto (Gross National Product = GNP) masyarakat dalam perekonomian negara tersebut.

| No | Rumah Tangga Ekonomi | Pengeluaran Untuk | Notasi |
|---------------------|--------------------------|---|--------|
| 1 | RT Konsumen | Konsumsi (Consumption) | C |
| 2 | RT Produsen (Perusahaan) | Investasi (Investment) | I |
| 3 | RT Pemerintah | Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure) | G |
| 4 | RT Luar Negeri | Ekspor – Impor (Export – import) | X - M |
| Pendapatan Nasional | | | Y |

Berdasarkan tabel tersebut, maka pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

2. Pendekatan Produksi (Production Approach)

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah menghitung nilai tambah seluruh kegiatan

ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari masing-masing total nilai produksi (output) tiap-tiap sektor atau subsektor atau didasarkan atas jumlah nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan sesuatu masyarakat atau negara dalam satu tahun.

Output adalah nilai barang atau yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, dimana jenisnya ada 3 (tiga) macam yaitu (i) Output utama (output utama produksi), (ii) Output sampingan, bukan tujuan utama produksi, dan (iii) Output ikutan, output yang terjadi bersama-sama/tak dapat dihindarkan dengan output utamanya.

Biaya antara adalah barang-barang dan jasa tidak tahun lama yang digunakan/habis dalam proses produksi.

Nilai Tambah, terdiri dari Nilai Tambah Bruto (NTB), yaitu Output dikurangi Biaya Antara yang merupakan produk dari proses produksi, dimana produk ini terdiri atas (a) pendapatan faktor yang terdiri dari upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai, sewa tanah sebagai balas jasa tanah, bunga sebagai jasa modal, dan keuntungan sebagai balas jasa kewirswasta (b) Penyusutan barang modal yang dipakai untuk produksi dan (c) Pajak tidak langsung neto, yakni pajak langsung dikurangi subsidi. Sedangkan Nilai Tambah Neto (NTN) merupakan NTB dikurangi penyusutan.

Semua nilai hasil akhir barang dan jasa tersebut dijumlahkan. Apabila jumlah produk ke 1 dinotasikan dengan Q_1 , produk ke 2 dinotasikan dengan Q_2 , dan seterusnya hingga produk ke n dinotasikan dengan Q_n , sedangkan di lain pihak harga satuan produk dinotasikan dengan P_1 , harga satuan produk ke 2 dinotasikan dengan P_2 , dan seterusnya hingga harga satuan produk ke n yang

dinotasikan dengan P_n , maka dalam bentuk persamaan matematika pendekatan produk akan dihitung sebagai berikut :

$$NI = P_1Q_1 + P_2Q_2 + \dots + P_nQ_n \quad \text{atau}$$

$$NI = \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

yang mempunyai makna bahwa pendapatan nasional atas dasar harga pasar (NI) besarnya sama dengan produk nasional atas dasar harga pasar.

$$\begin{aligned} \text{OUTPUT}_{B,T} &= \text{PRODUKSI}_T \times \text{HARGA}_T \\ \text{NTB}_{B,T} &= \text{OUTPUT}_{B,T} - \text{BIAYA}_{B,T} \\ \text{Atau} \\ \text{NTB}_{B,T} &= \text{OUTPUT}_{B,T} \times \text{RASIO NTB}_0 \end{aligned}$$

Dimana :

$\text{OUTPUT}_{B,T}$ = Output/nilai produksi bruto atas dasar harga berlaku tahun t

$\text{NTB}_{B,T}$ = Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku tahun ke t

$\text{PRODUKSI}_{B,T}$ = Kuantum produksi tahun ke t

HARGA_T = Harga produksi tahun ke t

RASIO NTB = Perbandingan NTB terhadap Output (NTB/Output)

RASIO NTB_0 = Rasio NTB pada tahun dasar (0)

Sebagai contoh, ditunjukkan output sektoral dari suatu negara X pada tahun 2010, yaitu :

| No | Sektor Produksi | Nilai | | |
|--------|-----------------------|--------|-------|--------|
| | | Output | Input | Tambah |
| 1 | Pertanian (kapas) | 600 | 0 | 600 |
| 2 | Pabrik Benang | 800 | 600 | 200 |
| 3 | Pabrik Tekstil | 1200 | 800 | 400 |
| 4 | Pabrik Garment | 1600 | 1200 | 400 |
| 5 | Perdagangan (pakaian) | 2000 | 1600 | 400 |
| Jumlah | | 6200 | 4200 | 2000 |

Berdasarkan tabel tersebut, produk domestik bruto (PDB) dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah dari masing-masing sektor produksi, yaitu :

$$PDB_{2010} = \sum_{i=1}^5 NT_i :: 600 + 200 + 400 + 400 + 400 = 2000$$

2. Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan melakukan perhitungan produk domestik bruto dengan memandang bahwa nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas penggunaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Misalnya faktor produksi yang digunakan digambarkan dalam fungsi produksi $Q = f(K, L)$ dan balas jasa atas penggunaan modal (K) adalah pendapatan sewa dan balas jasa atas penggunaan tenaga kerja (labor=L) adalah upah atau gaji, maka pendapatan nasionalnya adalah penjumlahan pendapatan sewa dengan upah/gaji. Untuk lebih jelasnya perhatikan hal berikut :

| No | Faktor Produksi yang digunakan | Penerimaan oleh pemilik faktor produksi | Notasi |
|----|--------------------------------|---|--------|
| 1 | Alam | Sewa (rent) | r |
| 2 | Tenaga Kerja | Upah/Gaji (wage) | w |
| 3 | Modal | Bunga (interest) | i |
| 4 | Skill | Laba (Profit) | π |

Dengan demikian perhitungan pendapatan nasional yang menggunakan metode pendapatan dilakukan dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh semua pelaku ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu. Pendapatan tersebut berupa pendapatan dari sewa (r), bunga (i), upah (w), keuntungan (Π) dan lain sebagainya.

$$PN = r + i + w + \Pi$$

Contoh :

| PENDEKATAN PENGELUARAN | | | PENDEKATAN PENDAPATAN | | | |
|---|----------|-------|--|----------|-------|-------|
| | Jumlah | % GDP | | % NI | % GDP | |
| Pengeluaran Konsumsi Personal | 7.760,9 | 70,5 | Gaji Tenaga Kerja | 6.289,0 | 71,1 | 57,2 |
| + Investasi Domestik (Sukses & Kacau) | 1.695,8 | 15,1 | + Pendapatan sewa (Keperluan Kerja) | 834,1 | 9,4 | 7,6 |
| + Pengeluaran konsumsi Pemerintah dan investasi KECOR | 2.075,5 | 18,9 | + Pendapatan sewa dari Perorangan (Net) | 153,8 | 1,7 | 1,4 |
| + Net Ekspor barang dan jasa | (498,1) | (4,5) | + Laba Perusahaan | 1.021,1 | 11,5 | 9,3 |
| | | | + Jasa Bunga (net) | 543,0 | 6,1 | 4,9 |
| | | | = Pendapatan Nasional | 8.841,0 | 100,0 | |
| | | | + Pajak Tidak Langsung | 864,2 | | 7,9 |
| | | | = Net Nasional Produk | 9.705,2 | | |
| | | | + Konsumsi Modal Tetap | 1.353,9 | | 12,3 |
| | | | = Gross Nasional Produk | 11.059,1 | | |
| | | | + Pendapatan yang diterima dari rest of world | (329,0) | | (3,0) |
| | | | + Pendapatan yang dibayarkan untuk rest of world | 273,9 | | 2,5 |
| = Gross Domestik Produk | 11.034,1 | 100,0 | = Gross Domestik Produk | 11.034,0 | | 100,0 |

Perhitungan pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) akan memberikan manfaat sebagai gambaran ringkas dalam mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Kemakmuran suatu negara dan tingkat pembangunan sebuah negara dapat diukur dari pendapatan perkapita, yaitu besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita ini didapatkan dari hasil pembagian antara pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB Perkapita, artinya makin tinggi nilai PDB per kapita menunjukkan semakin makmur suatu negara tersebut.

Disisi lain Produk Domestik Bruto juga dapat menunjukkan struktur perekonomian nasional suatu negara. Berdasarkan struktur perekonomian nasional tersebut suatu negara dapat digolongkan ke dalam negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan perhitungan tingginya sumbangan setiap sektor terhadap produk domestik bruto dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, dan Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya.

Disamping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.

Dalam prakteknya, perhitungan pendapatan nasional dapat dihitung atas dua pendekatan, yaitu :

1) Pendapatan nasional bruto nominal (GNP at market price)

Pendapatan nasional bruto nominal (GNP at market price) adalah produk domestik bruto yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Artinya GNP nominal mengukur suatu output pada suatu periode yang terdapat didalamnya dan dinilai menurut harga pasar yang berlaku pada tahun itu juga. Pendapatan nasional nominal ini belum disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada tingkat harga atau inflasi, oleh karena itu GNP nominal sering disebut sebagai produk domestik yang belum tersesuaikan (unadjusted GDP).

2) Pendapatan nasional bruto riil (real GNP)

Pendapatan nasional bruto riil ini adalah produk domestik bruto yang dihitung berdasarkan harga konstan (constant GNP) atau deflated GNP, yakni GNP menurut harga konstan. Pendapatan nasional bruto riil adalah pendapatan yang diukur dan dihitung berdasarkan harga konstan dengan tingkat harga yang berlaku pada tahun dasar. Dengan kata lain bahwa pendapatan nasional bruto riil ini telah disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam tingkat harga atau tingkat inflasi atau disebut juga produk domestik yang tersesuaikan (adjusted GDP).

Cara menghitung GNP nominal dan riil adalah sebagai berikut :

a. $GNP \text{ Nominal} = GNP \text{ riil} \times GNP \text{ Deflator}$

b. $GNP \text{ riil} = \left[\frac{GDP \text{ Nominal}}{GDP \text{ Deflator}} \right] \times 100$

c. $GNP \text{ Deflator} = \left[\frac{GDP \text{ Nominal}}{GDP \text{ Riil}} \right] \times 100$

2.3

**Pengukuran Aktivitas Ekonomi Lainnya**

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab satu, bahwa tujuan utama dari makroekonomi adalah (a) rendahnya tingkat pengangguran (*a low rate of unemployment*), (b) Stabilitas harga (*price stability*) dan Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Terhadap tiga variabel makro utama tersebut pengukurannya dapat dilakukan sebagai berikut :

1) Pengukuran Tingkat Pengangguran

Indikator untuk menghitung tingkat pengangguran adalah dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang sedang mencari pekerjaan, dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, dengan rumus :

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\sum \text{Orang Yang Mencari Pekerjaan}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Contoh

Dari data ketenagakerjaan 2014 diketahui jumlah orang yang mencari pekerjaan sebanyak 7.240.000 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 121.870.000 orang. Sehingga tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2014 adalah :

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{7.240.000}{121.870.000} \times 100\% = 5,94\%$$

Interpretasi dari besarnya angka pengangguran terbuka yaitu adanya implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi

angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

2) Stabilitas Harga

Stabilisasi Harga (*price stabilization*) adalah tindakan mempertahankan suatu harga barang atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengukur stabilitas harga dapat dilakukan melalui pengukuran inflasi, dimana pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi dilakukan stabilitas harga sebagai upaya di dalam menstabilkan harga barang dan jasa tersebut selama periode tertentu. Mishkin (2002) mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan tingkat harga yang kontinyu dan terus menerus, mempengaruhi para pelaku ekonomi baik individu-individu, perusahaan ataupun pemerintah.

Kenaikan harga atau laju inflasi diukur dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

a. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index)

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu Secara umum untuk menghitung inflasi digunakan rumus sebagai berikut :

$$\pi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

Dimana :

π = Inflasi

IHK_t = Indeks Harga Konsumen Tahun ini

IHK_{t-1} = Indeks Harga Konsumen Tahun Sebelumnya

Indeks harga konsumen (consumer price index) dirancang untuk mengukur perubahan harga dari sekumpulan barang-barang dan jasa-jasa tertentu, yang dihitung dengan metode agregat tertimbang rumus Laspeyres. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$I_{IHK} = \frac{\sum H_t K_0}{\sum H_0 K_0} \times 100$$

Dimana : H_t : Harga pada tahun t

H₀ : harga pada tahun dasar

K₀ : Kuantitas pada tahun dasar sebagai pembobot

Pada saat ini umumnya Biro Pusat Statistik melakukan perhitungan indeks harga konsumen mempergunakan rumus Laspeyres dengan modifikasi sebagai berikut :

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k P_{(n-1)i}^{I_{n-1}} \times P_{(n-1)i} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^k P_{0i} Q_{0i}} \times 100$$

Dimana :

I_n : Indeks bulan ke n

P_{ni} : Harga jenis barang i, bulan ke n

P_{(n-1)i} : Harga jenis barang i, bulan ke (n-1)

P_{(n-1)i}Q_{ni} : Nilai konsumsi jenis barang i, bulan ke (n-1)

P_{0i}Q_{0i} : Nilai konsumsi jenis barang i, pada bulan dasar

K : Banyaknya jenis barang paket komoditas dalam sub kelompok

Dengan demikian IHK mengukur inflasi berdasarkan sekumpulan harga pada kebutuhan hidup konsumen

yang paling banyak digunakan, dan masing-masing item memiliki bobot. Di Indonesia sekumpulan harga pada kebutuhan hidup konsumen tersebut mempergunakan sembilan bahan pokok dalam menghitung IHK.

Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) digunakan sebagai indikator patokan nilai inflasi.

Contoh :

| No | ITEM | BOBOT | P0 | P1 | % Kenaikan | Tertimbang |
|---------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------------|
| 1 | Beras | 0,070 | 35,10 | 36,00 | 2,56 | 0,18 |
| 2 | Daging ayam ras | 0,195 | 70,50 | 71,40 | 1,28 | 0,25 |
| 3 | Ikan segar | 0,091 | 19,90 | 21,80 | 9,55 | 0,87 |
| 4 | Minyak Goreng | 0,096 | 15,50 | 17,40 | 12,26 | 1,18 |
| 5 | Bahan Bakar RT | 0,080 | 15,20 | 17,10 | 12,50 | 1,00 |
| 6 | Tarif Listrik | 0,099 | 22,00 | 23,90 | 8,64 | 0,85 |
| 7 | Emas perhiasan | 0,130 | 80,20 | 82,10 | 2,37 | 0,31 |
| 8 | Angkutan Dalam Kota | 0,082 | 24,05 | 25,95 | 7,90 | 0,65 |
| 9 | Bensin | 0,110 | 25,00 | 26,90 | 7,60 | 0,84 |
| 10 | Tarif Pulsa Ponsel | 0,047 | 19,80 | 21,70 | 9,60 | 0,45 |
| Inflasi | | | | | | 6,57 |

Keterangan

% kenaikan = $(P1-P0)/P0$

Tertimbang = bobot x kenaikan

Inflasi = Jumlah tertimbang

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (Wholesale Price Index)

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. IHPB ini mengukur inflasi

berdasarkan harga-harga barang pada tingkat produsen, metode perhitungannya sama dengan IHK hanya berbeda jumlah & jenis barang dalam keranjang. Barang yang termasuk kategori barang ini merupakan barang mentah dan barang setengah jadi.

c. Indeks Harga Implisit (GDP Deflator)

Indeks Harga Implisit (IHI) menggunakan angka deflator Produk Domestik Bruto berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. GDP deflator adalah rasio antara GDP nominal dengan GDP real dari tahun tersebut. Rumus matematis GDP deflator adalah sebagai berikut :

$$GDP\ deflator = \frac{GDP_{Nominal}}{GDP_{real}} = \frac{\sum P_1 Q_1}{\sum P_0 Q_1}$$

Dimana :

P_1 = Harga pada tahun tertentu

P_0 = Harga tahun dasar

Q_1 = Kuantitas pada tahun tertentu

Angka inflasi yang biasanya dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) terbagi atas inflasi bulanan (month to month/mtm), inflasi triwulanan (quarter to quarter/qtq) dan inflasi tahunan (year on year/yoy).

Untuk mengukur stabilitas harga selain inflasi diantaranya yaitu :

a) Daya beli (purchasing power)

Daya Beli menjadi salah satu indikator penting untuk menilai perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Daya beli menunjukkan kemampuan seseorang dengan sejumlah uang membeli sesuatu produk (barang, jasa dan atau ide) yang dapat

memenuhi kebutuhan dan keinginannya (*needs and wants*). Daya beli itu sendiri tergantung pada besarnya pendapatan dan tingkat harga. Sejalan dengan tidak konstannya pendapatan dan harga yang berlaku menyebabkan naik turunnya daya beli.

Perubahan daya beli tentunya akan tergantung kepada tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi ini terkait erat dengan minat dan perilaku konsumsi masyarakat. Bagi masyarakat yang senang berbelanja (tindakan konsumtif) cenderung mempercepat inflasi. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat untuk memelihara kestabilan daya beli saat ini sekaligus untuk memprediksi kemampuan berkonsumsi pada masa mendatang. Pada lazimnya daya beli cenderung menurun dari waktu ke waktu mengingat nilai uang tetap, digerogoti oleh naiknya harga barang (inflasi). Perubahan daya beli domestik pada dasarnya diukur dari harga riil, yaitu tingkat harga nominal setelah dikurangi dengan inflasi.

Sedangkan untuk daya beli internasional ditunjukkan oleh nilai tukar. Nilai tukar mata uang (*exchange rate*) suatu negara adalah jumlah satuan mata uang domestik yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Hal ini berarti bahwa nilai tukar mata uang suatu negara menunjukkan daya beli internasional negara yang bersangkutan, sehingga perubahan di dalam nilai tukar mata uang menunjukkan perubahan daya beli negara tersebut.

Sedangkan dari sisi pelaku ekonomi, inflasi tinggi dan tidak stabil menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan bisnis. meningkatnya ketidakpastian (*uncertainty*)

dapat mengakibatkan semakin memburuknya *adverse selection* dan *moral hazard* yang pada gilirannya mengakibatkan akan memperburuk kondisi perekonomian

b) Tingkat Bunga

Harga dari uang adalah tingkat bunga nominal. Tingkat bunga bertindak sebagai alat ukur yang mengontrol arus uang antara pihak yang menyediakan dana (*supplier of funds*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*demand of fund*). Tingkat bunga tentunya berkaitan dengan kenaikan harga (*inflasi*). Pada kondisi dimana inflasi diestimasikan naik, maka hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap nilai riil pendapatan tetap yang diperoleh dari tabungan. Oleh karena itu para ekonom membedakan antara tingkat bunga nominal dan tingkat bunga riil.

Tingkat bunga nominal (*nominal interest rate*) adalah tingkat bunga yang biasa dibayarkan oleh si peminjam kepada orang yang meminjamkan atau tingkat bunga yang dibayar investor untuk meminjam uang, sedangkan tingkat bunga riil (*real interest rate*) adalah tingkat bunga nominal yang dikoreksi untuk menghilangkan pengaruh inflasi. Dengan demikian peningkatan/penurunan tingkat bunga riil melalui penurunan/peningkatan inflasi sementara tingkat bunga nominal tetap, maka peningkatan/penurunan tingkat bunga riil akan mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi sehingga akan meningkatkan ekspektasi return yang pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih perusahaan.

3) **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan secara fisik atas output barang-barang dan jasa dalam

perekonomian. Sejahter ini alat ukur terbaik dari kinerja perekonomian secara menyeluruh (agregat output) yang digunakan untuk mengetahui arah, intensitas dan kecepatan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi suatu negara diukur melalui output nasional atau yang lebih dikenal dengan istilah pendapatan nasional atau **Produk Domestik Bruto (PDB)** atau *Gross Domestic Product (GDP)*, yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi selama satu periode waktu tertentu. Sedangkan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product (GNP)* adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara (warga negara) dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara tersebut yang berada di luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan rumus :

$$PE = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100$$

Produk Domestik Bruto dari sisi pengeluaran dapat dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran atau expenditure dari masing - masing sektor perekonomian, yaitu:

- 1) Pengeluaran konsumsi (C), meliputi semua pengeluaran rumah tangga keluarga dan perseorangan serta lembaga swasta bukan perusahaan untuk membeli barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan.
- 2) Pengeluaran investasi (I), meliputi semua pengeluaran domestik (dalam negeri) yang dilakukan oleh swasta untuk mendirikan bangunan, mesin - mesin, perlengkapan, dan jumlah persediaan perusahaan.

- 3) Pengeluaran pembelian pemerintah (G), meliputi pembayaran pensiun, bea siswa, subsidi dalam berbagai bentuk dan transfer pemerintah.
- 4) Ekspor netto ($X - M$), meliputi keseluruhan jumlah barang dan jasa yang diekspor dan diimpor. Jika ekspor lebih besar dari impor maka ekspor netto bertanda positif (+), juga sebaliknya.

Atas dasar tersebut persamaan dasar model makro dari pendapatan nasional yaitu :

$$\text{Agregat Expenditure} = Y = C + I + G + (X - M)$$

**Soal dan
Latihan**



**Pertanyaan Untuk Diskusi dan
Latihan**

1. Sebutkan dan jelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam pengukuran Produk dan Pendapatan?
6. Coba Saudara pahami dan jelaskan kembali tentang berbagai metode perhitungan pendapatan nasional !
2. Coba Saudara diskusikan tentang metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dan berikan contohnya secara jelas dan rinci! Cari data PDB atas dasar metode tersebut selama 10 tahun terakhir, gambarkan grafiknya yang menarik dan analisis!
3. Coba Saudara diskusikan tentang metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dan berikan contohnya secara jelas dan rinci! Cari data PDB atas dasar metode tersebut selama 10 tahun terakhir, gambarkan grafiknya yang menarik dan analisis!
4. Berdasarkan soal no 2 atau 3 coba coba Saudara hitung pertumbuhan ekonominya dan bandingkan dengan data yang diperoleh Saudara!

5. Telaah kembali tentang berbagai metode pengukuran inflasi lalu cari data IHK 10 tahun terakhir dan hitung tingkat inflasinya lalu bandingkan dengan data yang Saudara Peroleh!
6. Telaah kembali tentang metode pengukuran tingkat pengangguran lalu cari data ketenagakerjaan di Indonesia selama 10 tahun terakhir dan hitung tingkat penganggurannya lalu bandingkan dengan data yang Saudara Peroleh!

STUDI KASUS

Kaji ulang kembali kasus yang ada di bab 1 lalu diskusikan kembali untuk pemahaman bagaimana mengukur kinerja perekonomian suatu negara.

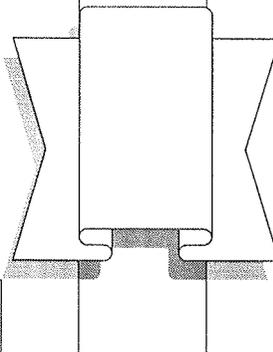
KONSUMSI, TABUNGAN DAN INVESTASI

3

Capaian Pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari bab 3 ini adalah mahasiswa mampu menganalisis tentang perilaku konsumsi, tabungan dan investasi.

Dalam bab ini Sdr diharapkan dapat mencapai kompetensi dasar sebagai berikut :

1. Dapat menjelaskan dan menganalisis fungsi konsumsi
2. Dapat menjelaskan dan menganalisis fungsi tabungan
3. Dapat menjelaskan dan menganalisis fungsi investasi



3.1



Pendahuluan

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab dua, bahwa keberhasilan dalam pembangunan ekonomi suatu negara diukur melalui output nasional atau yang lebih dikenal dengan istilah pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)*. Pergerakan aktifitas perekonomian dari tahun ke tahun ditentukan oleh 3 hal yang dalam perekonomian makro saling berkaitan satu dengan lainnya; yaitu: Produksi, Pendapatan dan Permintaan. Interaksi ketiganya dapat dinyatakan bahwa perubahan permintaan untuk barang dan jasa menyebabkan perubahan produksi, perubahan produksi menyebabkan perubahan pendapatan dan perubahan pendapatan menyebabkan perubahan permintaan barang.

Produk Domestik Bruto (Y) merupakan jumlah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Dari segi pendekatan pengeluaran, Pendapatan Nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Sektor-sektor tersebut adalah sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintahan dan sektor perdagangan internasional. Pengeluaran sektor rumah tangga dicerminkan oleh konsumsi masyarakat (C), pengeluaran sektor badan usaha dicerminkan oleh investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan (I), pengeluaran sektor pemerintah dicerminkan oleh pengeluaran pemerintahan (G), sedangkan pengeluaran perdagangan dengan luar negeri tercermin dari selisih antara ekspor dan impor Negara yang bersangkutan ($X-M$).

Dalam aktivitas perekonomian suatu negara, konsumsi mempunyai peran penting di dalamnya serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi, semakin tinggi tingkat perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan dalam pendapatan nasional suatu negara. Dalam perekonomian suatu negara juga, tabungan dan investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di negara-negara berkembang (*developing countries*) membutuhkan dana yang cukup besar. Usaha pengalihan sumber dana dalam negeri dalam bentuk tabungan untuk membiayai pembangunan ekonomi mutlak dibutuhkan. Dalam proses pembentukan modal secara teoritis setiap anggota masyarakat memerlukan modal dalam meningkatkan kegiatan produksinya. Modal tersebut dihimpun dari tabungan yang diperoleh dari surplus pendapatan setelah dikurangi untuk konsumsi jangka pendek dan konsumsi sehari-hari. Tabungan yang dipupuk kemudian ditingkatkan menjadi investasi dan kemudian digunakan untuk pembentukan modal. Dengan modal inilah kemungkinan kegiatan ekonomi semakin meningkat, pendapatan menjadi terangkat, terjadi surplus, tabungan meningkat dan otomatis investasi juga meningkat.

Dalam bab tiga ini dibahas bagaimana fungsi konsumsi berinteraksi dengan fungsi tabungan dan juga fungsi investasi.

3.2



Fungsi Konsumsi

Teori Konsumsi Keynes baru muncul pada saat masa *Great Depression* tahun 1929-1930. Teori ini menentang teori ekonomi klasik yang dicetuskan oleh J.B. Say, yaitu paham bahwa penawaran menciptakan permintaannya sendiri (*Supply*

creates its own demand). Keynes menolak pendapat pendapat tersebut dan menyatakan bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan.

Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika Great Depression melanda, maka masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh. Selanjutnya Keynes memberikan solusi dalam masalah tersebut yaitu adanya campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri.

Teori Konsumsi Keynes menyatakan bahwa *"Pengeluaran seseorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. Semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin banyak tingkat konsumsinya pula, dan tingkat tabungannya pun akan semakin bertambah, dan sebaliknya apabila tingkat pendapatan seseorang semakin kecil, maka seluruh pendapatannya digunakan untuk konsumsi sehingga tingkat tabungannya nol"*.

Teori Keynes atas Konsumsi (Keynesian Consumption Model) mengembangkan hipotesis melalui tiga proposisi pokok yaitu (i) Pendapatan adalah faktor utama yang menentukan

konsumsi, (ii) kecenderungan mengkonsumsi marginal (marginal propensity to consume/MPC) bersifat positif tetapi nilainya tidak lebih rendah dari satu dan (iii) kecenderungan rata-rata mengkonsumsi (average propensity to consume/APC) menurun ketika pendapatan mengalami peningkatan tetapi MPC tetap.

a. Hubungan Pendapatan dengan konsumsi

Keynes berpendapat bahwa pengeluaran untuk konsumsi personal (personal consumption expenditure) yaitu pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang baik barang-barang tahan lama (durable goods) maupun barang-barang tidak tahan lama (nondurable/ perishable goods), dan jasa sangat tergantung kepada pendapatan. Selanjutnya Keynes menyatakan bahwa jika tingkat pendapatan meningkat maka konsumsi juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif atau berbanding lurus antara tingkat pendapatan dengan konsumsi. Secara matematis pernyataan hubungan antara pendapatan dengan konsumsi dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$C = f(Y) \dots\dots\dots 1)$$

Persamaan (1) menunjukkan bahwa konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan. Jika perubahan pendapatan (Y) selalu diikuti oleh perubahan konsumsi (C) secara proporsional, maka secara eksplisit fungsi konsumsi dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$C = bY \dots\dots\dots 2)$$

Persamaan (2) menunjukkan bahwa perubahan tambahan konsumsi akan tergantung kepada perubahan tambahan pendapatan. Jika tambahan pendapatan meningkat sebesar satu satuan, maka besarnya tambahan konsumsi yang disebabkan karena adanya tambahan pendapatan adalah sebesar b satuan.

Namun Keynes juga menyatakan bahwa terdapat batas minimal konsumsi yang tidak tergantung pada pendapatan yang disebut dengan konsumsi otonomos (autonomous consumption). Hal ini menunjukkan bahwa jika pendapatan sama dengan nol, maka terdapat pengeluaran konsumsi minimal yang harus dipenuhi, sehingga persamaan (2) akan berubah menjadi persamaan berikut :

$$C = a + bY \quad \dots\dots\dots 3)$$

Dimana :

- C = Pengeluaran untuk konsumsi
- a = Besarnya konsumsi pada saat pendapatan sama dengan nol (konsumsi otonomis
- b = *Marginal Propensity to consume (MPC)* ;
 $0 \leq b \leq 1$
- Y = Pendapatan

b. Kecenderungan Mengkonsumsi Marjinal

Kecenderungan mengkonsumsi marginal (marginal propensity to consume = MPC) atau sering juga disebut dengan hasrat untuk mengkonsumsi menunjukkan tentang besarnya perubahan tambahan konsumsi sebagai akibat adanya perubahan tambahan pendapatan. Secara matematis pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut :

$$MPC = \frac{\partial C}{\partial Y} \dots\dots\dots 4)$$

Persamaan (4) menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pendapatan (pendapatan disposable) sebesar satu unit, maka konsumsi akan berubah sebesar koefisien dari parameter konsumsi tersebut (b). Besarnya MPC selalu positif dan nilainya tidak lebih dari satu atau $0 < MPC \leq 1$.

c. Kecenderungan Mengonsumsi Rata-rata

Kecenderungan mengonsumsi rata-rata (Average Propensity to Consume = APC) atau sering disebut juga dengan rata-rata hasrat untuk mengonsumsi merupakan rasio antara total konsumsi dengan pendapatan (pendapatan disposabel), yang secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut ;

$$APC = \frac{C}{Y} \dots\dots\dots 5)$$

Persamaan (5) menunjukkan bahwa APC berhubungan terbalik dengan pendapatan, sehingga ketika tingkat pendapatan meningkat, maka APC akan mengalami penurunan ketika MPC tetap. Hal ini juga menunjukkan bahwa MPC lebih kecil dari APC. Pernyataan ini dapat dibuktikan melalui persamaan berikut :

$$APC = \frac{C}{Y}$$

$$APC = \frac{a + bY}{Y} \dots\dots\dots 6)$$

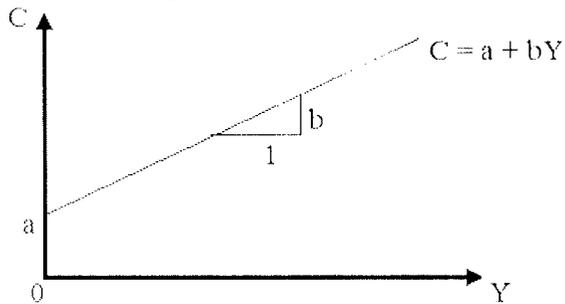
$$APC = aY^{-1} + b$$

$$\frac{\partial APC}{\partial Y} = -\frac{a}{Y^2} < 0$$

Persamaan (6) menunjukkan bahwa jika pendapatan meningkat dan MPC tetap maka APC akan mengalami penurunan.

Secara umum grafik, fungsi konsumsi dapat digambarkan sebagai berikut :

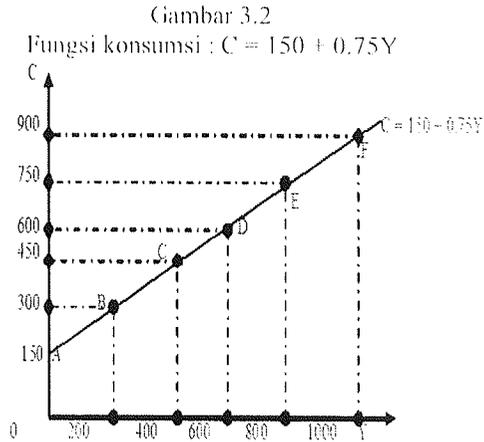
Gambar 3.1
Fungsi Konsumsi dengan $C = a + bY$



Contoh 3.1 :

| Tabel 1. Fungsi Konsumsi $a = 150$ dan $MPC = 0,75$ | | | | |
|--|--------------|----------------------------|--|--|
| Titik Dalam Gambar | Pendapatan Y | Perubahan Dalam Pendapatan | Perubahan dalam Konsumsi $(0,75 \times Y) = 150$ | Pengeluaran Konsumsi $C = 150 + 0,75Y$ |
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | 0 | - | - | 150 (=a) |
| B | 200 | 200 | 150 | 300 |
| C | 400 | 200 | 300 | 450 |
| D | 600 | 200 | 450 | 600 |
| E | 800 | 200 | 600 | 750 |
| F | 1000 | 200 | 750 | 900 |

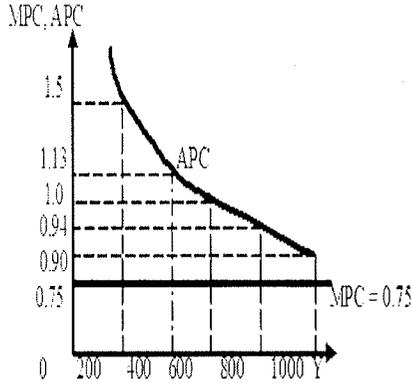
Berdasarkan tabel 1 tersebut digambarkan grafik fungsi konsumsi sebagai berikut :



Dari persoalan tersebut di atas, maka nilai rata-rata hasrat untuk mengkonsumsi atau APC dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

| Tabel 2. Fungsi Konsumsi dan APC a = 150 dan MPC = 0.75 | | | | | |
|--|--------------|----------------------------|---|--------------------------------------|------|
| Titik Dalam Gambar | Pendapatan Y | Perubahan Dalam Pendapatan | Perubahan dalam Konsumsi (0.75 x Y) = 150 | Pengeluaran Konsumsi C = 150 + 0.75Y | APC |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A | 0 | - | - | 150 (=a) | |
| B | 200 | 200 | 150 | 300 | 1.50 |
| C | 400 | 200 | 300 | 450 | 1.13 |
| D | 600 | 200 | 450 | 600 | 1.00 |
| E | 800 | 200 | 600 | 750 | 0.94 |
| F | 1000 | 200 | 750 | 900 | 0.90 |

Gambar 3.3
MPC dan APC untuk Fungsi Konsumsi : $C = 150 + 0.75Y$



3.3 Fungsi Tabungan

Dalam ekonomi makro, pendapatan nasional ataupun pendapatan disposabel dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi, sedangkan sisa dari pendapatan yang tidak dipergunakan untuk konsumsi dialokasikan ke dalam tabungan (Saving = S). Pernyataan tersebut dapat dinyatakan dalam rumusan matematika sebagai berikut :

$$Y = C + S \quad \dots\dots\dots 7)$$

Dimana :

S = Tabungan (Saving)

Jika untuk setiap tambahan pendapatan dialokasikan untuk menambah konsumsi dan tabungan, maka besarnya tambahan tabungan sebagai akibat adanya tambahan pendapatan disebut dengan kecenderungan menabung marginal (marginal propensity to saving = MPS) atau sering

juga disebut dengan hasrat untuk menabung. Secara matematis pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut :

$$\frac{\partial S}{\partial Y} = MPS \quad \dots\dots\dots 8)$$

Sedangkan rasio antara tingkat tabungan dengan pendapatan disebut dengan kecenderungan menabung rata-rata (Average Propensity to saving = APS) yang sering disebut juga dengan rata-rata hasrat menabung. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut :

$$APS = \frac{S}{Y} \quad \dots\dots\dots 9)$$

Jika untuk setiap tambahan pendapatan dialokasikan sebagai tambahan konsumsi dan tambahan tabungan, maka secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\partial Y = \partial C + \partial S \quad \dots\dots\dots 10)$$

Apabila kedua sisi dari persamaan (10) tersebut dibagi dengan perubahan pendapatan (∂Y), maka akan menghasilkan persamaan berikut ;

$$\frac{\partial Y}{\partial Y} = \frac{\partial C}{\partial Y} + \frac{\partial S}{\partial Y}$$

$$1 = MPC + MPS \quad \dots\dots\dots 11)$$

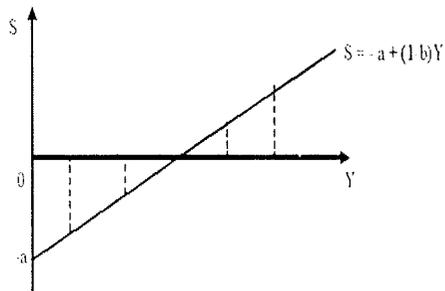
Persamaan (11) menunjukkan bahwa penjumlahan antara MPS dengan MPC adalah satu, sehingga hal ini mengandung makna adanya hubungan yang sangat erat antara fungsi konsumsi dengan fungsi tabungan, dimana hasrat untuk menabung adalah sisa dari hasrat untuk mengkonsumsi.

Dengan demikian fungsi tabungan dapat diturunkan dari fungsi konsumsi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y &= C + S \\
 S &= Y - C \\
 &= Y - (a + bY) \\
 &= Y - a - bY \\
 &= -a + (1 - b)Y \quad \dots\dots\dots 12)
 \end{aligned}$$

Persamaan (12) menunjukkan bahwa tabungan merupakan fungsi dari pendapatan dan hasrat untuk menabung adalah sisa dari hasrat untuk mengkonsumsi atas pendapatan yang dimilikinya. Secara geometrik fungsi tersebut dapat digambarkan dalam suatu grafik berikut :

Gambar 3.4
Fungsi Tabungan



Contoh 3.2:
Merujuk pada contoh 3.1 tentang fungsi konsumsi, maka dapat diketahui fungsi tabungannya sebagai berikut :

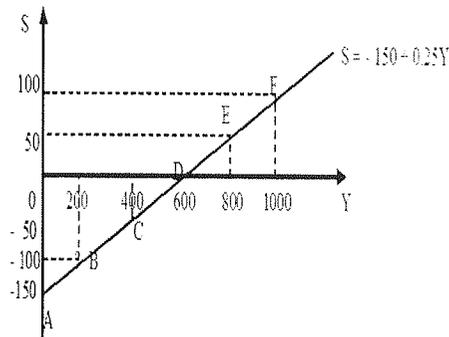
$$\begin{aligned}
 S &= Y - (150 + 0.75Y) \\
 &= Y - 150 - 0.75Y \\
 &= -150 + (1 - 0.75)Y
 \end{aligned}$$

$$= -150 + 0.25 Y$$

Jika diselesaikan dalam bentuk tabel dan grafik, maka dapat ditunjukkan sebagai berikut :

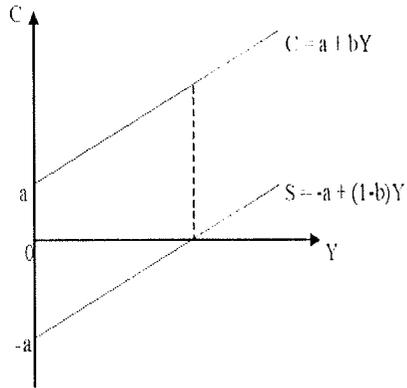
| Tabel 3, Fungsi Tabungan dan APS a = -150 dan MPS = 0.25 | | | | | |
|---|--------------|----------------------------|---|---|--------|
| Titik Dalam Gambar | Pendapatan Y | Perubahan Dalam Pendapatan | Perubahan dalam Tabungan (0.25 x Y) = 50 | Pengeluaran Tabungan S = -150 + 0.25 | APS |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A | 0 | - | - | -150 (=a) | |
| B | 200 | 200 | 50 | -100 | (0.50) |
| C | 400 | 200 | 100 | -50 | (0.13) |
| D | 600 | 200 | 150 | 0 | - |
| E | 800 | 200 | 200 | 50 | 0.06 |
| F | 1000 | 200 | 250 | 100 | 0.10 |

Gambar 3.5
Fungsi Tabungan : $S = -150 + 0.25Y$



Secara geometrik, grafik fungsi tabungan dapat dari diturunkan dari grafik fungsi konsumsi sebagai berikut :

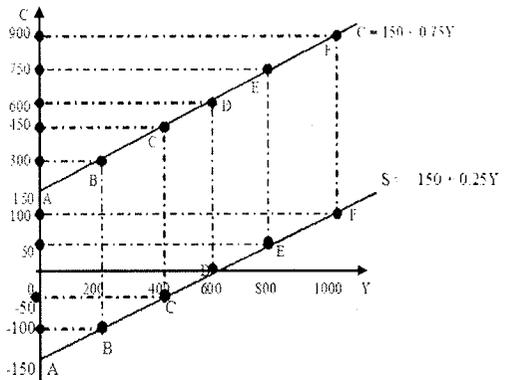
Gambar 3.6
 Grafik Turunan Fungsi Tabungan



Contoh 3.3 :

Berdasarkan contoh 3.1 dan 3.2, grafik turunan dari fungsi konsumsi terhadap fungsi tabungan digambarkan dalam grafik berikut:

Gambar 3.7
 Fungsi konsumsi dan Tabungan



Perubahan dalam Konsumsi dan Tabungan

Perubahan dalam pendapatan disposable akan menyebabkan pergerakan disepanjang fungsi konsumsi dan tabungan. Secara ekonomi terdapat empat faktor eksternal yang dapat menggeser fungsi konsumsi ke atas atau ke bawah. Adapun ke empat faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kekayaan

Apabila nilai kekayaan yang dihimpun meningkat, maka fungsi konsumsi akan cenderung bergeser ke atas dan fungsi tabungan cenderung bergeser ke bawah, karena setiap rumah tangga dapat menjual saham atau harta lainnya untuk mengkonsumsi barang-barangnya lebih banyak pada tingkat pendapatan disposable saat itu.

2) Ekspektasi

Ketidakpastian atau rendahnya ekspektasi atas pendapatan dimasa yang akan datang biasanya mendorong rumah tangga untuk menurunkan konsumsi dan meningkatkan tabungan. Ekspektasi tingginya tingkat harga dimasa yang akan datang akan mendorong tingginya konsumsi saat sekarang dan menurunkan tabungannya.

3) Hutang Rumah Tangga

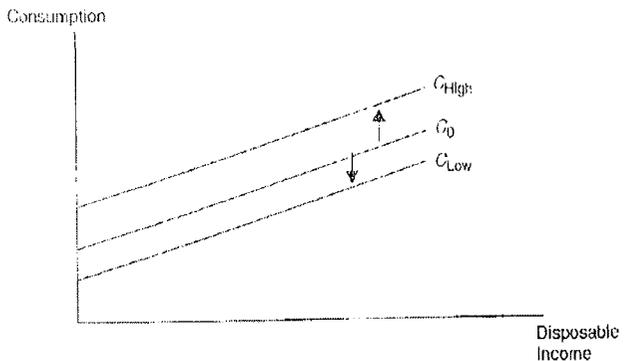
Rumah tangga dapat meningkatkan konsumsi dengan cara meminjam atau hutang. Akan tetapi rumah tangga yang semakin menghimpun hutang, akan semakin membutuhkan pendapatan disposable untuk membayar hutangnya dan dengan demikian akan terjadi penurunan konsumsi.

4) Pajak dan Transfer

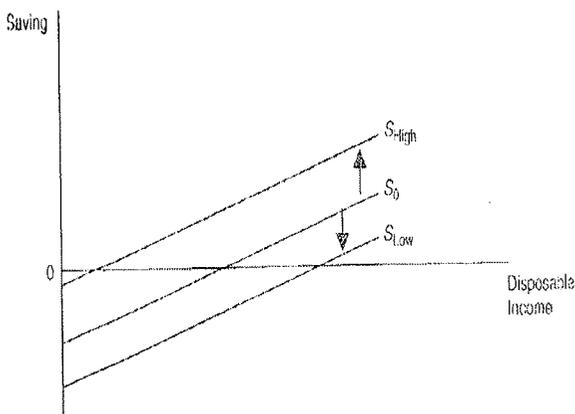
Perubahan dalam pajak mempengaruhi keduanya, konsumsi dan tabungan dalam arah yang sama. Jika pemerintah meningkatkan pajak, maka rumah tangga akan menurunkan konsumsi dan juga tabungan karena sebagian besar pendapatan kotor mereka akan diserahkan kepada pemerintah. Disisi lain, peningkatan transfer payment pemerintah akan meningkatkan keduanya, baik fungsi konsumsi ataupun tabungan. Dalam kasus pajak dan transfer ini fungsi konsumsi dan tabungan akan bergeser dalam arah yang sama.

Pergeseran ke atas dalam fungsi konsumsi menunjukkan bahwa pada semua tingkat pendapatan disposable, konsumsi akan lebih besar (C_{High}). Jika konsumsi lebih besar dari tingkat pendapatan disposibel, tabungan akan lebih rendah (S_{Low}) dan sebaliknya. Kecuali dalam kasus adanya pajak dan transfer seperti dinyatakan di atas. Gambar 3.8 dan 3.9 mengilustrasikan pergeseran secara simultan dalam arah yang berlawanan.

Gambar 3.8
Pergeseran dalam Fungsi Konsumsi



Gambar 3.9
Pergeseran dalam Fungsi Tabungan



Dengan kecualian untuk pajak dan transfer, jika fungsi konsumsi bergeser ke atas, maka fungsi tabungan bergeser ke bawah dan jika fungsi konsumsi bergeser ke bawah maka fungsi tabungan bergeser ke atas. Jika pajak meningkat (atau transfer menurun), keduanya fungsi konsumsi dan tabungan akan bergeser ke bawah dan jika pajak menurun (atau transfer meningkat), keduanya fungsi konsumsi dan tabungan akan bergeser ke atas.

3.4



Fungsi Investasi

Dalam perekonomian, investasi bisa diasumsikan baik sebagai variabel eksogen ataupun variabel endogen. Jika tingkat investasi diasumsikan sebagai variabel eksogen, artinya nilai dari investasi dianggap konstan, maka besar kecilnya tingkat investasi tidak dipengaruhi oleh berbagai faktor lain

yang mempengaruhinya. Secara matematis dinyatakan dalam persamaan berikut :

$$I = I_0 \quad \dots\dots\dots 13)$$

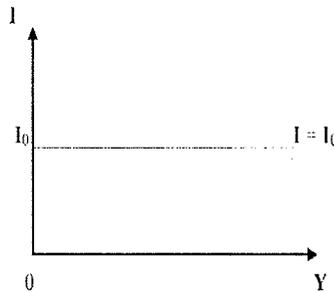
Dimana :

I : Investasi

I_0 : Pengeluaran Investasi otonom

Pengeluaran investasi otonom yaitu bagian dari investasi yang besar kecilnya tidak tergantung pada pendapatan nasional, sehingga jika digambarkan dalam grafik fungsi investasi dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 3.10
Fungsi Investasi



Pada sisi lain, investasi dapat bertindak sebagai variabel endogen sebagaimana kaum klasik yang berpandangan bahwa permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Jika investasi dilambangkan dengan huruf I dan tingkat bunga dilambangkan dengan huruf r , maka secara umum fungsi permintaan akan investasi dapat dinyatakan dalam matematik model sebagai berikut :

$$I = f(r)$$

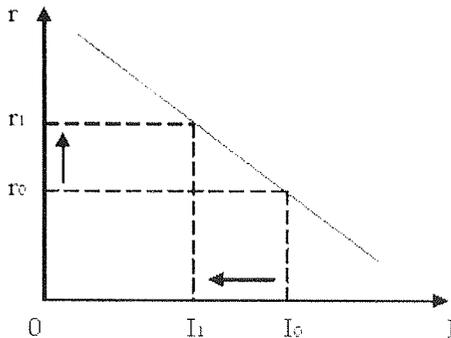
$$I = I_0 - br \dots\dots\dots 14)$$

Dimana :

- I = Investasi
- I_0 = Investasi Otonom
- r = Tingkat bunga
- b = proporsi I terhadap r

Persamaan (14) menyatakan bahwa permintaan akan investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Artinya jika tingkat bunga tinggi, maka investasi akan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena orang akan lebih senang menyimpan uangnya di bank daripada menginvestasikannya, sebab hasil harapan (expected return) yang akan diperoleh dari bunga bank lebih besar daripada hasil harapan yang akan diterima dari penanaman modal, akibatnya permintaan akan investasi berkurang. Tingginya bunga mencerminkan pula mahalnya kredit, sehingga mengurangi gairah investasi dikalangan pengusaha. Hal sebaliknya terjadi jika tingkat bunga rendah, maka investasi akan meningkat.

Gambar 3.11
Fungsi Investasi = $I = f(r)$



Soal dan Latihan



Pertanyaan Untuk Diskusi dan Latihan

1. Coba Saudara diskusikan dan pahami kembali tentang fungsi konsumsi ! Cari data Konsumsi dan PDB selama 10 tahun terakhir, lalu coba cari persamaan fungsi konsumsinya dan gambarkan grafiknya yang menarik serta analisis makna ekonominya! Secara teori bagaimana persamaan fungsi tabungannya.
2. Coba Saudara diskusikan dan pahami kembali tentang fungsi tabungan! Cari data tabungan dan PDB selama 10 tahun terakhir, lalu coba cari persamaan fungsi tabungannya dan gambarkan grafiknya yang menarik serta analisis makna ekonominya!
3. Coba Saudara diskusikan dan pahami kembali tentang fungsi investasi! Cari data tingkat bunga dan Investasi selama 10 tahun terakhir, lalu coba cari persamaan fungsi investasinya dan gambarkan grafiknya yang menarik serta analisis makna ekonominya!

STUDI KASUS

Setiap kelompok coba kumpulkan data tentang PDB, Konsumsi, Investasi, Tabungan, Tingkat bunga dan Pajak selama 10 tahun terakhir. Diskusikan dan interpretasikan data tersebut serta buat hubungan dari setiap data secara parsial.

$$C = f(Y) \implies C = a + bY$$

$$C = f(Yd) \implies C = a + bYd$$

$$I = f(r) \implies I = I_0 - br$$

$$S = f(r) \implies S = S_0 + br$$

$$S = f(Y) \implies S = -a + (1 - b)Y$$

PENDAPATAN NASIONAL KESEIMBANGAN

4

Capaian Pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari bab 4 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung Pendapatan Nasional Keseimbangan.

Dalam bab ini Sdr diharapkan dapat mencapai kompetensi dasar sebagai berikut :

1. Dapat menjelaskan pengertian Pendapatan Nasional Keseimbangan
2. Dapat mengidentifikasi konsep penentuan keseimbangan pendapatan nasional model dua (2) sektor
3. Dapat mendemonstrasikan penentuan Pendapatan Nasional Keseimbangan model dua (2) sektor
4. Dapat menjelaskan dan menganalisis konsep multiplier



Pengertian Pendapatan Nasional

4.1 Keseimbangan



Perekonomian 2 (dua) sektor adalah suatu perekonomian yang diasumsikan hanya terdiri dari sektor rumah tangga (household) dan sektor perusahaan (firm or business). Perekonomian 2 sektor ini disebut juga dengan perekonomian sederhana tertutup. Asumsi lainnya yang perlu diperhatikan dalam keseimbangan pendapatan nasional untuk model 2 sektor adalah :

- 1) Sektor rumah tangga memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, bunga dan laba sebagai balas jasa atas digunakannya faktor produksi. Sifat dari gaji dan upah sebagai variabel eksogen dan tingkat suku bunga dianggap tetap.
- 2) Tingkat pendapatan yang diterima sektor rumah tangga digunakan untuk konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor bisnis.
- 3) Sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi, oleh sektor rumah tangga ditabung di lembaga keuangan.
- 4) Sektor perusahaan dalam menjalankannya investasinya meminjam dari tabungan yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan dari sektor rumah tangga.
- 5) Tidak terdapat sektor pemerintah, artinya dalam sektor ini tidak ada pajak dan atau pengeluaran pemerintah. Pendapatan nasional, pendapatan personal dan pendapatan disposable adalah sama, sehingga $Y^d = Y$
- 6) Perekonomian tertutup, artinya tidak ada transaksi perdagangan internasional (ekspor-impor) dan sektor luar negeri tidak dimasukkan.

Bertitik tolak dari asumsi-asumsi tersebut di atas, keseimbangan pendapatan nasional model dua (2) sektor terjadi dari dua sisi, *sisi pertama* adalah pengeluaran agregat (agregat expenditur, AE) yang terbagi menjadi dua yaitu pengeluaran untuk barang-barang konsumsi (consumption expenditur) dan pengeluaran untuk barang-barang modal (Investasi), sedangkan *sisi kedua*, adalah penerimaan yang diterima oleh sektor rumah tangga (pendapatan) akan dikeluarkan untuk barang-barang konsumsi dan sisanya untuk ditabung. Secara matematis pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut :

$$AD = C + I \quad \dots\dots\dots 1)$$

Dimana :

AD : Agregat Demand (Permintaan Agregat), sisi pengeluaran

C : Pengeluaran Konsumsi Sektor Rumah Tangga

I : Pengeluaran Investasi Sektor Perusahaan

$$Y = C + S \quad \dots\dots\dots 2)$$

Dimana :

Y : Pendapatan, Sisi penerimaan

S : Tabungan (saving) yang dilakukan oleh masyarakat

Dengan menyelesaikan persamaan 1) dan 2) yang menunjukkan bahwa permintaan agregat yang sisi pengeluaran sama dengan pendapatan dari sisi penerimaan agregat, maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} AD &= Y \\ C+I &= C + S \\ I &= S \quad \dots\dots\dots 3) \end{aligned}$$

Persamaan 3) menunjukkan bahwa dalam perekonomian dalam dua sektor, persamaan syarat keseimbangan terpenuhi

pada kondisi dimana output (agregat) barang-barang dan jasa atau pendapatan (AS) adalah sama dengan permintaan agregat (AD). Secara singkat keseimbangan tersebut ditulis sebagai berikut:

$$Y = C + I \quad \dots\dots\dots 4)$$

Sisi kiri dari Persamaan 4) yaitu Y adalah pendapatan nasional atau output riil barang-barang dan jasa, yang menunjukkan sisi penawaran agregat (AS) dari perekonomian dan menyesuaikan dengan pergeseran-pergeseran di dalam permintaan agregat (C + I). Ini berarti bahwa output agregat (aggregate output atau Y) di dalam perekonomian memainkan peranan yang pasif. Sedangkan sisi sebelah kanan dari persamaan (4) menunjukkan sisi permintaan agregat (AD) dari perekonomian. Permintaan agregat di dalam model makro 2 sektor ini diperoleh dengan menambahkan pengeluaran konsumsi oleh sektor rumah tangga (C) dan pengeluaran investasi oleh sektor bisnis (I). Karenanya permintaan agregat (AD) ini memainkan peranan yang aktif di dalam model Keynesian sederhana.

4.2  **Penentuan Keseimbangan Pendapatan Nasional Dua Sektor**

Sebagaimana telah dibahas dalam bagian awal bab ini tentang konsep keseimbangan pendapatan nasional, terdapat dua (2) pendekatan dalam menentukan tingkat pendapatan keseimbangan, yaitu :

- a. Pendekatan Penawara Agregat-Permintaan Agregat
Pendekatan ini didasarkan pada keseimbangan antara output barang-barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu

negara, penawaran agregat (AS) dengan permintaan masyarakat atas barang dan jasa, permintaan agregat (AD), dimana kondisi ini telah ditunjukkan dalam persamaan 4), yaitu :

$$Y = C + I \quad \dots\dots\dots 4)$$

Perhatikan kembali pembahasan pada bab 3 tentang fungsi konsumsi dan investasi.

Dalam bab 3 telah dinyatakan bahwa teori Keynes tentang fungsi konsumsi dinyatakan dalam persamaan (3 bab 3) yaitu :

$$C = a + bY \quad \dots\dots\dots 3 \text{ bab } 3)$$

Sedangkan untuk fungsi Investasi diasumsikan bahwa investasi bersifat eksogen seperti yang dinyatakan dalam persamaan (13 bab 3)

$$I = I_0 \quad \dots\dots\dots 13 \text{ bab } 3)$$

Selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai persamaan 3 dan 13 (bab 3) ke dalam persamaan 4), maka dapat disusun persamaan keseimbangan pendapatan nasional dengan pendekatan AS-AD sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= a + bY + I_0 \\ Y - bY &= a + I_0 \\ (1-b)Y &= a + I_0 \\ Y &= \frac{1}{1-b} (a + I_0) \quad \dots\dots\dots 5) \end{aligned}$$

Contoh :

Merujuk pada contoh 1 dalam bab 3, diketahui fungsi konsumsi yang dinyatakan bahwa $C = 150 + 0.75Y$, jika besarnya investasi pertahun $I = 50$. Diminta :

- 1) Berapa besarnya pendapatan nasional equilibrium (keseimbangan)?
- 2) Berapa besarnya konsumsi equilibrium?
- 3) Bagaimana fungsi savingnya?
- 4) Berapa besarnya saving equilibrium?
- 5) Gambarkan grafiknya keseimbangan pendapatan nasional sebelum dan sesudah ada Investasi

Jawab :

- 1) Besarnya pendapatan nasional equilibrium.

$$Y = C + I$$

$$Y = 150 + 0.75Y + 50$$

$$0.25Y = 200$$

$$Y = 800 \text{ (Besarnya pendapatan nasional equilibrium)}$$

Atau dengan menggunakan persamaan 5) langsung diperoleh nilai yang sama dengan proses sebagai berikut :

$$Y = \frac{1}{1-b}(a + I_0)$$

$$\begin{aligned} Y &= \frac{1}{1-0.75}(150 + 50) \\ &= 800 \end{aligned}$$

- 2) Besarnya konsumsi equilibrium

$$C = 150 + 0.75Y$$

$$= 150 + 0.75(800)$$

$$C = 750 \text{ (Besarnya Konsumsi equilibrium)}$$

- 3) Fungsi Saving

$$S = -a + (1-b)Y \text{ (Formula Fungsi Tabungan)}$$

$$= -150 + (1 - 0.75)Y$$

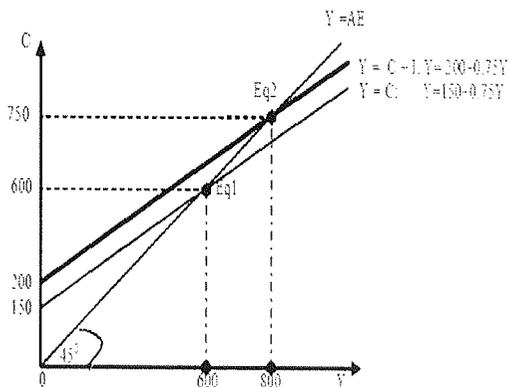
$$= -150 + 0.25Y$$

4) Besarnya saving equilibrium

$$\begin{aligned}
 S &= Y - C && \text{atau} && S &= -150 + 0.25Y \\
 &= 800 - 750 && && &= -150 + 0.25(800) \\
 S^e &= 50; && && &= 50 \\
 (S = I = 50) &&& \text{(Besarnya saving equilibrium)}
 \end{aligned}$$

5) Grafik keseimbangan pendapatan nasional sebelum dan sesudah ada investasi

Gambar 4.1
Keseimbangan Pendapatan Nasional dalam 2 sektor



b. Pendekatan Tabungan – Investasi

Pendekatan Tabungan – Investasi dipergunakan untuk menentukan tingkat pendapatan keseimbangan didasarkan pada persamaan 3) yaitu :

$$I = S \dots\dots\dots 3)$$

Digunakannya pendekatan ini sebagai penentu tingkat keseimbangan dengan asumsi bahwa investasi diinterpretasikan sebagai *planned investment*, artinya jumlah investasi yang dilakukan perusahaan ditujukan atau

direncanakan untuk diinvestasikan dengan nilai $I = I_0$, (Persamaan 13 bab 3) atau disebut juga investasi otonom (autonomous investment), yaitu investasi yang nilainya tidak dipengaruhi oleh nilai pendapatan nasional.

Sedangkan untuk tabungan dengan merujuk pada persamaan 12 bab 3 yaitu dinyatakan bahwa :

$$S = -a + (1 - b)Y \quad \dots\dots\dots 12 \text{ bab 3)}$$

Selanjutnya dengan mensubstitusikan persamaan 12 dan 13 bab 3 ke dalam persamaan 3) bisa diselesaikan dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} I &= S \\ I_0 &= -a + (1 - b)Y \\ I_0 + a &= (1 - b)Y \\ Y &= \frac{1}{1 - b}(a + I_0) \end{aligned}$$

Dalam pendekatan ini pada akhirnya juga sama dengan yang dihasilkan oleh persamaan 5). Merujuk pada contoh di atas, tingkat keseimbangan pendapatan dengan pendekatan ini dapat diselesaikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} I &= S \\ 50 &= -150 + 0.25Y \\ Y &= \frac{50 + 150}{0.25} = 800 \end{aligned}$$

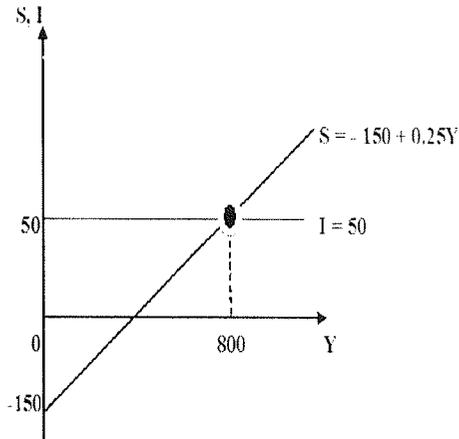
Sedangkan nilai konsumsi keseimbangan dan tabungan keseimbangannya dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} C^e &= 150 + 0.75(800) = 750 \\ S^e &= -150 + 0.25(800) = 50 \end{aligned}$$

Kondisi keseimbangan tercapai pada saat $I=S=50$

Secara grafik, penentuan tingkat pendapatan keseimbangan dengan model ini ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Keseimbangan Pendapatan Nasional dalam 2 sektor



4.3



Multiplier

Perkembangan suatu variabel ekonomi sangat ditentukan oleh perubahan-perubahan dari setiap variabel ekonomi tersebut. Untuk menghitung pengaruh dari perubahan di dalam suatu variabel ekonomi (eksogen) terhadap variabel lainnya (variabel endogen), misalnya besarnya pengaruh dari perubahan investasi terhadap tingkat pendapatan nasional, maka digunakan angka pengganda (multiplier). Multiplier adalah jumlah yang disebabkan oleh adanya peningkatan secara berturut-turut dalam hasil produksi dari adanya peningkatan dalam permintaan (demand) atau dengan kata lain angka pengganda atau multiplier adalah suatu billangan yang

menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya perubahan pada variabel-variabel tertentu dalam perekonomian. Putaran Multiplier merupakan suatu proses penjumlahan yang konvergens dan bersifat geometric series yang secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$1 + c_1 + c_1^2 + c_1^3 + \dots = \frac{1}{(1 - c_1)} \dots \dots \dots \quad (5)$$

Persamaan (6) merupakan proses putaran penjumlahan yang menghasilkan nilai multiplier pada sisi sebelah kanan. Contoh jika $c = 0,6$ maka proses multiplier hingga n putaran akan menghasilkan nilai $1 + .6 + .36 + .216 + \dots = 1/(1-.6) = 2.5$.

Kembali ke persamaan (5), keseimbangan pendapatan nasional untuk dua sektor, yaitu :

$$Y_0 = \frac{1}{1 - b} (a + I_0)$$

Berdasarkan persamaan (5), jika dalam perekonomian terjadi pertambahan pengeluaran Investasi menjadi I_1 , maka pendapatan nasional (Y_0) juga akan bertambah sebesar Y_1 , yang secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_1 = \frac{1}{1 - b} (a + I_1) \dots \dots \dots \quad (7)$$

Untuk memperoleh besarnya perubahan di dalam pendapatan nasional, kurangi persamaan (7) dengan persamaan (5), sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y_1 &= \frac{1}{1-b}(a + I_1) \\
 Y_0 &= \frac{1}{1-b}(a + I_0) \\
 \hline
 -Y_1 - Y_0 &= \frac{1}{1-b}(I_1 - I_0) \\
 \Delta Y &= \frac{1}{1-b} \Delta I \\
 \frac{\Delta Y}{\Delta I} &= \frac{1}{1-b} \\
 kI = \frac{\Delta Y}{\Delta I} &= \frac{1}{1-b} \dots\dots\dots 8)
 \end{aligned}$$

Persamaan (8) menunjukkan bahwa besarnya perubahan pendapatan sebagai akibat dari perubahan di dalam pengeluaran investasi adalah sama dengan besarnya perubahan di dalam pengeluaran investasi tersebut dikali dengan pengganda dari pengeluaran investasi itu atau $\Delta Y = k_I \times \Delta I$. Dari persamaan tersebut juga tampak bahwa besarnya pengganda pengeluaran pemerintah adalah tergantung pada b (*marginal propensity to consume* atau *MPC*). Dengan demikian, pengganda pengeluaran investasi, $k_I = 1/(1 - b)$ adalah merupakan kebalikan dari kecenderungan menabung marjinal (*marginal propensity to save* atau *MPS*).

Contoh :

Merujuk pada contoh sebelumnya, jika besarnya investasi pertahun $I_0 = 50$ berubah menjadi $I_1 = 60$, maka

- a. Berapakah besarnya multiplier pengeluaran investasi
- a. Berapakah besarnya perubahan Pendapatan Nasional

Jawab :

- a. $K_I = \frac{1}{1 - 0,75} = 4$
- b. $\Delta Y = 4 \times 10 = 40$

Artinya perubahan pendapatan sebagai akibat dari perubahan di dalam pengeluaran investasi adalah sebesar 40 atau 4 kali dari perubahan investasi itu sendiri.

Soal dan
Latihan



Pertanyaan Untuk Diskusi dan
Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional keseimbangan ?
2. Tunjukkan secara grafik dan matematis bagaimana tingkat pendapatan nasional keseimbangan ditentukan, baik dengan pendekatan $AS = AD$ maupun dengan pendekatan injeksi = kebocoran dalam model makro 2 sektor
3. Diketahui : $C = 200 + 0,9 Y_d$, $I = 300$, dan $G = T = 0$
Hitunglah :
 - a) Pendapatan, konsumsi dan tabungan keseimbangan !
 - b) Jika pendapatan full - employment (Y_n) = 4.000, kesenjangan apakah yang terjadi (inflationary atau deflationary gap) ?
 - c) Gambarkan grafik butir a) diatas
4. Apabila pada soal no. 3 di atas Investasi meningkat menjadi 350 Berapa besarnya :
 - a) Tingkat pendapatan, konsumsi dan tabungan keseimbangan yang baru
 - b) Andaikan Y full employment = 5.000, berapa besar perubahan Investasi yang diperlukan untuk tercapainya tingkat pendapatan full-employment tersebut ?
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan multiplier dan bagaimana proses multiplier terjadi?

6. Atas dasar no 4, Berapakah besarnya multiplier pengeluaran investasi dan besarnya perubahan Pendapatan Nasional

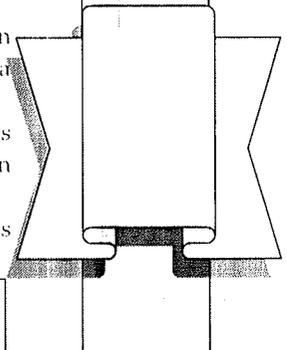
PERANAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO MELALUI KEBIJAKAN FISKAL

Capaian Pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari bab 5 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung Pendapatan Nasional Keseimbangan.

Dalam bab ini Sdr diharapkan dapat mencapai kompetensi dasar sebagai berikut :

1. Dapat mengidentifikasi konsep penentuan keseimbangan pendapatan nasional model tiga (3) sektor
2. Dapat mendemonstrasikan penentuan Pendapatan Nasional Keseimbangan model tiga (3) sektor
3. Dapat Menjelaskan Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
4. Dapat menjelaskan dan menganalisis kebijakan fiskal dalam pendapatan nasional
5. Dapat menjelaskan dan menganalisis multiplier kebijakan fiskal

5



5.1



Model Perekonomian Tiga Sektor

Peranan pemerintah dalam perekonomian secara makro dapat dianalisis melalui kebijakan fiskal. Untuk memudahkan analisis bagaimana peranan pemerintah tersebut dapat dijelaskan dengan model perekonomian tiga (3) sektor yaitu suatu perekonomian yang diasumsikan hanya terdiri dari sektor rumah tangga (household) dan sektor perusahaan (firm or business) dan sektor pemerintah. Peranan pemerintah tersebut dalam pengembangan model diwujudkan dalam variabel pajak (T) yang mempengaruhi konsumsi, dimana tinggi rendahnya pajak akan mempengaruhi tingkat konsumsi (C) dan variabel pengeluaran pemerintah (G) sebagai variabel eksogen.

Perekonomian 3 sektor ini disebut juga dengan perekonomian sederhana tertutup. Pada dasarnya mekanisme keseimbangan pendapatan nasional dua sektor atau 3 sektor sama. Artinya asumsi-asumsi yang muncul dalam dua sektor itu juga akan menjadi asumsi bagi perekonomian tiga (3) sektor, namun dalam perekonomian tiga (3) sektor ini telah memasukkan sektor pemerintah, sehingga dalam perekonomian 3 (tiga) sektor, pengeluaran agregat (agregat expenditure, AE) terdiri dari (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (C), (2) Pengeluaran Investasi (I) dan (3) pengeluaran konsumsi pemerintah (G).

Masuknya sektor pemerintah ke dalam model ini, sebagaimana dinyatakan oleh Keynes, bahwa untuk mencapai posisi keseimbangan pada kondisi full employment sehingga dapat memecahkan masalah pengangguran yang terjadi di dalam perekonomian maka penggunaan kebijakan fiskal yang

ekspansif perlu dilakukan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan tingkat pajak (T). Oleh karena itu dalam model perekonomian 3 sektor terdapat sektor pemerintah yang membeli barang-barang dan jasa di dalam perekonomian dan pendapatan disposable adalah sama dengan pendapatan nasional dikurangi pajak ($Y^d = Y - T$).

Model keseimbangan pendapatan nasional tiga sektor dibentuk melalui persamaan-persamaan berikut :

$$AD = C + I + G \quad \dots\dots\dots 1)$$

Dimana :

AD : Agregat Demand (Permintaan Agregat), sisi pengeluaran

C : Pengeluaran Konsumsi Sektor Rumah Tangga

I : Pengeluaran Investasi Sektor Perusahaan

G : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Persamaan 1) menunjukkan persamaan pada sisi permintaan agregat (Aggregat Demand).

Dengan asumsi tidak ada transfer pemerintah (tr), maka besarnya pendapatan yang siap untuk dibelanjakan (disposable income, Y^d) merupakan nilai pendapatan setelah dikurangi oleh tingkat pajak (Tax,T) yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu besarnya pendapatan disposable adalah sebagai berikut :

$$Y^d = Y - T$$

$$Y = Y^d + T \quad \dots\dots\dots 2)$$

Persamaan 2) menunjukkan pendapatan setelah dimasukkan faktor pajak sebagai salah satu kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana pendapatan disposable tersebut digunakan untuk konsumsi dan sisanya untuk ditabung. Berdasarkan hal tersebut, maka persamaan pendapatan disposable dapat dinyatakan :

$$Y^d = C + S \quad \dots\dots\dots 3)$$

Jika persamaan 3) disubstitusikan ke dalam persamaan 2) maka tingkat pendapatan nasional adalah sebagai berikut :

$$Y = C + S + T \quad \dots\dots\dots 4)$$

Dimana :

Y : Pendapatan Nasional, Sisi penerimaan

T : Pajak

Dengan menyelesaikan persamaan 1) dan 4) yang menunjukkan bahwa permintaan agregat yang sisi pengeluaran sama dengan pendapatan dari sisi penerimaan agregat, maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} AD &= Y \\ C + I + G &= C + S + T \\ I + G &= S + T \quad \dots\dots\dots 5) \end{aligned}$$

Persamaan 5) menunjukkan bahwa dalam perekonomian tiga sektor, persamaan syarat keseimbangan terpenuhi pada kondisi dimana output (agregat) barang-barang dan jasa atau pendapatan (AS) adalah sama dengan permintaan agregat (AD). Secara singkat keseimbangan tersebut ditulis sebagai berikut:

$$Y = C + I + G \quad \dots\dots\dots 6)$$

Sisi kiri dari Persamaan 6) yaitu Y adalah pendapatan nasional atau output riil barang-barang dan jasa, yang menunjukkan sisi penawaran agregat (AS) dan sisi kanan menunjukkan permintaan agregat (AD) dari perekonomian.

Fungsi Konsumsi dan Fungsi Tabungan dalam model 3 sektor

Perhatikan kembali fungsi konsumsi yang dibahas pada bab 3, dimana fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan 3 bab 3), yaitu

$$C = a + bY \quad \dots\dots\dots 3 \text{ bab 3)}$$

Jika untuk setiap pendapatan yang diperoleh dikenakan pajak nominal, maka pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau pendapatan disposabel (disposable income = Y_d) dapat dinyatakan sebagai :

$$Y_d = Y - T \quad \dots\dots\dots 7)$$

Berdasarkan persamaan (7) maka fungsi konsumsi menurut Keynes pada persamaan 3 bab 3) akan berbentuk dalam persamaan berikut :

$$C = a + bY_d \quad \dots\dots\dots 8)$$

Persamaan (8) menunjukkan bahwa konsumsi akan sangat tergantung kepada pendapatan disposabel, yang jika tingkat pajaknya nominal, maka konsumsi otonomous akan lebih kecil dari sebelumnya, yang secara matematis dapat diselesaikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} C &= a + bY_d \\ &= a + b(Y - T) \\ &= a + bY - bT \\ &= a - bT + bY \quad \dots\dots\dots 9) \end{aligned}$$

Persamaan (9) menunjukkan bahwa konsumsi otonomous menjadi lebih kecil dari sebelumnya (persamaan 3 bab 3) yaitu $a - bT$ dan pajak nominal tidak mengubah nilai MPC.

Jika untuk setiap pendapatan yang diperoleh dikenakan pajak proporsional (t), artinya besarnya pajak tergantung kepada pendapatannya, maka pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau pendapatan disposabel (disposable income = Y_d) dapat dinyatakan sebagai :

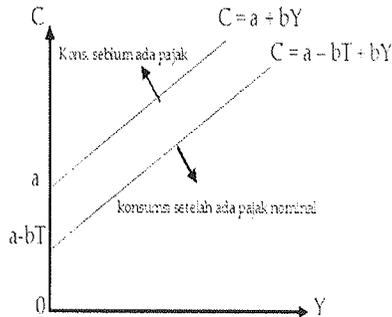
$$Y_d = Y - tY = Y(1 - t) \dots\dots\dots 10)$$

Berdasarkan persamaan (10) maka fungsi konsumsi menurut Keynes (persamaan 3 bab 3) akan berbentuk dalam persamaan berikut :

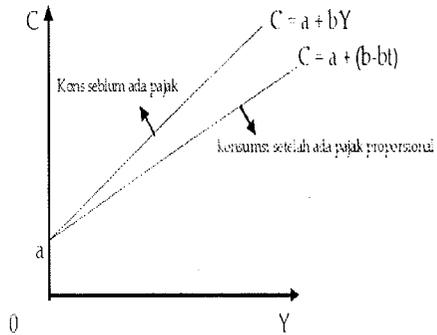
$$\begin{aligned} C &= a + bY_d \\ &= a + b[Y(1 - t)] \\ &= a + bY - btY \\ &= a + (b - bt)Y \dots\dots\dots 11) \end{aligned}$$

Persamaan (11) menunjukkan fungsi konsumsi dengan adanya pajak proporsional menyebabkan MPC menjadi $(b - bt)$ atau lebih kecil dari bt .

Gambar 5.1
Fungsi Konsumsi dengan $C = a + bY_d$ dan tingkat pajak nominal



Gambar 5.2
Fungsi Konsumsi dengan $C = a + bY$ dan tingkat pajak proporsional

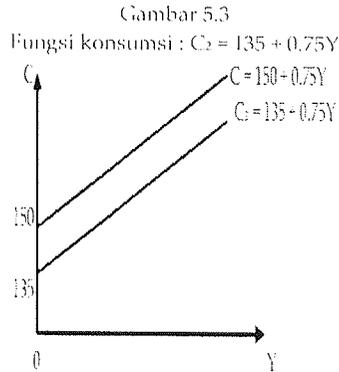


Contoh 5.1 :

Merujuk pada contoh 3.1, jika terhadap fungsi konsumsi tersebut terdapat pajak nominal atas pendapatan sebesar 20, maka pengaruhnya terhadap konsumsi ditunjukkan dalam persamaan berikut :

$$\begin{aligned}
 C_2 &= 150 + 0.75(Y - 20) \\
 &= 150 + 0.75Y - 15 \\
 &= 135 + 0.75Y
 \end{aligned}$$

| Tabel 4. Fungsi Konsumsi Setelah ada pajak nominal $a = 135$ dan $MPC = 0.75$ | | | | |
|--|--------------|----------------------------|---|---|
| Titik Dalam Gambar | Pendapatan Y | Perubahan Dalam Pendapatan | Perubahan dalam Konsumsi $(0.75 \times Y) = 150$ | Pengeluaran Konsumsi $C = 135 + 0.75Y$ |
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | 0 | - | - | 135 (=a) |
| B | 200 | 200 | 150 | 285 |
| C | 400 | 200 | 300 | 435 |
| D | 600 | 200 | 450 | 585 |
| E | 800 | 200 | 600 | 735 |
| F | 1000 | 200 | 750 | 885 |

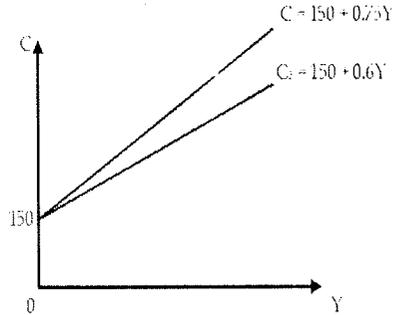


Jika terhadap fungsi konsumsi tersebut terdapat pajak proporsional atas pendapatan sebesar 20%, maka pengaruhnya terhadap konsumsi ditunjukkan dalam persamaan berikut :

$$\begin{aligned}
 C &= 150 + 0.75(1 - 0.20)Y \\
 &= 150 + 0.75(0.80)Y \\
 &= 150 + 0.6Y
 \end{aligned}$$

| Tabel 5. Fungsi Konsumsi Setelah ada pajak proporsional a = 150 dan MPC = 0.6 | | | | |
|--|--------------|----------------------------|--|-------------------------------------|
| Titik Dalam Gambar | Pendapatan Y | Perubahan Dalam Pendapatan | Perubahan dalam Konsumsi (0.6 x Y) = 120 | Pengeluaran Konsumsi C = 150 + 0.6Y |
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | 0 | - | - | 150 (=a) |
| B | 200 | 200 | 120 | 270 |
| C | 400 | 200 | 240 | 390 |
| D | 600 | 200 | 360 | 510 |
| E | 800 | 200 | 480 | 630 |
| F | 1000 | 200 | 600 | 750 |

Gambar 5.4
Fungsi konsumsi : $C = 150 + 0.6Y$



Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa fungsi tabungan (saving function) adalah fungsi yang menghubungkan tingkat tabungan (S) dengan tingkat pendapatan disposable (Y^d). Pendapatan disposable digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi (C) dan sisanya untuk ditabung (S), sehingga ;

$$Y^d = C + S$$

Dengan dasar pada perilaku fungsi konsumsi dalam model 3 sektor, maka fungsi tabungan dihasilkan sebagai berikut :

- a. Untuk tingkat pajak nominal, maka $Y^d = Y - T$ akan membentuk fungsi tabungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 S &= Y^d - C \\
 &= Y^d - (a + bY^d) \\
 &= -a + Y^d - bY^d \\
 &= -a + (1 - b)Y^d \\
 &= -a + (1 - b)(Y - T) \dots\dots\dots 12)
 \end{aligned}$$

- b. Untuk tingkat pajak proporsional, maka $Y^d = Y - tY$ akan membentuk fungsi tabungan sebagai berikut :

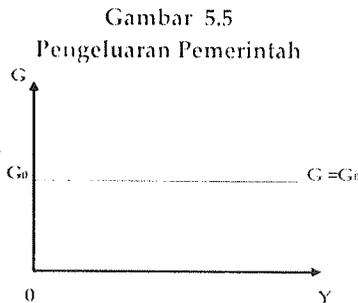
$$\begin{aligned}
 S &= Y^d - C \\
 &= -a + (1 - b)Y^d \\
 &= -a + (1 - b) [Y - tY] \\
 &= -a + (1 - b) [(1 - t)Y] \dots\dots\dots 13)
 \end{aligned}$$

Pengeluaran Pemerintah dan Pajak

Pengeluaran pemerintah (government expenditure,G) diasumsikan sebagai variabel eksogen, artinya nilai pengeluaran pemerintah ditentukan oleh faktor di luar model, dan fungsi pengeluaran pemerintah dapat ditulis sebagai berikut :

$$G = G_0 \dots\dots\dots 14)$$

Persamaan 14) menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah konstan sampai ada tindakan dari pemerintah untuk mengubahnya. Besarnya pengeluaran pemerintah tidak tergantung pada penapatan (Y), dan secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:



Sedangkan untuk tingkat pajak, dapat diasumsi sebagai variabel eksogen dan juga variabel endogen. Jika diasumsikan

sebagai variabel eksogen, maka perilaku pajak sama dengan pengeluaran pemerintah tidak ditentukan oleh pendapatan, sehingga dapat ditulis sebagai berikut :

$$T = T_0 \dots\dots\dots 15)$$

Persamaan 15) menunjukkan bahwa tingkat pajak konstan dalam arti tingkat pajak yang ditetapkan adalah tingkat pajak nominal sehingga tidak tergantung pada pendapatan (Y).

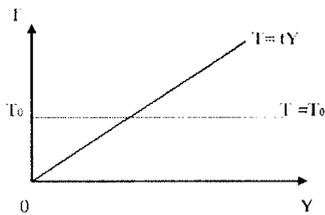
Jika diasumsikan bahwa pajak ini sebagai variabel endogen, artinya besarnya pajak ditentukan proporsional dengan pendapatan (tY), maka pajak dapat ditulis :

$$T = tY \dots\dots\dots 16)$$

Persamaan 16) memberikan implikasi bahwa tinggi rendahnya pajak secara proporsional sangat tergantung kepada tingkat pendapatan (Y).

Secara grafik dapat fungsi pajak ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.6
Pajak



5.2 Penentuan Keseimbangan Pendapatan Nasional dalam Model Tiga Sektor

Konsep penentuan keseimbangan pendapatan nasional tiga sektor pada dasarnya sama dengan penentuan keseimbangan nasional di dua sektor, yaitu dapat dilakukan dengan pendekatan penawaran agregat-permintaan agregat dan pendekatan tabungan-investasi. Di dalam membangun model makroekonomi 3 sektor ini diperlukan enam persamaan struktural berikut :

$$\begin{aligned}
 Y &= C + I + G && \dots\dots\dots 6) \\
 C &= a + bY^d && \dots\dots\dots 8) \\
 Y^d &= Y - T && \dots\dots\dots 7) \\
 I &= I_0 && \dots\dots\dots 13 \text{ bab 3)} \\
 G &= G_0 && \dots\dots\dots 14) \\
 T &= T_0 && \dots\dots\dots 15)
 \end{aligned}$$

a. Pendekatan Penawaran Agregat (AS) = Permintaan Agregat (AD)

Dalam model makroekonomi tiga sektor, keseimbangan pendapatan mensyaratkan bahwa nilai output total barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh perekonomian harus sama dengan permintaan agregat, sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan 6), yaitu :

$$Y = C + I + G \dots\dots\dots 6)$$

Selanjutnya substitusi nilai-nilai C persamaan (8), I persamaan (13 bab 3) dan G persamaan (14) dan T persamaan (15) tersebut ke dalam syarat keseimbangan (6), maka akan diperoleh tingkat pendapatan nasional keseimbangan sebagai berikut ;

$$Y = a + bY_d + I_0 + G_0$$

$$Y = a + b(Y - T) + I_0 + G_0$$

$$Y = a + b(Y - T_0) + I_0 + G_0$$

Selanjutnya dengan menyederhanakan lebih lanjut menjadi ;

$$Y = \frac{1}{1-b} (a + I_0 + G_0 - bT_0) \dots\dots\dots 17)$$

Contoh 5.2 :

Melanjutkan contoh 5.1, fungsi konsumsi $C = 150 + 0.75Y^d$ dan $I = 50$, selanjutnya jika dimasukkan sektor pemerintah dengan $G = 30$ dan $T = 20$, maka diminta :

- 1) Berapa besarnya pendapatan nasional equilibrium (keseimbangan)?
- 2) Berapa besarnya konsumsi equilibrium?
- 3) Berapa besarnya tabungan nasional equilibrium?
- 4) Gambarkan grafiknya keseimbangan pendapatan nasional?

Jawab :

- 1) Besarnya pendapatan nasional equilibrium.

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 150 + 0.75Y + 50 + 30$$

$$Y = 150 + 0.75(Y - 20) + 50 + 30$$

$$Y = 150 + 0.75Y - 15 + 50 + 30$$

$$0.25Y = 215$$

$$Y^e = 860 \text{ (Besarnya pendapatan nasional equilibrium)}$$

Atau dengan menggunakan persamaan 17) langsung diperoleh nilai yang sama dengan proses sebagai berikut :

$$Y = \frac{1}{1-b}(a + I_0 + G_0 - bT_0)$$

$$Y = \frac{1}{1-0.75}[150 - (0.75 \times 20) + 50 + 30]$$

$$= 860$$

2) Besarnya konsumsi equilibrium

$$C = 150 + 0.75Y^d$$

$$= 150 + 0.75(Y-T)$$

$$= 150 + 0.75(860 - 20)$$

$$C^e = 780 \text{ (Besarnya Konsumsi equilibrium)}$$

3) Besarnya tabungan equilibrium

$$S = -a - bT + (1-b)Y \quad \text{atau } S = Y - C - G$$

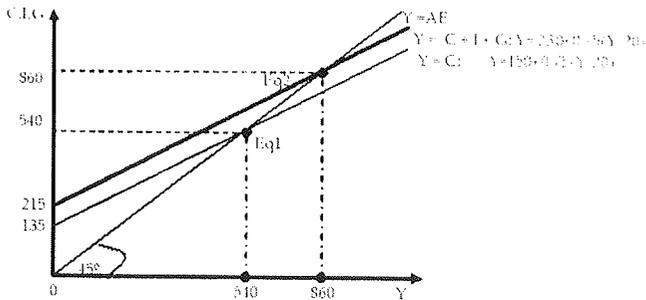
$$= -150 - (0.75)(20) + (1 - 0.75)(860) = 860 - 780 - 30$$

$$S^e = 50 \quad S^e = 50$$

$$(S = 1 = 50) \text{ (Besarnya saving equilibrium)}$$

5) Grafik keseimbangan pendapatan nasional sebelum dan sesudah ada investasi

Gambar 5.7
Keseimbangan Pendapatan Nasional dalam 3 sektor



b. Pendekatan Tabungan + Pajak = Investasi + Pengeluaran Pemerintah

Pendekatan Tabungan – Investasi dipergunakan untuk menentukan tingkat pendapatan keseimbangan berdasarkan pada persamaan 5) yaitu:

$$I + G = S + T \dots\dots\dots 5)$$

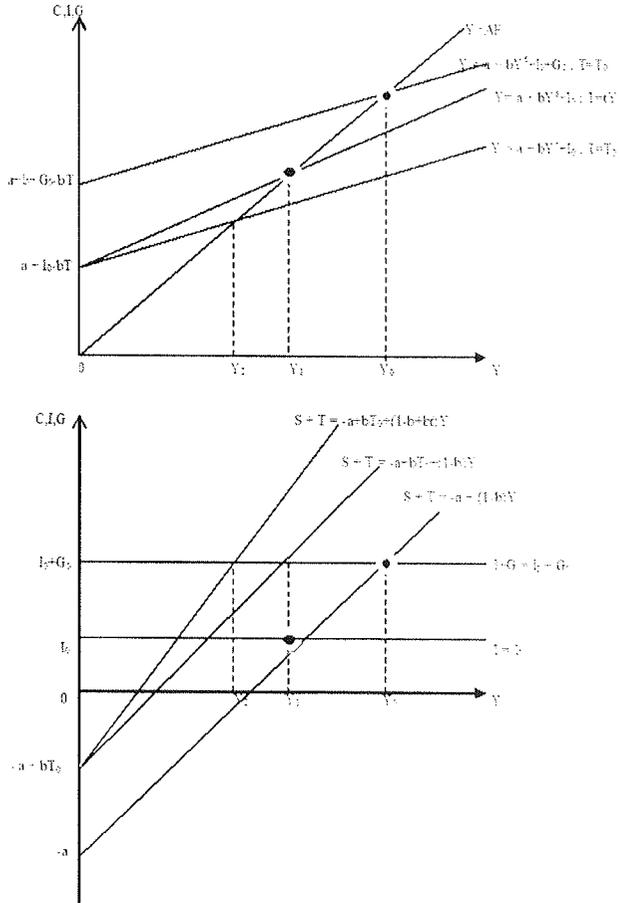
Dengan mensubstitusikan nilai-nilai peubah S, T, I dan G ke dalam syarat keseimbangan (5) tersebut akan diperoleh formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} I_0 + G_0 &= -a + (1 - b)Y_d + T_0 \\ I_0 + G_0 &= -a + (1 - b)(Y - T_0) + T_0 \\ &= -a + (1 - b)Y - (1 - b)T_0 + T_0 \\ &= -a + (1 - b)Y - T_0 + bT_0 + T_0 \\ &= -a + (1 - b)Y + bT_0 \\ (1 - b)Y &= a + I_0 + G_0 - bT_0 \\ Y &= \frac{1}{1 - b}(a + I_0 + G_0 - bT_0) \dots\dots\dots 18) \end{aligned}$$

Formula tersebut sama seperti pada persamaan (17) di atas.

Penentuan tingkat pendapatan keseimbangan di dalam model makro tiga sektor dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar berikut:

Gambar 5.8
Keseimbangan Pendapatan Nasional 3 sektor



Gambar 5.8 menunjukkan bahwa tingkat pendapatan keseimbangan sebelum ada pajak adalah sebesar Y_0 yang tercapai pada saat $S = I + G$, dan setelah

ada pajak, fungsi S akan bergeser ke kiri atas menjadi S' dan mengakibatkan pendapatan keseimbangan yang semula sebesar Y_0 bergeser ke kiri menjadi Y_1 yang ditentukan oleh perpotongan antara kurva $S' + T$ dan kurva $I + G$. Tingkat pendapatan keseimbangan setelah ada pajak lebih kecil daripada tingkat pendapatan keseimbangan sebelum pajak ($Y_1 < Y_0$)

5.3 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

5.3.1 Pengertian Dan Ruang Lingkup APBN

Merujuk pada pasal 1 angka 7, UU No. 17/2003, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pasal 12 UU No 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara, APBN dalam satu tahun anggaran meliputi (a) Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan; (b) Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan dan (c) Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sebagaimana ditekankan dalam Bagian Penjelasan UU No. 17/2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil (result) berupa outcome atau setidaknya output dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai alat manajemen, sistem

penganggaran selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi program pemerintah. Sedangkan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Merujuk Pasal 3 Ayat (4) UU No. 17/2003, APBN mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi otorisasi
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
- 2) Fungsi perencanaan
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan
Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- 4) Fungsi alokasi
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Selain itu dalam fungsi ini penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan taman umum.
- 5) Fungsi distribusi
Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selain itu dalam fungsi ini pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan

umum, tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dan dana pensiun.

6) Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selain itu dalam fungsi ini dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang di terapkan. Jika pendapatan dipakai sesuai dengan yang di terapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai stabilisator

5.3.2 Struktur Dan Susunan APBN

Struktur dan susunan APBN Sejak tahun 1999 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena disusun berdasarkan prinsip anggaran tidak seimbangan (anggaran defisit), dimana sumber penerimaan dan sumber pembiayaan dipisahkan dengan tegas pada pos pos yang berbeda. Anggaran defisit lazim digunakan oleh negara yang mengacu pada Government Financial Statistik (GFS) seperti Jepang. Dalam APBN sebelumnya, pos untuk menutup defisit berasal dari utang luar negeri (disebut penerimaan pembangunan) yang dibukukan pada pos penerimaan. Dalam APBN tahun 1999, utang luar negeri dimasukkan pada pos pembiayaan defisit. Atas dasar tersebut Sejak Tahun 2000, Indonesia telah menguba komposisi APBN dari T-account menjadi I-account sesuai dengan standar statistik keuangan pemerintah, Government Finance Statistics (GFS), sehingga struktur APBN terdiri dari :

1) Pendapatan Negara dan Hibah.

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya.

2) Belanja Negara

Belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang. Sebelum diundangkannya UU No. 17/2003, anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. UU No. 17/2003 mengintrodusing unified budget sehingga tidak lagi ada perbedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Sementara itu, dana otonomi khusus dialokasikan untuk provinsi Daerah Istimewa Aceh dan provinsi Papua.

3) Defisit dan Surplus

Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit; sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.

Sejak Tahun 2000, Indonesia menerapkan anggaran defisit menggantikan anggaran berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun. Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu: keseimbangan primer (primary balance) dan keseimbangan

umum (overall balance). Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga. Keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.

4) Pembiayaan.

Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah: pembiayaan dalam negeri (perbankan dan non perbankan) serta pembiayaan luar negeri (netto) yang merupakan selisih antara penarikan utang luar negeri (bruto) dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Contoh struktur APBN Indonesia :

| URAIAN (triliun rupiah) | 2014 | 2015 |
|---|----------------|----------------|
| | APBNP | RAPBN |
| A. PENDAPATAN NEGARA | 1.636,4 | 1.762,3 |
| I. PENDAPATAN DALAM NEGERI | 1.633,1 | 1.758,9 |
| 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN | 1.240,1 | 1.270,8 |
| 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | 392,9 | 388,0 |
| II. PENERIMAAN HIBAH | 2,3 | 3,4 |
| B. BELANJA NEGARA | 1.876,9 | 2.019,9 |
| I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT | 1.280,4 | 1.379,9 |
| 1. Belanja K/L | 802,3 | 800,6 |
| 2. Belanja Non K/L | 478,1 | 579,3 |
| II. TRANSFER KE DAERAH DAN DAH DE SA | 596,5 | 640,0 |
| 1. Transfer ke Daerah | 593,5 | 630,9 |
| 2. Dana Desa | 0,0 | 9,1 |
| C. KE SEIMBANGAN PRIMER | (106,0) | (103,5) |
| D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN | (241,5) | (257,6) |
| <i>↳ Defisit terhadap PDB</i> | <i>(2,40)</i> | <i>(2,32)</i> |
| E. PEMBIAYAAN (I + II) | 241,5 | 257,6 |
| I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI | 254,9 | 281,4 |
| II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) | (13,4) | (23,8) |

5.3.3 Prinsip-Prinsip Dalam APBN

Sejak orde baru mulai membangun, APBN Indonesia disusun atas dasar tiga prinsip, yaitu prinsip anggaran berimbang (balance budget), prinsip anggaran dinamis dan prinsip anggaran fungsional. Namun sejak tahun 1999 APBN

Indonesia tidak lagi mempergunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun APBN, namun disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit.

1) Prinsip Anggaran Defisit

Prinsip anggaran defisit berbeda dengan prinsip anggaran berimbang. Bedanya adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan :

- a. Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan melainkan sebagai sumber pembiayaan.
- b. Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN + sumber pembiayaan LN (bersih)

Sebagai perbandingan dapat diringkas sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| <p>Anggaran Defisit $PNH - BN = DA$ $DA = PbDN + PbLN$ $PbDN = PkDN + Non-Pk DN$ $PbLN = PPLN - PCPULN$</p> | <p>Anggaran Berimbang $PDN - PR = TP$ $DAP = AP - TP$</p> |
| <p>Keterangan : PNH = pendapatan negara dan hibah BN = belanja negara DA = defisit Anggaran PbDN= pembiayaan DN PkDN= Perbankan DN Non-PkDN = Non-Perbankan DN PbLN = Pembiayaan LN PPLN = penerimaan pinjaman LN PCPULN = pembayaran cicilan pokok Utang luar Negeri</p> | <p>Keterangan : PDN = Pendapatan DN PR = Pengeluaran Rutin TP = Tabungan Pemerintah DAP = Defisit Anggaran Pembangunan AP = Anggaran Pembangunan BLN = Bantuan Luar Negeri</p> |

2) Prinsip Anggaran Dinamis

Dalam prinsip anggaran dinamis, terdapat anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif.

- a) Anggaran bersifat dinamis absolut apabila Tabungan Pemerintah (TP) dari tahun ke tahun terus meningkat.
- b) Anggaran bersifat dinamis relatif apabila prosentasi kenaikan TP(ATP) terus meningkat atau prosentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun.

Anggaran dinamis relatif dapat dihitung dengan cara :

(1) Prosentase Perubahan TP (ΔTP)

$$\Delta TP = \frac{TP_t - TP_{t-1}}{TP_{t-1}} \times 100\%$$

(2) Prosentase Ketergantungan Pembiayaan

$$Bi = \frac{BLN}{DP} \times 100\%$$

Dimana :

TP_t = Tabungan Pemerintah tahun ini

TP_{t-1} = Tabungan Pemerintah tahun sebelumnya

Bi = Tingkat Ketergantungan pembiayaan dari bantuan Luar Negeri

3) Prinsip Anggaran Fungsional

Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan/ pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Prinsip ini sesuai dengan azas "bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap" dalam pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan bantuan / pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka makin besar fungsionalitas anggaran. Tolak ukur kuantitatif untuk menentukan sampai seberapa jauh makna kata "sebagai pelengkap" misalnya :

- a) Bila nilai Bi : > 50 % berarti bantuan/pinjaman luar negeri sebagai sumber daya utama.
- b) Bila nilai Bi : 20%-50% berarti bantuan/pinjaman luar negeri sebagai sumber dana penting
- c) Bila nilai Bi : < 20% berarti bantuan/pinjaman luar negeri sebagai sumber dana pelengkap

5.4



Kebijakan Fiskal dan Pendapatan Nasional Keseimbangan

5.4.1 Konsep Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara dengan cara menaikkan atau menurunkan pengeluaran pemerintah dan pajak. Kebijakan Fiskal sering disebut juga “politik fiskal” atau “fiscal policy” yang biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja Negara terdiri dari penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “government expenditure” dan “government transfer”, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak memperbesar atau memperkecil “government expenditure” dan atau memperbesar atau memperkecil “government transfer” yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang menjadi instrumen kebijakan fiskal terdiri dari :

a. Pembiayaan fungsional

Instrumen kebijakan fiskal yang terkait dengan pembiayaan fungsional ini terdiri dari (i) Pengeluaran pemerintah (G) yang ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional serta (ii) Pajak (T) dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk

meningkatkan penerimaan pemerintah serta (iii) Pinjaman dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang ada di masyarakat.

b. Pengeluaran Anggaran

Instrumen kebijakan fiskal yang terkait dengan pengeluaran anggaran yaitu berupa pengeluaran pemerintah (G), perpajakan (T) dan pinjaman dipergunakan secara terpadu untuk mencapai kestabilan ekonomi.

Secara umum kebijakan fiskal diarahka pada empat sasaran utama, yaitu :

a. Menciptakan stimulus fiskal

Guna menciptakan stimulus fiskal dengan sasaran penerimaan manfaat yang lebih tepat, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan administratif dan menciptakan mekanisme penyaluran dana secara transparan.

b. Memperkuat Basis Penerimaan

Upaya memperkuat basis penerimaan ditempuh melalui perbaikan administrasi dan struktur pajak, ekstensifikasi penerimaan pajak dan bukan pajak, seperti penjualan saham BUMN, penjualan asset BPPN.

c. Mendukung Program Rekapitalisasi Perbankan

Upaya untuk menunjang program rekapitalisasi dan penyehatan perbankan dilakukan dengan memasukkan biaya restruktursiasi perbankan ke dalam APBN.

d. Mempertahankan Prinsip Pembiayaan Defisit

Pemerintah tetap mempertahankan prinsip untuk tidak menggunakan pembiayaan defisit anggaran dari bank sentral dan bank-bank di dalam negeri. Pemerintah tetap mengupayakan pinjaman dari luar negeri, yang diperbolehkan dari lembaga keuangan internasional seperti bank Dunia, ADB, dan OECF serta sejumlah negara sahabat secara bilateral, terutama dalam kerangka CGI.

5.4.2 Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Pendapatan Nasional Keseimbangan (Output)

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen yang dimiliki pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan mempengaruhi pendapatan nasional keseimbangan atau pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target perekonomian negara yang sudah ditetapkan. Pada dasar dampak kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional keseimbangan (output) dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dampak terhadap sisi permintaan (demand side effect) dan dampak terhadap sisi penawaran (supply side effect). Dampak kebijakan fiskal terhadap sisi penawaran mempunyai implikasi jangka panjang. Kebijakan fiskal yang berorientasi untuk meningkatkan supply side dapat mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi dan karena itu dampaknya lebih bersifat jangka panjang.

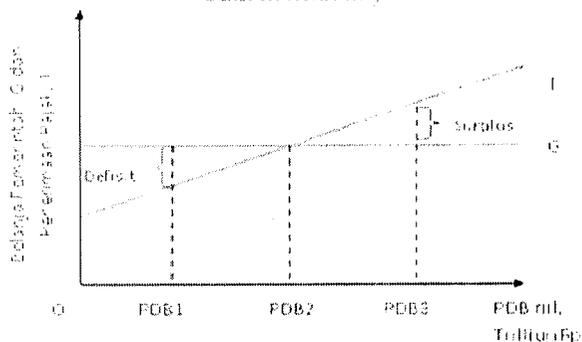
Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian melalui pendekatan permintaan agregat diterangkan melalui pendekatan Keynes, dimana kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan marginal propensity to consume (mpc), menjadi rantai perekonomian untuk peningkatan pengeluaran yang lebih banyak dan pada akhirnya terhadap output.

Pada dasarnya penerapan aturan kebijakan fiskal didukung oleh berbagai kelompok pemikiran, diantaranya kelompok neo klasik menganjurkan pentingnya aturan fiskal

yang terutama bertujuan membatasi pengeluaran pemerintah, defisit anggaran dan utang pemerintah dalam rangka kesinambungan fiskal. Paradigma neo klasik berpendapat bahwa batasan-batasan kondisi yang diperlukan untuk menghindari adanya efek crowding out, sedangkan paradigma pemikiran dari Keynesian percaya bahwa crowding out akan berlaku dan terjadi sebagai akibat adanya defisit anggaran dan utang pemerintah. Oleh karena itu New Keynesian menekankan bahwa aturan fiskal terutama bertujuan untuk menstabilkan fluktuasi makroekonomi dalam jangka pendek.

Idealnya kebijakan fiskal bersifat *automatic stabilizer* pada perekonomian melalui sisi pendapatan dan anggaran belanja pemerintah. Artinya, dalam kondisi perekonomian sedang mengalami ekspansi, belanja pemerintah seharusnya berkurang atau justru penerimaan pajak yang seharusnya bertambah. Sebaliknya, jika perekonomian sedang mengalami kontraksi, kebijakan fiskal seharusnya ekspansif melalui peningkatan belanja atau penurunan penerimaan pajak. Dengan demikian, automatic stabilizer kebijakan fiskal mensyaratkan adanya fungsi countercyclical dari kebijakan fiskal.

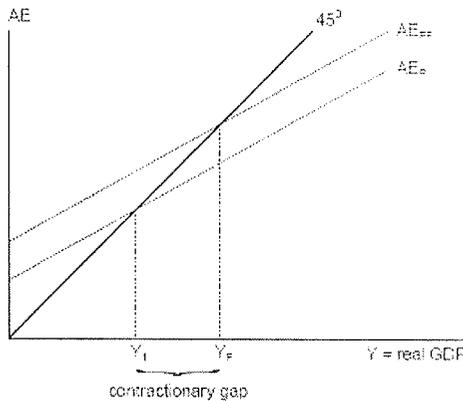
Gambar 5.9
Built in flexibility



Oleh karena itu dalam kebijakan fiskal terdapat dua jenis kebijakan fiskal, yaitu Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kebijakan Fiskal Kontraktif. Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pada saat munculnya kontraksional gap. Kontraksional gap adalah suatu kondisi dimana output potensial (Y_p) lebih tinggi dibandingkan dengan output Actual (Y_A). Pada saat terjadi kontraksional gap ini kondisi perekonomian ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran dimana $U_{ACTUAL} > U_{ALAMIAH}$.

Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T) untuk meningkatkan output (Y), adapun mekanisme peningkatan pengeluaran pemerintah ataupun penurunan pajak (T) terhadap output dapat ditunjukkan dalam gambar 5.10

Gambar 5.10
Kurva kebijakan fiskal ekspansif

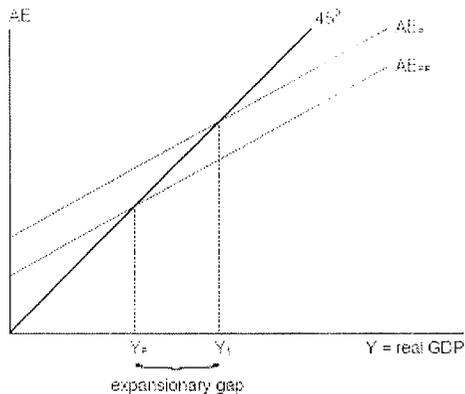


Berdasarkan gambar 5.10 diatas dapat dijelaskan bahwa disaat pengeluaran pemerintah (ΔG) naik atau selisih pajak

(ΔT) turun maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat keatas sehingga pendapatan akan naik dari (Y_0) menjadi (Y_1).

Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (*overheating*) untuk menurunkan tekanan permintaan. pada saat munculnya *ekspansionary gap*. *Eksansionary gap* adalah suatu kondisi dimana output potensial (Y_P) lebih kecil dibandingkan dengan output Actual (Y_A). Adapun mekanisme penurunan pengeluaran pemerintah (G) ataupun kenaikan pajak (T) terhadap output (Y) adalah sebagai berikut, secara grafik kebijakan fiskal kontraktif ditunjukkan dalam gambar 5.11

Gambar 5.11
Kurva kebijakan fiskal kontraktif



Pada gambar 5.11 dapat dijelaskan bahwa disaat pengeluaran pemerintah (ΔG) turun atau selisih pajak (ΔT) naik maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat kebawah sehingga Pendapatan akan turun dari (Y_1) menjadi (Y_2)

5.5 Multiplier Kebijakan Fiskal

Dalam pendekatan Keynes, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan.

Berdasarkan persamaan 18 dapat dicari besarnya Government spending multiplier ataupun tax cut multiplier sebagai berikut :

$$Y = \frac{1}{1-b} (a + I_0 + G_0 - bT_0) \dots\dots\dots 18)$$

$$\Delta Y = \frac{1}{1-b} (\Delta G_0) \text{ atau}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G_0} = \frac{1}{1-b} = \frac{1}{1-MPC} \dots\dots\dots 19)$$

Government spending multiplier dinyatakan sebagai $1/(1-mpc)$, dan dari formula ini terlihat bahwa semakin besar mpc maka semakin besar pula dampak dari pengeluaran pemerintah terhadap GDP.

Sementara itu efek multiplier dari pemotongan pajak (tax cut multiplier) dinyatakan sebagai berikut :

$$\Delta Y = \frac{-b}{1-b} (\Delta T_0) \text{ atau}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta T_0} = \frac{-b}{1-b} = \frac{-b}{1-MPC} \dots\dots\dots 20)$$

Hal ini menunjukkan bahwa efek multiplier dari pemotongan pajak (tax cut multiplier) dinyatakan sebagai $(1/(1-mpc) - 1)$. Tax cut multiplier adalah satu dikurangi dengan government spending multiplier. Tax cut multiplier selalu lebih kecil dari spending multiplier, oleh karenanya pemotongan pajak dianggap kurang potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam masa resesi dibandingkan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah.

Besarnya efek multiplier dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak bergantung kepada besarnya mpc yang bergantung kepada apakah peningkatan tersebut bersifat transitory atau permanen. Dalam hal ini, dampak mpc atas perubahan pendapatan transitori lebih kecil dibandingkan perubahan pendapatan yang permanen.

Pengembangan model Keynesian memungkinkan adanya tambahan dampak crowding out melalui perubahan yang disebabkan oleh suku bunga dan nilai tukar. Crowding out terjadi apabila Pemerintah menyediakan barang dan jasa yang menggantikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor swasta. Tingkat crowding out mempengaruhi besaran fiskal multiplier namun tidak mempengaruhi arah.

**Soal dan
Latihan**



**Pertanyaan Untuk Diskusi dan
Latihan**

1. Perhatikan kembali soal 3 bab 4. Apabila pada soal tersebut ditambahkan unsur $G = 250$, dan $T = 25$ Berapa besarnya :
 - a. Tingkat pendapatan, konsumsi dan tabungan keseimbangan yang baru
 - b. Andaikan Y full employment = 5.000, berapa besar perubahan G yang diperlukan untuk tercapainya tingkat pendapatan full-employment tersebut ?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan multiplier dan bagaimana proses multiplier terjadi dalam perekonomian tiga sektor ini.
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan balanced budget?

STUDI KASUS

Coba Saudara lakukan penelitian mini terkait dengan APBN Indonesia untuk 3 tahun terakhir. Lakukan analisis secara deskriptif dengan tajam. Diskusikan juga terkait dengan pengertian dan ruang lingkup APBN, Struktur dan Susunan APBN, Prinsip-prinsip dalam APBN. Jelaskan juga bagaimana hubungan antara kebijakan fiskal dengan pendapatan nasional (output). Analisis gunakan pendekatan deskriptif, matematik dan grafik

PERDAGANGAN NASIONAL DAN PENDAPATAN NASIONAL KESEIMBANGAN

6

Capaian Pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari bab 6 ini adalah mahasiswa mampu menganalisis Perdagangan Internasional dan hubungannya dengan Pendapatan Nasional Keseimbangan.

Dalam bab ini Sdr diharapkan dapat mencapai kompetensi dasar sebagai berikut :

1. Dapat mengidentifikasi konsep penentuan keseimbangan pendapatan nasional model empat (4) sektor
2. Dapat mendemonstrasikan penentuan Pendapatan Nasional Keseimbangan model empat (4) sektor
3. Dapat menjelaskan dan menganalisis multiplier Perekonomian Terbuka
4. Dapat Menjelaskan beberapa pandangan tentang perdagangan



6.1

**Model Perekonomian Terbuka**

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya tentang keseimbangan pendapatan nasional untuk dua sektor dan tiga sektor, pada dasarnya analisis keseimbangan merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk membangun dasar-dasar kemampuan analisis ekonomi makro secara optimal. Pembahasan analisis keseimbangan ekonomi tiga sektor dan keseimbangan perekonomian empat sektor (perekonomian terbuka) dibangun berdasarkan model keseimbangan Keynesian.

Dalam model keseimbangan Keynesian tersebut faktor dominan yang dianggap mempengaruhi keseimbangan ekonomi adalah sisi permintaan agregat, yang terdiri dari konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah dalam perekonomian tertutup (3 sektor) serta ditambah ekspor dan impor untuk perekonomian terbuka (4 sektor). Dengan demikian pada sistem perekonomian terbuka, terdapat empat sektor pelaku ekonomi yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri.

Analisis perekonomian terbuka merupakan suatu analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi (pendapatan nasional) suatu negara dengan mempertimbangkan pengaruh dari kegiatan ekspor dan impor Negara tersebut. Sehingga dalam analisis ini muncul dua aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan yakni aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor dan aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara lain. Hal ini berpengaruh terhadap besarnya pendapatan nasional pada perekonomian.

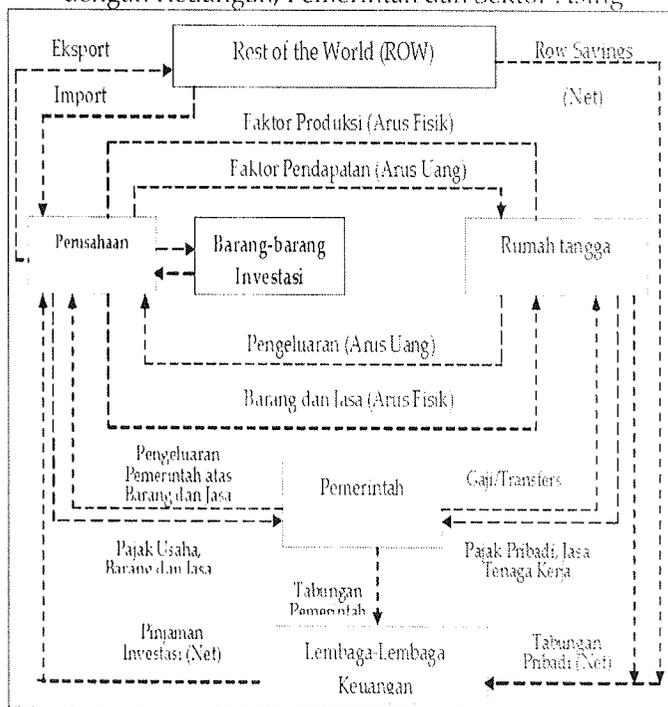
Model Perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian yang melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan internasional (ekspor dan import) akan barang-barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lainnya. Untuk mengukur tingkat keterbukaan perekonomian suatu negara dapat diukur dari rasio ekspor atau impor terhadap produk domestik bruto (PDB).

Penentuan keseimbangan pendapatan nasional model perekonomian terbuka (empat sektor) pada dasarnya mengembangkan model perekonomian tiga sektor dengan memasukkan transaksi perdagangan internasional. Di dalam membangun model makroekonomi empat sektor ini, ditambahkan asumsinya yaitu :

1. Perekonomian bersifat terbuka, sehingga terdapat perdagangan luar negeri (ekspor import).
2. Penerimaan pajak terdiri dari pajak lump-sum.
3. Penerimaan pajak tidak bergantung pada tingkat pendapatan nasional, dan tidak terdapat pembayaran transfer (transfer payments).

Arus sirkular bisnis dalam perekeonoan terbuka ini ditunjukkan dalam gambar 6.1 .

Gambar 6.1
 Diagram Dasar Arus sirkular Perekonomian
 dengan Keuangan, Pemerintah dan Sektor Asing



Bertitik tolak dari asumsi-asumsi tersebut di atas, dalam penentuan keseimbangan pendapatan nasional empat sektor (perekonomian terbuka), maka variabel pengeluaran agregat (agregat expenditure) terdiri dari : Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C), Pengeluaran Investasi (I), Pengeluaran Belanja Pemerintah (G), dan Ekspor bersih (NX) sebagai selisih antara ekspor (X) dengan Impor (M). Sisi pengeluaran ini dijabarkan dalam persamaan permintaan agregat (AD) yaitu sebagai berikut :

$$AD = C + I + G + X - M \quad \dots\dots\dots 1)$$

Dimana :

AD : Agregat Demand (Permintaan Agregat), sisi pengeluaran

C : Pengeluaran Konsumsi Sektor Rumah Tangga

I : Pengeluaran Investasi Sektor Perusahaan

G : Pengeluaran Pemerintah

X : Pengeluaran Ekpor

M : Pengeluaran Impor

Sedangkan dari sisi penerimaan, pendapatan nasional akan dipergunakan untuk konsumsi, bayar pajak dan sisanya di tabung. Secara matematis pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = C + S + T \quad \dots\dots\dots 2)$$

Dimana :

Y : Pendapatan, Sisi penerimaan

S : Tabungan (saving) yang dilakukan oleh masyarakat

T : Pajak

Dengan menyelesaikan persamaan 1) dan 2) dihasilkan persamaan sebagai berikut :

$$AD = Y$$

$$C + I + G + X - M = C + S + T$$

$$S + T + M = I + G + X \quad \dots\dots\dots 3)$$

Persamaan 3) menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, persamaan syarat keseimbangan terpenuhi pada kondisi dimana output (agregat) barang-barang dan jasa atau pendapatan (AS) adalah sama dengan permintaan agregat (AD). Secara singkat keseimbangan tersebut ditulis sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + X - M \quad \dots\dots\dots 4)$$

Sisi kiri dari Persamaan 4), Y , menunjukkan pendapatan nasional atau output riil barang-barang dan jasa, yang merupakan sisi penawaran agregat (AS) dan sisi kanan menunjukkan permintaan agregat (AD) dari perekonomian.

6.1.1 Ekspor

Sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan 4), ekspor adalah salah satu komponen agregat yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai. Apabila ekspor bertambah, pengeluaran agregat bertambah tinggi dan selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Ekspor suatu negara merupakan selisih antara jumlah barang-barang dan jasa yang tersedia untuk ditawarkan dengan permintaan dalam negeri dan stok pada tahun berjalan. Ekspor sebagai bagian dari perdagangan internasional bisa dimungkinkan oleh beberapa kondisi, antara lain :

- a) Adanya kelebihan produksi dalam negeri, sehingga kelebihan tersebut dapat dijual ke luar negeri melalui kebijaksanaan ekspor.
- b) Sebagai akibat adanya kekurangan produk dalam negeri, maka timbul permintaan luar negeri untuk suatu produk
- c) Adanya keuntungan yang lebih besar dari penjualan ke luar negeri daripada penjualan di dalam negeri, dikarenakan harga di pasar dunia yang lebih menguntungkan.
- d) Adanya kebijaksanaan ekspor yang bersifat politik.
- e) Adanya barter antar produk tertentu dengan produk lain yang diperlukan dan tak dapat diproduksi di dalam negeri.

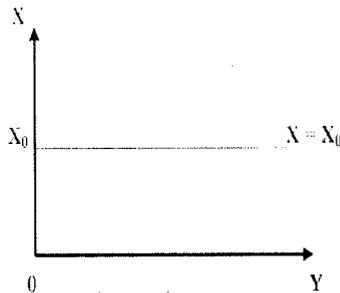
Besarnya ekspor suatu barang dan jasa di pasar internasional dalam perdagangan internasional akan sama dengan besarnya impor barang dan jasa tersebut. Harga yang

terjadi pada pasar internasional merupakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan dunia. Perubahan dalam produksi dunia akan mempengaruhi penawaran dunia dan perubahan dalam konsumsi dunia akan mempengaruhi permintaan dunia. Kedua perubahan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi harga. Banyak faktor yang mempengaruhi permintaan akan ekspor, diantaranya adalah nilai tukar uang (*exchange rate*), pendapatan luar negeri, kuota ekspor-impor dan tarif serta nontarif. Dalam babasan ini ekspor akan diperlakukan sebagai variabel eksogen, dimana fungsi ekspor dinyatakan sebagai berikut :

$$X = X_0 \quad \dots\dots\dots 5)$$

Secara grafik fungsi tersebut digambarkan sebagai berikut :

Gambar 6.2
Ekspor



Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya ekspor tidak tergantung pada pendapatan.

6.1.2 Impor

Di dalam model Keynesian sederhana, secara umum, impor (M) hanya tergantung pada tingkat pendapatan (Y) negara domestik. Hubungan antara impor dan pendapatan nasional diekspresikan oleh fungsi impor sebagai berikut:

$$M = f(Y) \quad \dots\dots\dots 6)$$

Persamaan 6 menunjukkan bahwa tinggi rendahnya impor akan sangat tergantung kepada tinggi rendahnya pendapatan nasional. Secara spesifik, persamaan fungsi impor dituliskan sebagai:

$$M = M_0 + mY \quad \dots\dots\dots 7)$$

dimana :

M : Impor

M_0 : Impor otonomus (*autonomous import*), yaitu jumlah pengeluaran impor yang tidak tergantung pada pendapatan.

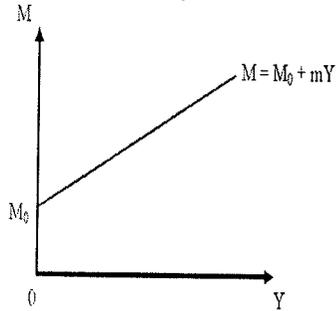
m : Kecenderungan marginal impor (*marginal propensity to import, MPM*), yang didefinisikan sebagai perubahan dalam impor (M) sebagai akibat dari adanya perubahan dalam pendapatan (Y), dituliskan sebagai:

$$MPM = \frac{\partial M}{\partial Y} > 0$$

mY : Impor yang terpengaruh (*induced import*), yaitu pengeluaran untuk barang dari luar negeri yang tergantung pada tingkat pendapatan.

Secara grafik fungsi tersebut digambarkan sebagai berikut :

Gambar 6.3
Fungsi Impor



**Penentuan Keseimbangan
Pendapatan Nasional dalam
Perekonomian Terbuka**

6.2



Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan persamaan-persamaan struktural dalam perekonomian terbuka yaitu sebagai berikut :

- $Y = C + I + G + X - M$ (syarat keseimbangan)..... 4)
- $C = a + bY^d$ (Bab 5 persamaan 8)
- $Y^d = Y - T$ (Bab 5 persamaan 7)
- $T = T_0$ (Bab 5 persamaan 15)
- $I = I_0$ (Bab 3 Persamaan 13)
- $G = G_0$ (Bab 5 Persamaan 14)
- $X = X_0$ 5)
- $M = M_0 + mY$ 7)

Penentuan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, sama halnya dengan pembahasan bab sebelumnya, dapat diselesaikan melalui dua pendekatan yaitu :

a) Pendekatan Penawaran Agregat – Permintaan Agregat

Dalam pendekatan ini, penentuan keseimbangan pendapatan nasional didasarkan pada persamaan 4), yaitu :

$$Y = C + I + G + X - M \text{ (syarat keseimbangan)..... 4)}$$

Dengan mensubstitusikan nilai-nilai C, Y^d, T, I, G, X dan M kedalam persamaan 4) maka akan diperoleh nilai sebagai berikut :

$$Y = a + bY^d + I_0 + G_0 + X_0 - M$$

$$Y = a + b(Y - T) + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - mY$$

$$Y = a + bY - bT_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - mY$$

$$(1-b+m)Y = a + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - bT_0$$

$$Y = \frac{1}{1-b+m} (a + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - bT_0) \text{ 8)}$$

b) Pendekatan Investasi - Tabungan

Dalam pendekatan ini, penentuan keseimbangan pendapatan nasional didasarkan pada persamaan (3), yaitu :

$$S + T + M = I + G + X \text{ 3)}$$

Dengan mensubstitusikan seluruh nilai-nilai dari setiap variabel tersebut pada persamaan (3), maka diperoleh nilai sebagai berikut :

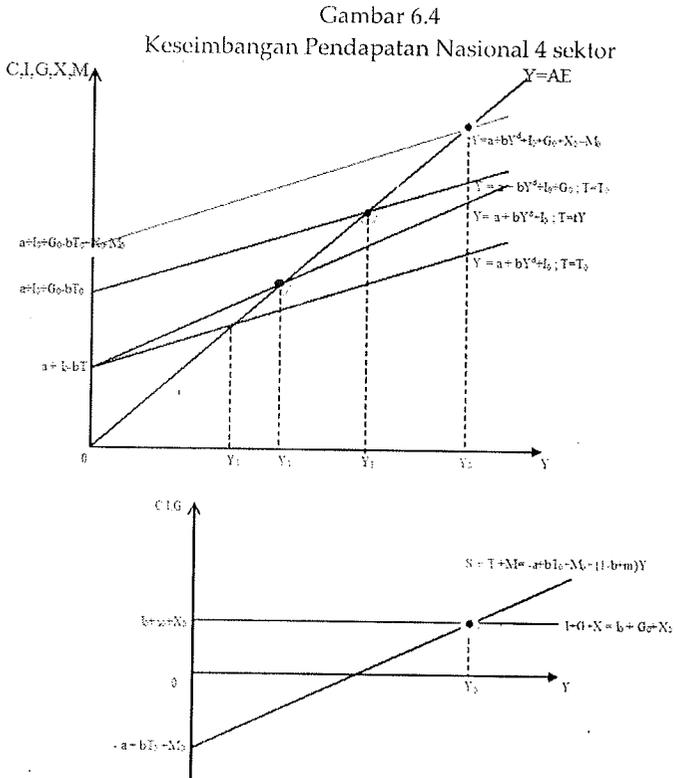
$$-a + (1 - b)Y^d + T_0 + M_0 - mY = I_0 + G_0 + X_0$$

$$(1 - b + m)Y = a + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - bT_0$$

$$Y = \frac{1}{1-b+m} (a + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - bT_0)$$

Formula tersebut sama seperti pada persamaan (8)

Secara grafik, penentuan keseimbangan pendapatan nasional untuk perekonomian terbuka ini digambarkan sebagai berikut :



Contoh 6.1:

Perekonomian suatu negara memiliki perilaku persamaan struktural sebagai berikut :

$$C = 40 + 0,5Y^d$$

$$Y^d = Y - T$$

$$T = 10$$

$$I = 60$$

$$G = 55$$

$$X = 120$$

$$M = 10 + 0,2Y$$

Diminta :

- Nilai keseimbangan pendapatan nasional
- Injection-leakage approach
- Gambarkan grafik dari dua pendekatan tersebut

Jawaban :

- Nilai keseimbangan pendapatan nasional diperoleh dengan cara sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + X - M$$

Substitusikan nilai C, Y^d , T, I, G, X dan M kedalam persamaan diatas sehingga menghasilkan nilai :

$$Y = 40 + 0,5(Y-10) + 60 + 55 + 120 - (10 + 0,2Y)$$

$$Y = 40 + 0,5Y - 5 + 60 + 55 + 120 - 10 - 0,2Y$$

$$Y - 0,5Y + 0,2Y = 260$$

$$Y = \frac{260}{(1 - 0,5 + 0,2)}$$

$$Y^e = 371,43$$

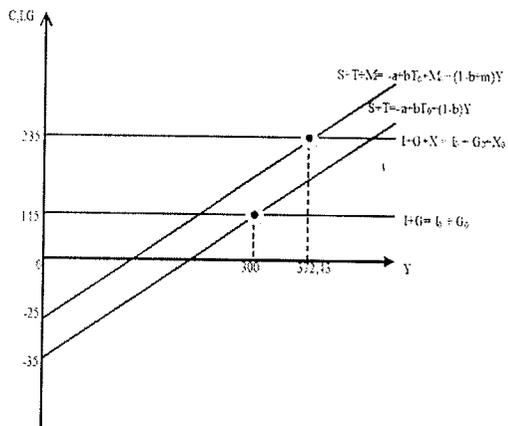
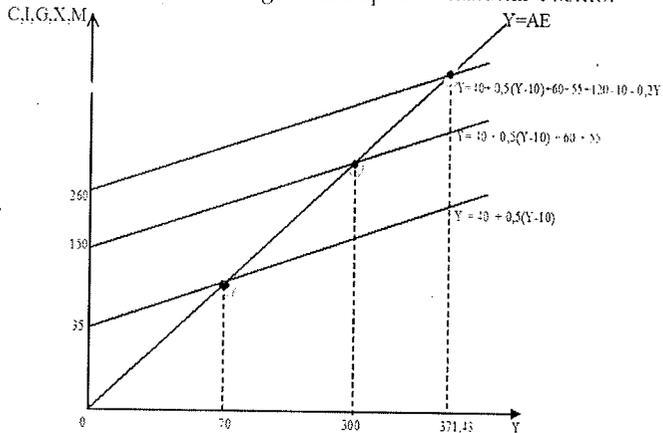
- Nilai keseimbangan dengan pendekatan injection-leakage approach dihasilkan :

$$\begin{array}{l} S + T + M = I + G + X \\ -a + (1 - b)Y_d + T + M = I + G + X \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 -40 + (1-0.5)(Y-10) + 10 + 10 + 0.2Y &= 60 + 55 + 120 \\
 -40 + 0.5Y - 5 + 20 + 0.2Y &= 235 \\
 0.7Y &= 260 \\
 Y^e &= 371,43
 \end{aligned}$$

c) Grafik kedua model pendekatan tersebut

Gambar 6.5
Keseimbangan Pendapatan Nasional 4 sektor



Apabila pajak diasumsikan sebagai variabel endogen, dimana besar kecilnya pajak ditentukan oleh tingkat pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak sebagai pajak pendapatan (induced taxes). Fungsi pajak secara matematis dinyatakan sebagai :

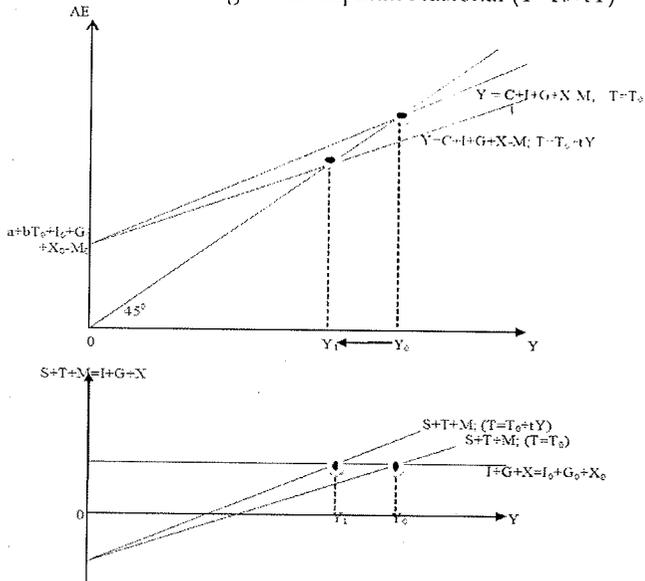
$$T = T_0 + tY \quad \dots\dots\dots 9)$$

Substitusikan persamaan 9) ke dalam syarat keseimbangan $Y = C + I + G + X - M$ atau $S + T + M = I + G + Y$, maka akan diperoleh persamaan penentuan tingkat pendapatan nasional keseimbangan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= C + I + G + X - M \\ Y &= a + bY_d + I_0 + G_0 + X_0 - M \\ Y &= a + b(Y - T) + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - mY \\ Y &= a + bY - b(T_0 + tY) + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - mY \\ (1 - b + bt + m) Y &= a + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - bT_0 \\ Y &= \frac{1}{1 - b(1 - t) + m} (a + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - bT_0) \dots\dots\dots 10) \end{aligned}$$

Secara grafik, penentuan pendapatan nasional keseimbangan dalam model perekonomian terbuka atau empat sektor, dengan pajak merupakan fungsi dari pendapatan nasional dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 6.6
Keseimbangan Pendapatan Nasional ($T=T_0+tY$)



6.3  Multiplier dalam Perekonomian Terbuka

Analisis angka pengganda atau multiplier mencoba melihat apa yang terjadi terhadap variabel-variabel endogen, yaitu pendapatan nasional, apabila terjadi perubahan variabel-variabel eksogen, seperti konsumsi, pajak, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor di perekonomian. Nilai multiplier dalam perekonomian terbuka ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Angka Pengganda Perekonomian Terbuka

| No | Variabel Pengganda | $T = T_0$ | $T = T_0 + tY$ |
|----|--|--|---|
| 1 | Pengganda Konsumsi [k_c] | $\frac{\partial Y}{\partial C} = \frac{1}{1-b+m}$ | $\frac{\partial Y}{\partial C} = \frac{1}{1-b(1-t)+m}$ |
| 2 | Pengganda Investasi [k_i] | $\frac{\partial Y}{\partial I} = \frac{1}{1-b+m}$ | $\frac{\partial Y}{\partial I} = \frac{1}{1-b(1-t)+m}$ |
| 3 | Pengganda Pengeluaran Pemerintah [k_G] | $\frac{\partial Y}{\partial G} = \frac{1}{1-b+m}$ | $\frac{\partial Y}{\partial G} = \frac{1}{1-b(1-t)+m}$ |
| 4 | Pengganda Pajak [k_T] | $\frac{\partial Y}{\partial T} = \frac{-b}{1-b+m}$ | $\frac{\partial Y}{\partial T} = \frac{-b}{1-b(1-t)+m}$ |
| 5 | Pengganda Ekspor [k_X] | $\frac{\partial Y}{\partial X} = \frac{1}{1-b+m}$ | $\frac{\partial Y}{\partial X} = \frac{1}{1-b(1-t)+m}$ |
| 6 | Pengganda Impor [k_M] | $\frac{\partial Y}{\partial M} = \frac{1}{1-b+m}$ | $\frac{\partial Y}{\partial M} = \frac{1}{1-b(1-t)+m}$ |

Besarnya angka pengganda pengeluaran pada perekonomian terbuka dengan impor sebagai variable tetap dan pajak bersifat otonom (tetap/lump-sum) adalah sama dengan angka pengganda pengeluaran untuk perekonomian untuk tiga sektor dengan pajak bersifat otonom.

Besarnya angka pengganda pengeluaran pada perekonomian terbuka dengan impor yang tergantung pada besar kecilnya pendapatan dan pajak bersifat otonom (tetap/lump-sum) akan berbeda dengan angka pengganda pengeluaran untuk perekonomian untuk tiga sector dengan impor dan pajak bersifat proporsional. Angka pengganda pengeluaran pada perekonomian terbuka dengan pajak bersifat otonom (lump-sum) dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

$$Y = \frac{1}{1-b+m} (a + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - bT_0) \dots\dots\dots 8)$$

Apabila terjadi perubahan pada pengeluaran otonom seperti investasi otonom (I_0) dimana investasi berubah sebesar ΔI ,

maka pendapatan nasional akan berubah menjadi ΔY .

$$Y_1 - Y_0 = \frac{1}{1-b+m} (I_1 - I_0)$$

$$\Delta Y = \frac{1}{1-b+m} \Delta I$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1-b+m} \quad \text{atau} \quad \frac{\partial Y}{\partial I} = \frac{1}{1-b+m}$$

Dengan demikian angka pengganda pengeluaran investasi (k_i) adalah :

$$\frac{\partial Y}{\partial I} = \frac{1}{1-b+m}$$

Dengan cara yang sama, apabila terjadi perubahan konsumsi, pengeluaran pemerintah, pajak, ekspor ataupun import sebagaimana hasilnya ditunjukkan dalam tabel 6.1

Angka pengganda pengeluaran untuk perekonomian terbuka dimana impor adalah proporsional dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan di bawah ini :

$$Y = \frac{1}{1-b(1-t)+m} (C + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - bT_0) \dots 10$$

Apabila terjadi perubahan pada pengeluaran otonom, seperti investasi otonom (I_0) dimana investasi berubah sebesar ΔI , maka pendapatan nasional akan berubah menjadi ΔY .

$$Y_1 - Y_0 = \frac{1}{1-b(1-t)+m} (I_1 - I_0)$$

$$\Delta Y = \frac{1}{1-b(1-t)+m} \Delta I$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1-b(1-t)+m} \quad \text{atau} \quad \frac{\partial Y}{\partial I} = \frac{1}{1-b(1-t)+m}$$

Dengan cara yang sama, apabila terjadi perubahan konsumsi, pengeluaran pemerintah, pajak, ekspor ataupun import sebagaimana hasilnya ditunjukkan dalam tabel 6.1

Angka Pengganda Balance Budget

Untuk angka pengganda balance budget, dimana dalam kasus ini, dimisalkan pemerintah secara bersamaan menambah pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak yang sama besarnya atau $\Delta G = \Delta Tx$. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kenaikan pengeluaran pemerintah (G) akan dibiayai dengan adanya kenaikan penerimaan pajak (Tx) dalam jumlah yang sama. Kebijakan tersebut akan menyebabkan anggaran belanja pemerintah akan tetap seimbang.

Analisis perhitungan angka pengganda balanced budget untuk perekonomian terbuka dapat diklasifikasi berdasarkan asumsi apakah impor bersifat otonom atau proporsional. Apabila impor bersifat otonom maka besarnya angka pengganda balanced budget adalah sebagai berikut :

| Untuk pajak otonom | Untuk pajak proporsional |
|---|--|
| $k_B = k_G + k_T$ $k_B = \frac{1}{1-b} + \frac{-b}{1-b}$ $k_B = \frac{1-b}{1-b} = 1$ | $k_B = k_G + k_T$ $k_B = \frac{1}{1-b+bt} + \frac{-b}{1-b+bt}$ $k_B = \frac{1-b}{1-b+bt}$ |
| <p>Dengan demikian, bila terjadi kenaikan $\Delta G = \Delta Tx$, maka akan menambah pendapatan nasional sebesar ΔG</p> | <p>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional akan bertambah sebesar angka pengganda k_B kali ΔG. Oleh karena nilai $(1-b)$ lebih kecil daripada nilai $(1-b+bt)$ maka nilai angka pengganda tersebut adalah kurang dari satu</p> |

Apabila impor diasumsikan proporsional terhadap pendapatan nasional maka besarnya angka balanced budget adalah sebagai berikut :

| Untuk pajak otonom | Untuk pajak proporsional |
|--|--|
| $k_B = k_G + k_T$ $k_B = \frac{1}{1-b+m} + \frac{-b}{1-b+m}$ $k_B = \frac{1-b}{1-b+m}$ | $k_B = k_G + k_T$ $k_B = \frac{1}{1-b+bt+m} + \frac{-b}{1-b+bt+m}$ $k_B = \frac{1-b}{1-b+bt+m}$ |
| <p>Dengan demikian, bila terjadi kenaikan $\Delta G = \Delta T_x$, maka akan menambah pendapatan nasional sebesar angka pengganda k_B kali ΔG dan nilainya akan lebih kecil dari satu</p> | <p>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional akan bertambah sebesar angka pengganda k_B kali ΔG. Oleh karena nilai $(1-b)$ lebih kecil daripada nilai $(1-b+bt+m)$ maka nilai angka pengganda tersebut adalah kurang dari satu</p> |

Contoh 6.2 :

Berdasarkan contoh 6.1, jika pajak merupakan fungsi dari pendapatan dengan prilakunya adalah $T = 10 + 0.1Y$, diminta :

- a) Nilai keseimbangan Pendapatan Nasional
- b) Perbedaan nilai angka pengganda antara $T = 10$ dengan $T = 10 + 0.1Y$

Jawab :

- a) Nilai Keseimbangan Pendapatan Nasional

$$\begin{aligned}
 Y &= C + I + G + X - M \\
 &= [40 + 0.5(Y - T)] + 60 + 55 + 120 - [10 + 0.2Y] \\
 &= 40 + 0.5Y - 0.5(10 + 0.1Y) + 60 + 55 + 120 - 10 - 0.2Y
 \end{aligned}$$

$$Y = \frac{260}{1 - 0.5(1 - 0.1) + 0.2}$$

$$Y^e = \frac{260}{1 - 0.25} = 346,67$$

b) Angka pengganda (multiplier)

| N o | Variabel Pengganda | $T = T_0$ | $T = T_0 + tY$ |
|--------|--|---|--|
| 1 | Pengganda Konsumsi [k_c] | $\partial Y = \frac{1}{1-0,5+0,2} \cdot \partial C = 1,43 \partial C$ | $\partial Y = \frac{1}{1-0,25} \cdot \partial C = 1,33 \partial C$ |
| 2 | Pengganda Investasi [k_i] | $\partial Y = \frac{1}{1-0,5+0,2} \cdot \partial I = 1,43 \partial I$ | $\partial Y = \frac{1}{1-0,25} \cdot \partial I = 1,33 \partial I$ |
| 3 | Pengganda Pengeluaran Pemerintah [k_G] | $\partial Y = \frac{1}{1-0,5+0,2} \cdot \partial G = 1,43 \partial G$ | $\partial Y = \frac{1}{1-0,25} \cdot \partial G = 1,33 \partial G$ |
| 4 | Pengganda Pajak [k_r] | $\partial Y = \frac{1}{1-0,5+0,2} \cdot \partial T = 1,43 \partial T$ | $\partial Y = \frac{1}{1-0,25} \cdot \partial T = 1,33 \partial T$ |
| 5 | Pengganda Ekspor [k_x] | $\partial Y = \frac{1}{1-0,5+0,2} \cdot \partial X = 1,43 \partial X$ | $\partial Y = \frac{1}{1-0,25} \cdot \partial X = 1,33 \partial X$ |
| 6 | Pengganda Impor [k_M] | $\partial Y = \frac{1}{1-0,5+0,2} \cdot \partial M = 1,43 \partial M$ | $\partial Y = \frac{1}{1-0,25} \cdot \partial M = 1,33 \partial M$ |

Dimisalkan terhadap pengeluaran pemerintah naik sebesar Rp 1, maka akan menurunkan Y keseimbangan sebesar Rp 1,43 untuk $T = 10$ dan menurunkan Y keseimbangan sebesar Rp 1,33 untuk $T = 10 + 0,1Y$

6.4



Perdagangan Internasional

Pada dasarnya perdagangan internasional terjadi sebagai akibat adanya aktivitas perekonomian yang dipengaruhi oleh adanya arus modal dan barang internasional melalui kegiatan ekspor dan import barang-barang dan jasa yang terjadi lintas negara. Hal ini terjadi karena pengeluaran domestik suatu negara tidak perlu sama dengan output barang dan jasa dari negara itu sendiri. Jika $Y > C+I+G$, maka negara yang memiliki kelebihan output tersebut dapat melakukan ekspor sebesar perbedaannya dan sebaliknya jika $Y < C+I+G$, maka negara yang memiliki kekurangan untuk kebutuhan konsumsi domestiknya perlu mengimpor atas barang barang dan jasa sebesar kekurangannya.

Terdapat banyak manfaat perdagangan internasional, baik itu bagi pemerintah maupun bagi masyarakat yang berperan dalam perdagangan. Beberapa manfaat dari perdagangan internasional diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Memperoleh Devisa

Devisa Hasil Ekspor adalah devisa yang diterima Eksportir dari hasil kegiatan Ekspor atas suatu komoditas yang diekspor ke negara lain. Negara pengekspor tersebut akan mendapatkan mata uang asing seperti dollar Amerika, yen, atau jenis mata uang lainnya. Mata uang asing ini terkait dengan devisa. Devisa adalah sejumlah valuta asing untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Devisa terdiri dari valuta asing, yaitu mata uang yang diterima oleh semua negara di dunia adalah US Dollar (\$), Yen Jepang, Euro, Poundsterling (Inggris), Prancis-Franc, Switzerland-Franc, Dollar-Canada, DM (Deutsche Mark)-Germany, emas, surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional. Dengan devisa ini yang

digunakan untuk, misalnya mengimpor barang modal dan konsumsi .

2) Memperluas Kesempatan Kerja

Perdagangan internasional, khususnya kegiatan ekspor akan memberikan kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja yang berguna untuk menghasilkan barang ekspor itu sendiri. Kegiatan ekspor akan barang tersebut membutuhkan tenaga kerja.

3) Menstabilkan Harga-Harga

Dalam kegiatan perdagangan internasional akan suatu komoditas, jika harga suatu jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya komoditasnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, maka barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya aktivitas impor tersebut harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun dapat terpenuhi.

4) Meningkatkan Kualitas Konsumsi

Kegiatan perdagangan internasional menjadikan penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri. Sehingga perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas konsumsi .

5) Mempercepat Alih Teknologi

Melalui kegiatan perdangan internasional, maka dalam menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri, dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan

tertentu. Oleh sebab itu, pihak penjual perlu mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakannya yang akan mempercepat alih teknologi. Alih teknologi yang dapat memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern.

6) Menciptakan efisiensi dan spesialisasi.

Dengan adanya perdagangan internasional maka akan tercipta masalah efisiensi dan spesialisasi produk atau komoditas.

Beberapa Pandangan tentang teori perdagangan internasional

Pada dasarnya teori perdagangan internasional terdiri dari teori-teori klasik tentang perdagangan internasional yang menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi ekonomi nasional suatu negara, masing-masing memiliki -- keunggulan/advantage akan produk yang dihasilkan dan memungkinkan pertukaran itu bisa terjadi. Sementara itu teori-teori baru tentang Perdagangan Internasional lebih menjelaskan bagaimana keterkaitan di antara keunggulan alami suatu negara, tindakan-tindakan pemerintah, dan karakteristik industri yang memungkinkan terjadinya pertukaran.

Teori-teori klasik diantaranya yaitu (i) Merkantilisme (sebelum abad -16th) yang memberikan pandangan bahwa perdagangan internasional mengambil sebuah pola "kami versus mereka" sehingga mereka berpendapat apa yang diperoleh negara lain adalah kerugian bagi suatu negara itu sendiri. Sedangkan teori-teori perdagangan bebas dinyatakan tentang teori Absolute Advantage (Adam Smith, 1776); Comparative Advantage (David Ricardo, 1817); Specialization pada produksi dan aliran barang-barang akan memberikan keuntungan semua pihak yang terlibat di dalam perdagangan internasional. (menguntungkan trading partners' economies).

Selanjutnya perbaikan teori Perdagangan Internasional dilakukan melalui teori Factor-proportions (Heckscher-Ohlin, 1919); International product life cycle (Ray Vernon, 1966).

Teori keunggulan absolut dari Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*, 1776 menyatakan bahwa sebuah setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional (gain from trade) karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak (absolute advantage) serta mengimport jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak (absolute disadvantage).

Teori Biaya Relatif (*comparative cost*) dari David Ricardo memfokuskan pada teori *cost comparative advantage (labor efficiency)* dan *production comparative advantage (labor productivity)*. Teori ini mendasarkan pada nilai tenaga kerja atau teori of labor value yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Selanjutnya teori *Cost comparative advantage (labor efficiency)* menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dimana negara tersebut dapat memproduksi relatif lebih efisien serta mengimport barang dimana negara tersebut memproduksi relatif kurang atau tidak efisien.

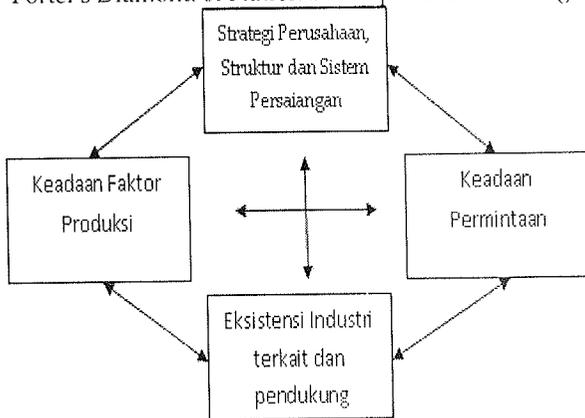
Comparative Advantage (teori kemanfaatan) dinyatakan oleh J.S Mill. Pandangannya menyatakan bahwa suatu negara yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimport barang yang memiliki comparative disadvantage yaitu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimport barang yang jika dihasilkan sendiri akan memakan ongkos yang sangat besar.

Pandangan teori modern atas perdagangan internasional diantaranya adalah teori Heckser dan Ohlin. Teori ini memandang bahwa keuntungan komparative dan perdagangan didasarkan pada perbedaan faktor alam (*factor endowments*), teknologi dan citarasa anta negara, dimana teori ini menekankan pada perbedaan relative factor pemberian alam (*factor endowment*) dan harga-harga faktor produksi antar negara sebagai determinan perdagangan yang paling penting. Teorema H-O menyatakan bahwa tiap negara akan mengeskpor komoditi yang intensif dalam faktor yang secara relative berlimpah dan murah serta mengimpor komoditi yang intensif dalam faktor yang relative langka dan mahal. Perdagangan akan membawa pada penghapusan atau pengurangan perbedaan sebelum perdagangan dalam harga-harga faktor absolut dan relatif antar negara.

Pandangan selanjutnya dari Wolfgang Stolper dan Paul Samuelson. Teori ini disebut dengan teori Stolper-Samuelson yang menyatakan bahwa pembukaan perdagangan dan peningkatan harga relatif barang-barang yang dapat diekspor menjelaskan adanya keuntungan yang diperoleh pada faktor produksi yang digunakan secara intensif dalam industri ekspor. Teori ini juga amenjelskan tentang kerugian-kerugian yang diperoleh pada faktor produksi yang digunakan secara intensif dalam industri yang bersaing dengan produk import.

Pandangan teori perdagangan internasional yang terjadi pada era persaingan global yaitu teori comparative advantage of Nation dari M Porter. Teori ini menyatakan bahwa suatu bangsa atau negara yang memiliki competitive advantage of nation dapat bersaing di pasar internasional bila memiliki empat faktor penentu seperti ditunjukkan dalam gambar 6,7 berikut

Gambar 6.7
Porter's Diamond of National Competitive Advantage



Soal dan Latihan



Pertanyaan Untuk Diskusi dan Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka?
2. Coba Saudara diskusikan dan gambarkan arus sirkular untuk model perekonomian empat sektor? jelaskan!
3. Tunjukkan secara grafik bagaimana tingkat pendapatan nasional keseimbangan ditentukan, baik dengan pendekatan $AS = AD$ maupun dengan pendekatan injeksi = kebocoran dalam model perekonomian 4 sektor?
4. Andaikan perekonomian suatu negara berstruktur sebagai berikut :
 - a. $C = 500 + 0,5Y^d$
 - b. $Y^d = Y - T$
 - c. $T = 100 + 0,2Y$
 - d. $I = 50$
 - e. $G = 30$

- f. $X = 50$,
- g. $M = 15 + 0,1Y$

Berapa besarnya :

1. Tingkat pendapatan, konsumsi, tabungan, dan pengganda pengeluaran yang baru
 2. Apakah neraca perdagangan (TB) berada dalam keadaan seimbang ?
 3. Jika pajak otonom (T_o) naik sebesar 50, apa dampaknya terhadap pendapatan keseimbangan ?
 4. Gambarkan pula grafik yang menunjukkan keadaan keseimbangan seperti dimaksud pada butir a) di atas !
5. Diketahui fungsi konsumsi (C) = $150 + 0,75Y_d$, fungsi investasi (I) = 120, pengeluaran pemerintah (G) = 180, fungsi pajak (T) = $150 + 0,2Y$, ekspor (X) = 80, dan impor (M) = $60 + 0,2Y$.

Dalam kondisi keseimbangan, berapakah nilai dari :

- a) Pendapatan (Y), Konsumsi (C), Tabungan (S), Pajak (T), Impor (M),
- b) Apa dampaknya terhadap pendapatan nasional (Y), dan ekspor netto ($X - M$) dari setiap perubahan di bawah ini :
 - i. Kenaikan di dalam investasi sebesar Rp 10 milyar
 - ii. Kenaikan di dalam ekspor sebesar Rp 10 milyar
 - iii. Kenaikan di dalam impor otonom, (M_o) sebesar Rp 10 milyar

Diskusikan dan amati tentang kondisi perdagangan internasional dewasa ini! Selanjutnya jelaskan apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional dan uraikan berbagai pandangan teori atas perdagangan internasional tersebut sehingga Saudara dapat menganalisis bagaimana manfaat adanya perdagangan internasional

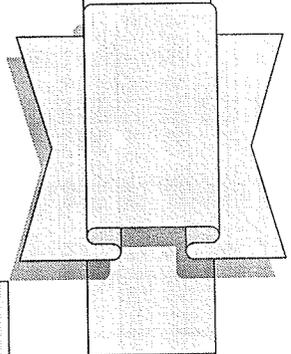
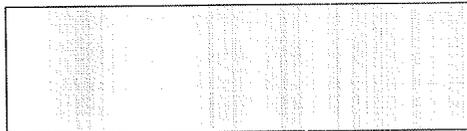
NERACA PEMBAYARAN DAN NILAI TUKAR

Capaian Pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari bab 7 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep neraca pembayaran dan nilai tukar.

Dalam bab ini Sdr diharapkan dapat mencapai kompetensi dasar sebagai berikut :

1. Dapat mengidentifikasi dan menjelaskan konsep neraca pembayaran.
2. Dapat mengidentifikasi struktur neraca pembayaran
3. Dapat menjelaskan konsep nilai tukar

7





Kondisi perekonomian suatu negara dapat dilihat baik dari sisi internal maupun eksternal. Kondisi internal antara lain tercermin pada perkembangan sektor riil, seperti produksi, konsumsi, dan investasi, dan perkembangan sektor moneter, seperti inflasi dan jumlah uang beredar. Sementara itu, kondisi eksternal tercermin pada aktivitas perekonomian internasional dan salah satu bagian dari aktivitas tersebut adalah mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional (ekspor dan impor) dimana salah satu permasalahan yang dihadapi dalam ekonomi internasional yaitu mengenai neraca pembayaran internasional.

Grand Theory dari analisis Neraca Pembayaran Internasional adalah Teori perekonomian Terbuka atau Ekonomi Internasional. Fokus analisis teori tersebut terletak pada beberapa argumentasi tentang mengapa suatu negara harus berhubungan dengan kegiatan ekonomi negara lain. Jawabannya terletak pada manfaat yang didapatkan oleh negara tersebut dari transaksi ekonomi internasionalnya. Salah satunya adalah bahwa dengan adanya kegiatan ekonomi internasional, maka suatu negara dapat memperoleh sejumlah valuta asing yang kemudian melalui mekanisme perbankan akan membentuk cadangan devisa sebagai bagian dari modal pembangunan.

Neraca pembayaran suatu negara merupakan salah satu indikator yang sangat penting mengenai keadaan atau apa yang terjadi dalam perekonomian negara tersebut. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran sering menjadi faktor yang dapat mendorong naik atau turunnya kurs mata uang suatu negara. Kenaikan atau surplus dari neraca perdagangan

dan neraca pembayaran akan diinterpretasikan sebagai indikasi awal kemungkinan terjadinya apresiasi suatu mata uang. Sebaliknya penurunan atau defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran akan diterjemahkan sebagai indikasi awalnya terjadi depresiasi mata uang suatu negara.

Dengan adanya neraca pembayaran ini dapat diketahui kapan suatu negara mengalami surplus maupun defisit. Apabila neraca pembayaran suatu negara dalam keadaan defisit, artinya penduduk negara tersebut membayar yang lebih besar kepada penduduk negara lain dibandingkan penerimaan pembayaran dari penduduk negara lain. Sedangkan keadaan surplus menunjukkan keadaan sebaliknya. Oleh karena itu kebijaksanaan neraca pembayaran merupakan bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan dan mempunyai peranan penting dalam pemantapan stabilitas di bidang ekonomi yang diarahkan guna mendorong pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Perkembangan neraca pembayaran memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan sektor riil, fiskal, dan moneter.

7.2 Konsep dan Struktur Neraca Pembayaran

Hubungan ekonomi antardua negara atau lebih, meliputi kegiatan pertukaran barang dan jasa, transaksi modal, transaksi pembayaran utang-piutang antar penduduk negara atau pemindahan kekayaan penduduk suatu negara ke negara lain. Catatan sistematis untuk semua transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu disebut neraca

pembayaran internasional (Balance of Payment). Menurut Balance of Payment Manual (BPM) yang diterbitkan IMF (1993)

definisi neraca pembayaran internasional (Balance of Payment) adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk (resident) suatu Negara dan penduduk luar negeri (rest of the world) untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Neraca pembayaran secara esensial merupakan sistem akuntansi yang mengukur kinerja suatu negara. Pencatatan transaksi dilakukan dengan pembukuan berpasangan (double-entry bookkeeping system), yaitu; tiap transaksi dicatat satu sebagai kredit dan satu lagi sebagai debit.

Tujuan utama neraca pembayaran yaitu untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan, khususnya yang terkait dengan hasil praktek hubungan ekonomi dengan negara lain. Neraca pembayaran juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bidang moneter, fisikal, perdagangan, dan pembayaran internasional.

Oleh karena itu tujuan penyusunan neraca pembayaran juga adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Bidang ekonomi di sini termasuk ekspor dan impor, hubungan utang piutang, hubungan penanaman modal, dan hubungan lainnya yang menyangkut neraca pembayaran.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional.
- 4) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan Internasional.

Berdasarkan pengertian neraca pembayaran tersebut, ada dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian penduduk, dalam suatu neraca pembayaran internasional meliputi semua subjek ekonomi dapat berupa individu, badan hukum, dan pemerintah yang memiliki kemungkinan mengadakan transaksi-transaksi ekonomi dengan negara lain.
2. Transaksi ekonomi, dalam suatu neraca pembayaran internasional meliputi seluruh transaksi ekonomi dan yang bukan transaksi ekonomi tidak dimasukkan ke dalam neraca pembayaran internasional. Misalnya, transaksi bantuan militer.

Dalam transaksi ekonomi perlu dibedakan antara transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain. Transaksi debit ini menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Sedangkan transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Transaksi ini menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri, sehingga transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

Sebagai contoh, Indonesia mengekspor beras ke Jepang. Transaksi ini mengakibatkan timbulnya hak bagi penduduk negara Indonesia untuk menerima pembayaran dari negara Jepang. Oleh karena itu, transaksi ini dalam neraca pembayaran Indonesia akan terlihat sebagai transaksi kredit. Transaksi yang sama bagi penduduk Jepang adalah sebaliknya, yaitu merupakan transaksi impor beras. Dengan demikian, transaksi

ini menimbulkan kewajiban bagi penduduk Jepang untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk Indonesia. Dalam neraca pembayaran Jepang, transaksi impor beras akan terlihat sebagai transaksi debit.

Contoh lainnya dari transaksi debit di dalam neraca pembayaran Indonesia adalah impor barang-barang; pembayaran atau pembelian barang dan jasa yang dilakukan penduduk Indonesia di luar negeri; pembelian tiket pesawat berbendera asing oleh penduduk Indonesia yang bepergian ke luar negeri; dividen, bunga dan jasa pembayaran utang atas modal milik asing; investasi di luar negeri oleh penduduk Indonesia; dan hadiah yang diberikan penduduk Indonesia kepada penduduk luar negeri.

Sedangkan contoh transaksi kredit di dalam neraca pembayaran Indonesia, yaitu ekspor barang-barang, pembayaran atau pembelian barang dan jasa yang dilakukan penduduk luar negeri di Indonesia, pembelian tiket pesawat milik perusahaan Indonesia oleh penduduk luar negeri yang bepergian ke Indonesia, dividen, bunga dan jasa pembayaran utang atas modal milik penduduk Indonesia di luar negeri, investasi di Indonesia oleh penduduk luar negeri, dan hadiah yang diberikan penduduk luar negeri kepada penduduk Indonesia.

Secara garis besar transaksi ekonomi internasional (luar negeri) atau pos-pos dasar suatu negara dapat dibedakan sebagai berikut :

1) Transaksi Dagang (Trade Account)

Transaksi dagang adalah semua transaksi ekspor dan impor barang-barang (*merchandise*) dan jasa-jasa. Transaksi dagang dibedakan menjadi transaksi barang (*visible trade*) yang merupakan transaksi ekspor dan impor barang dagangan, dan transaksi jasa (*invisible trade*) yang merupakan transaksi

ekspor dan impor jasa. Untuk transaksi ekspor dicatat di sisi kredit, sedangkan transaksi impor dicatat di sisi debit.

2) Transaksi Pendapatan Modal (*Income on Investment*)

Transaksi pendapatan modal adalah semua transaksi penerimaan atau pendapatan yang berasal dari penanaman modal di luar negeri serta penerimaan pendapatan modal asing di negeri kita. Pendapatan tersebut dapat berupa bunga, dividen, dan keuntungan lain. Penerimaan bunga dan dividen merupakan transaksi kredit, sedangkan pembayaran bunga dan dividen kepada penduduk negara asing merupakan transaksi debit.

3) Transaksi Unilateral (*Unilateral Transaction*)

Transaksi unilateral adalah transaksi sepihak atau transaksi satu arah, artinya transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar atas barang atau bantuan yang diberikan. Berikut ini yang tergolong dalam transaksi unilateral adalah hadiah (*gift*), bantuan (*aid*), dan transfer unilateral (*unilateral transfer*).

1. Transaksi hadiah (*gift*) berbeda dengan transaksi lain. Transaksi ini tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi si penerima untuk membayar harga hadiah yang telah diterima tersebut. Begitu juga bagi si pemberi hadiah, transaksi penyerahan barang tidak menimbulkan hak baginya untuk menerima pembayaran. Transaksi yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban ini disebut sebagai transaksi unilateral (*unilateral transaction*), atau sering pula disebut sebagai transaksi sepihak (*one way transaction*), atau "transaksi tanpa *quit pro quo*", dimana suatu prestasi tidak diimbangi dengan prestasi balasan.

Apabila suatu negara memberi hadiah atau bantuan ke negara lain, maka transaksi ini termasuk transaksi debit. Sebaliknya, jika suatu negara menerima hadiah atau

- bantuan dari negara lain, termasuk dalam transaksi kredit.
2. Bantuan (*aids*) yang sering kita jumpai dalam pemberitaan media massa, seperti bantuan makanan dan obat-obatan ke negara-negara tertentu yang sedang dilanda bencana alam juga termasuk transaksi sepihak.
 3. Transaksi transfer unilateral adalah pos pengimbang dari transaksi unilateral atau transaksi sepihak. Untuk mengimbangi transaksi sepihak debit atau kredit, maka pos transfer akan menjadi debit dan kredit.
- 4) Transaksi Penanaman Modal Langsung (*Direct Investment*)
Transaksi penanaman modal langsung adalah semua transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham dan jual beli perusahaan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Apabila terjadi pembelian saham atau perusahaan dari tangan penduduk negara lain, maka pos *direct investment* didebit, dan bila terjadi penjualan saham atau penduduk asing yang mendirikan perusahaan di wilayah kekuasaannya, maka pos ini dikredit.
- 5) Transaksi Utang Piutang Jangka Panjang (*Long Term Loan*)
Transaksi utang piutang jangka panjang adalah semua transaksi kredit jangka panjang yang pembayarannya lebih dari satu tahun. Sebagai contoh transaksi penjualan obligasi kepada penduduk negara lain, menerima pembayaran kembali pinjaman-pinjaman jangka panjang yang dipinjamkan kepada penduduk negara lain, atau mendapatkan pinjaman jangka panjang dari negara lain, maka pos ini dicatat di sebelah kredit, dan bila terjadi transaksi pembelian obligasi atau lainnya yang berkaitan dengan utang piutang jangka panjang, maka pos ini dicatat di sebelah debit.
- Transaksi Utang Piutang jangka panjang ini dipisahkan menjadi dua bagian:

- a. Pos hutang piutang jangka panjang pemerintah (*official long term loan*)
 - b. Pos hutang piutang jangka panjang swasta (*private long term loan*)
- 6) Transaksi Utang-piutang jangka pendek (*Short Term Capital*)
- Transaksi utang piutang jangka pendek adalah semua transaksi utang piutang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun. Transaksi ini umumnya terdiri atas transaksi penarikan dan pembayaran surat-surat wesel. Transaksi utang piutang jangka pendek juga dikelompokkan menjadi:
- a. Pos hutang piutang jangka pendek pemerintah (*official short term loan*)
 - b. Pos hutang piutang jangka pendek swasta (*private short term loan*)
- 7) Transaksi Lalu Lintas Moneter (*Monetary Acomodating*)
- Transaksi lalu lintas moneter adalah pembayaran terhadap transaksi-transaksi pada *current account* (transaksi perdagangan, pendapatan modal, dan transaksi unilateral) dan *investment account* (transaksi penanaman modal langsung, utang piutang jangka pendek, dan utang piutang jangka panjang). Apabila jumlah pengeluaran *current account* dan *investment account* lebih besar daripada penerimaannya, maka perbedaan tersebut merupakan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit *monetary acomodating*.

Dari gambaran transaksi internasional tersebut terdapat suatu transaksi yang harus dicatat pada sisi debit dan dicatat pada sisi kredit. Adapun transaksi-transakti yang di debit dan di kredit dalam neraca pembayaran diantaranya adalah sebagai berikut:

| Transaksi Debit | Transaksi Kredit |
|---|---|
| 1. Neraca barang - Impor barang dari Negara lain | 1. Neraca barang - Ekspor barang ke Negara lain |
| 2. Neraca jasa - Pembayaran jasa ke penduduk LN - Pembayaran biaya pariwisata ke LN | 2. Neraca jasa - Penerimaan jasa dari penduduk LN - Penerimaan pariwisata dari LN |
| 3. Neraca Hasil Modal - Pembayaran bunga dan deviden | 3. Neraca Hasil Modal - Penerimaan bunga dan deviden |
| 4. Neraca Modal - Kredit yang diberikan ke LN dan Pembayaran cicilan utang | 4. Neraca Modal - Kredit yang diperoleh dari LN dan Penerimaan cicilan utang |
| 5. Neraca Utang Piutang jangka panjang - Pembelian obligasi dari LN | 5. Neraca Utang Piutang jangka panjang - Penjualan obligasi ke LN |

Dilihat dari sisi strukturnya neraca pembayaran terdiri dari beberapa komponen yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Neraca Transaksi berjalan (*Current Account Balance, CU*)
Bagian dari neraca pembayaran yang mencatat pembayaran dan penerimaan yang ditimbulkan dari perdagangan barang dan jasa, termasuk pendapatan hasil investasi (modal), dan transfer unilateral. Secara garis besar hal-hal yang dicatat dalam transaksi berjalan adalah:
 - a. Neraca Perdagangan (*Balance of Trade*) : Ekspor (exports) dan impor (imports)
 - b. Neraca Jasa-jasa (*services Account*)

c. Neraca Transaksi Sepihak (*Unilateral Account*)

2) Neraca Modal (*Capital Account Balance, CA*)

Neraca modal adalah neraca yang menunjukkan perubahan dalam harta kekayaan (asset) suatu negara di luar negeri dan aset asing di suatu negara, di luar aset cadangan pemerintah. Neraca modal meliputi transaksi penanaman modal langsung, transaksi utang piutang jangka panjang dan transaksi utang piutang jangka pendek.

3) Perubahan cadangan devisa (*Official Reserve Account, OFF*)

Perubahan Cadangan devisa adalah besarnya perubahan aset yang dimiliki oleh bank sentral dan otoritas moneter, biasanya dalam mata uang cadangan yang berbeda, sebagian besar dolar Amerika Serikat, dan pada tingkat lebih rendah Euro, Poundsterling, dan yen Jepang, dan digunakan untuk mendukung kewajibannya, misalnya, mata uang lokal yang dikeluarkan, dan berbagai cadangan bank yang disimpan pada bank sentral, oleh pemerintah atau lembaga keuangan.

4) Selisih perhitungan (*errors and omissions*)

Errors and Omissions sebagai kesalahan yang belum diperhitungkan atau kesalahan yang diabaikan. Pada model perhitungan IMF (*International Monetary Fund*) merupakan neraca penyeimbang yang memberi makna defisit atau surplus neraca pembayaran pada tahun pencatatan.

Didasarkan pada model pendapatan nasional yaitu :

$$Y = C + I + G + NX$$

$$Y - C - G = I + NX$$

$$Y - C - G = S \quad ; \quad S = \text{National Saving}$$

$$S = I + NX$$

$$S - I = NX \dots\dots\dots 1)$$

Persamaan ini memberikan implikasi bahwa jika $I > S$, maka sisi kiri dan kanan akan negatif dan Current Account (CU) akan defisit. Current Account (CU) defisit, berarti disini capital account (CA) surplus yang menunjukkan terjadinya kelebihan investasi (excess investment) yang didanai oleh "foreign saving" yang masuk ke dalam perekonomian domestik (capital inflow) untuk mendukung atau mendanai investasi domestik. Sebaliknya jika $I < S$, maka sisi kiri dan kanan akan positif dan Current Account (CU) akan surplus. Current Account (CU) surplus, berarti disini capital account (CA) defisit yang menunjukkan terjadinya kelebihan saving (excess saving) yang dapat digunakan untuk mendanai "foreign investment" yang keluar dari dalam perekonomian domestik (capital outflow).

Atas dasar tersebut secara aljabar struktur neraca pembayaran dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BOP} &= \text{CU} + \text{CA} + \text{OFF} \dots\dots\dots 3) \\ \text{BOP} &= (X - M) + (\text{CI} - \text{CO}) + \text{OFF} \dots\dots\dots 4) \end{aligned}$$

dimana :

BOP = *Balance of Payment*

CU = *Current Account* = (X - M)

CA = *Capital Account* = (CI - CO)

OFF = *Official Reserve Account*

X - M = Neraca transaksi berjalan yang merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor barang dan jasa.

CI - CO = Neraca transaksi modal yang merupakan selisih antara nilai capital inflow, CI dan capital outflow, CO.

Jika neraca pembayaran berada dalam kondisi keseimbangan, maka neraca pembayaran sama dengan nol. Artinya jumlah antara $\text{CU} = - (\text{CA} + \text{OFF})$. Neraca cadangan resmi menunjukkan jumlah bersih dari cadangan internasional yang harus bergerak antar pemerintah untuk membiayai

transaksi internasionalnya. Pada keadaan kesetimbangan BOP = 0, maka cadangan resmi negara adalah :

$$0 = CU + CA + OFF \text{ atau } 0 = (X - M) + (CI - CO) + (FB)$$

sehingga :

$$CU + CA = - OFF \text{ atau } (X - M) + (CI - CO) = - (FB) \dots 5)$$

Jika jumlah neraca transaksi berjalan dan neraca modal lebih besar daripada nol, maka terjadi surplus permintaan terhadap mata uang domestik. Adanya surplus permintaan terhadap mata uang domestik berdampak pada apresiasi mata uang domestik dan depresiasinya mata uang asing. Jika suatu negara menganut sistem kurs mengambang, maka tidak ada kewajiban untuk ikut menentukan kurs mata uang negaranya. Sehingga tidak terjadi transaksi penjualan maupun pembelian terhadap cadangan devisa resmi negara. Dengan demikian cadangan devisa resmi dapat dianggap nol.

$$\begin{aligned} \text{BoP Balance} &= \text{off} = 0 \\ &= \text{CU surplus} + \text{CA defisit} \\ &= \text{CU defisit} + \text{CA surplus} \end{aligned}$$

Jika neraca pembayaran berada dalam kondisi tidak dalam kesetimbangan, maka BOP akan menjadi surplus atau defisit. Neraca transaksi berjalan dan neraca modal tidak sama dengan nol, maka secara otomatis kurs mata uang asing akan berubah untuk penyesuaian agar BOP menjadi nol. Jika dimisalkan neraca berjalan defisit dan neraca modal adalah sama dengan nol, maka BOP akan menjadi kurang daripada nol, atau BOP akan mengalami defisit. Kondisi ini secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{BOP} = \text{CU} + \text{CA} + \text{OFF} \text{ atau } \text{BOP} = (X - M) + (CI - CO) + (FB)$$

Jika $CU < 0$ dan $CA = 0$ sedangkan $OFF = 0$, maka $CU + 0 + 0 < 0$ maka $\text{BOP} < 0$ atau BOP mengalami defisit.

$$\begin{aligned}\text{BoP Defisit} &= \downarrow \text{off (cad devisa)} \\ &= \text{CU defisit} + \text{private CA defisit}\end{aligned}$$

Jika $\text{CU} > 0$ dan $\text{CA} = 0$ sedangkan $\text{OFF} = 0$, maka $\text{CU} + 0 + 0 > 0$ maka $\text{BOP} > 0$ atau BOP mengalami surplus.

$$\begin{aligned}\text{BOP surplus} &= \uparrow \text{off (cad devisa)} \\ &= \text{CU surplus} + \text{CA surplus} \\ &= \text{CU surplus} + \text{net private capital inflow}\end{aligned}$$

Pada kondisi defisit (surplus) ini ada kelebihan (kekurangan) penawaran mata uang domestik atau ada kelebihan (kekurangan) permintaan mata uang asing. Kondisi ini membutuhkan sejumlah mata uang asing agar dapat menutupi defisit (surplus). Namun pada negara yang menganut sistem kurs mengambang, neraca cadangan devisa resmi adalah sama dengan nol. Sehingga untuk menutupi defisit (surplus) dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar. Di pasar valuta asing akan terjadi perubahan nilai tukar mata uang domestik menjadi lebih rendah (tinggi) atau mata uang domestik mengalami depresiasi (apresiasi). Perubahan nilai tukar ini akan menyebabkan nilai BOP menjadi nol. Dalam hal ini kesetimbangan neraca pembayaran tercapai dengan mekanisme perubahan kurs di pasar valuta asing.

7.3



Nilai Tukar

Dalam konsep perdagangan internasional setiap negara yang tergabung di dalamnya harus menyamakan dulu sistem moneterinya yaitu alat pembayarannya, dalam melakukan transaksi perdagangan digunakanlah kurs valuta asing. Nilai tukar atau kurs menunjukkan seberapa besar rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh uang asing. Kurs adalah harga satu satuan mata uang asing dalam uang dalam negeri. Dengan

kata lain kurs adalah harga suatu mata uang jika ditukarkan dengan mata uang lainnya. Nilai tukar yang sering digunakan adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar. Karena dollar adalah mata uang yang relatif stabil dalam perekonomian.

Para ekonom membagi kurs atas dua macam yaitu kurs nominal dan kurs riil.

- 1) Kurs Nominal (*Nominal Exchange rate, e*) adalah harga relatif dari mata uang suatu negara (domestik) terhadap mata uang negara lainnya (foreign).

Terdapat dua cara untuk menyatakan kurs nominal, yaitu :

- a. Harga relatif dari mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh, rupiah per dollar,

Di Indonesia $e = \text{Rp} / \$ = \text{Harga Rp untuk 1 \$}$

$$e = 1000/\$$$

Artinya untuk membeli satu (1) \$ kita harus membayar sebesar Rp 1.000,-

- b. Harga relatif dari mata uang asing terhadap mata uang domestik. Sebagai contoh, Dollar per Rupiah

Di US : $e = \$ / \text{Rp} = \text{Harga \$ untuk 1 Rp}$

$$e = 1 / 1.000 = 0.001$$

Artinya untuk membeli satu (1) Rp kita harus membayar sebesar 0.001 \$

Kedua cara tersebut menjelaskan bahwa defenisi b) adalah berbanding terbalik dengan defenisi a)

Penetapan nilai kurs $\text{Rp } 1.000 = 1 \$$ dinyatakan $e_{\text{Rp},\$} = 1.000$ yaitu harga untuk 1 \$ yang dinyatakan dalam

Rp.

Penetapan nilai kurs $1 \$ = \text{Rp } 1.000$ dinyatakan $e_{\$, \text{Rp}} = 0,001$ yaitu harga untuk 1 Rp yang dinyatakan dalam

\$.

Dengan demikian jelas bahwa : $e_{\text{Rp},\$} = \frac{1}{e_{\$, \text{Rp}}}$

Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam nilai tukar terdapat dua peningkatan ataupun penurunan nilai mata uang, yaitu sebagai berikut :

- a. *Apresiasi (Appreciation)* dari mata uang domestik adalah *peningkatan* dalam harga mata uang domestik terhadap mata uang asing, yang ditunjukkan oleh adanya *penurunan* dalam nilai tukar.

Di Indonesia awalnya :

$$e = \text{Rp} / \$ = \text{Harga Rp untuk 1 \$}$$

$$e = 1000 / \$$$

Terjadi apresiasi: $e = 500 / \$$

Di US : $e = \$ / \text{Rp} = \text{Harga \$ untuk 1 Rp}$

$$e = 1 / 500 = 0.002$$

Apresiasi nilai mata uang memberikan implikasi bahwa harga-harga produk dalam negeri relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga-harga produk luar negeri. Akibatnya terjadinya peningkatan import dan penurunan ekspor sehingga neraca perdagangan akan bergerak menuju defisit.

- b. *Depresiasi (Depreciation)* dari mata uang domestik adalah penurunan dalam harga mata uang domestik terhadap mata uang asing, yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan dalam exchange rate.

Di Indonesia awalnya :

$$e = \text{Rp} / \$ = \text{Harga Rp untuk 1 \$}$$

$$e = 1000 / \$$$

Terjadi Depresiasi : $e = 2000 / \$$

Di US : $e = \$ / \text{Rp} = \text{Harga \$ untuk 1 Rp}$

$$e = 1 / 2.000 = 0.0005$$

Depresiasi nilai mata uang memberikan implikasi bahwa harga-harga produk dalam negeri relatif murah dibandingkan dengan harga-harga produk luar negeri.

Akibatnya terjadinya peningkatan ekspor dan penurunan import sehingga neraca perdagangan akan bergerak menuju surplus.

- 2) Kurs riil (*Real Exchange rate, ϵ*) yang sering juga disebut dengan *terms of trade* adalah harga relatif dari barang-barang suatu negara (domestik) terhadap barang-barang negara lainnya (foreign).

Secara formal *Real exchange rate* antara mata uang domestik terhadap mata uang asing dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\epsilon = \frac{e.P^*}{P} \dots\dots\dots 6)$$

Dimana ϵ = Real exchange rate, P^* = Harga barang asing dan P = Harga barang domestik .

Dari persamaan 6 memberikan dua implikasi, yaitu :

- a. Untuk nominal exchange rate yang ditetapkan, jika harga produk domestik meningkat dibandingkan dengan harga produk negara asing, $\frac{P^*}{P} > 1$, maka real exchange rate meningkat, artinya bahwa barang negara domestik relative lebih mahal dibandingkan dengan barang negara asing, maka dalam kasus ini akan terjadi *real apresiasi* untuk mata uang domestik.
- b. Apabila harga barang asing meningkat dibandingkan dengan harga barang domestik, $\frac{P^*}{P} < 1$, maka real exchange rate menurun, artinya bahwa barang negara domestik relative lebih murah dibandingkan dengan barang negara asing, maka dalam kasus ini akan terjadi *real depresiasi* untuk mata uang domestik.

Real exchange rate ini mengukur kuantitas daya beli negara asing yang harus dikorbankan untuk setiap unit dari daya

beli negara domestik. Sebagai contoh, misalnya hanya ada satu (1) unit barang yaitu Big Mac. Diasumsikan bahwa harga Big Mac di Indonesia sebesar Rp 200,- sedangkan di Amerika seharga \$ 2,5. Nominal exchange rate sebesar $e = \text{Rp } 1.000/\$$, maka real exchange ratenya adalah :

$$\varepsilon = \frac{e.P^*}{P} = \frac{1.000(2,5)}{200} = 12,5$$

Hal ini berarti bahwa untuk membeli 1 buah Mc. D di U.S. setiap orang dari Indonesia akan membayar sejumlah yang dapat dibelinya sebesar 12.5 Mc.D

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu diantaranya adalah :

1) Faktor Fundamental

Faktor fundamental berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar-negara, ekspektasi pasar dan intervensi Bank Sentral.

2) Faktor Teknis

Faktor teknis berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat-saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara penawaran tetap, maka harga valas akan naik dan sebaliknya.

3) Sentimen Pasar

Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-berita politik yang bersifat insidental, yang dapat mendorong harga valas naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita-berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal.

Sistem nilai tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Sejak tahun 1944 sampai dengan akhir tahun 60-an, system kurs valuta asing atau sistem moneter internasional didasarkan pada Fixed Exchange rate (sistem kurs tetap). Sistem ini dikenal dengan Sistem Bretton Woods, karena

didasarkan pada perjanjian yang disetujui oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dengan Bank Dunia (IBRD). Sistem ini juga dikenal sebagai Standar Tukar Emas, karena banyak negara yang memegang emas dan devisa, khususnya Dollar Amerika sebagai cadangannya. Namun, sejak tahun 60-an sistem ini tidak dipergunakan lagi dan beralih menggunakan sistem kurs mengambang (*floating exchange rate*).

Terdapat beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu:

1) Sistem kurs mengambang (*floating exchange rate*)

Sistem kurs mengambang (*floating exchange rate*) ini adalah sistem kurs yang ditetapkan atas dasar mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal dua macam kurs mengambang, yaitu :

a. Mengambang bebas (*murni*) dimana kurs mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. Sistem ini sering disebut *clean floating exchange rate*, di dalam sistem ini cadangan devisa tidak diperlukan karena otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau memanipulasi kurs.

Keunggulan dari sistem ini adalah (i) Mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih baik dan neraca pembayaran suatu negara, (ii) Adanya aktifitas MD/MS dalam pasar valuta berdasarkan kurs indikasi akan mampu menstabilkan nilai tukar dengan lebih baik sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi, (iii) Devisa yang diperlukan tidak sebesar pada nilai tukar tetap dan (iv) Mampu memadukan sistem tetap dan mengambang sedangkan kelemahannya adalah (i) Devisa harus selalu tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu, (ii) Persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekulan dalam memprediksi dan menetapkan kurs, (iii) Tidak selamanya mampu

mengatasi neraca pembayaran, (iv) Selisih kurs yang terjadi dalam pasar valuta akan mengurangi devisa karena memakai devisa untuk menutupi selisihnya.

- b. Mengambang terkendali (*managed or dirty floating exchange rate*) dimana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya dibutuhkan karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual valas untuk mempengaruhi pergerakan kurs.

Keunggulan dari sistem ini adalah (i) Cadangan devisa lebih aman, (ii) Persaingan pasar ekspor-impor sesuai dengan mekanisme pasar, (iii) Kondisi ekonomi negara lain tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi dalam negeri, (iv) Masalah neraca pembayaran dapat diminimalisir, (v) Tidak ada batasan valas, dan (vi) Equilibrium pasar uang sedangkan kelemahannya adalah (i) Praktik spekulasi semakin bebas, (ii) Penerapan sistem ini terbatas pada negara yang sistem perekonomiannya mapan, masih kurang tepat untuk negara berkembang, dan (iii) Tidak adanya intervensi pemerintah untuk menjaga harga.

- 2) Sistem kurs tertambat (*pegged exchange rate*)

Sistem kurs tertambat (*pegged exchange rate*) adalah suatu sistem nilai tukar yang ditetapkan dengan cara mengaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama "Menambatkan" ke suatu mata uang berarti nilai mata uang tersebut bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Jadi sebenarnya mata uang yang ditambatkan tidak mengalami fluktuasi tetapi hanya berfluktuasi terhadap mata uang lain mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya.

3) Sistem kurs tertambat merangkak (*crawling pegs*)

Sistem kurs tertambat merangkak (*crawling pegs*) adalah suatu sistem nilai tukar dimana dalam sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya secara periodic dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih lama dibanding sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat menghindari kejutan-kejutan terhadap perekonomian akibat revaluasi atau devaluasi yang tiba-tiba dan tajam.

4) Sistem sekeranjang mata uang (*basket of currencies*)

Sistem sekeranjang mata uang (*basket of currencies*) adalah suatu sistem nilai tukar dimana berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang dimasukkan dalam "keranjang" umumnya ditentukan oleh peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Mata uang yang berlainan diberi bobot yang berbeda tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi sekeranjang mata uang bagi suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata uang yang berbeda dengan bobot yang berbeda.

5) Sistem kurs tetap (*fixed exchange rate*)

Sistem kurs tetap (*fixed exchange rate*) adalah suatu sistem nilai tukar dimana dalam sistem ini, suatu Negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli valas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs

tersebut. Kurs biasanya tetap atau diperbolehkan berfluktuasi dalam batas yang sangat sempit.

Keunggulan dari sistem ini adalah (i) Kegiatan spekulasi di pasar uang semakin sempit, (ii) Intervensi aktif pemerintah dalam mengatur nilai tukar sehingga tetap stabil, (iii) Pemerintah memegang peranan penuh dalam pengawasan transaksi devisa, (iv) Kepastian nilai tukar, sehingga perencanaan produksi sesuai dengan hasilnya. Sedangkan kelemahannya adalah (i) Cadangan devisa harus besar, untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar valas, (ii) Kurang fleksibel terhadap perubahan global, dan (iii) Penetapan kurs yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mempengaruhi pasar ekspor impor.

Untuk kasus Negara Indonesia, sejak tahun 1970 hingga sekarang telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu:

1. Sistem kurs tetap (1970- 1978)
 Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 1964, Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap kurs resmi Rp. 250/US\$, sementara kurs uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap US\$. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing.
 Mulai tahun 1970 sampai dengan tahun 1978 Indonesia menerapkan sistem nilai tukar tetap. Selama 8 (delapan) tahun diterapkannya sistem tersebut telah terjadi 3 (tiga) kali devaluasi mata uang rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Devaluasi dilakukan karena nilai mata uang rupiah yang ditetapkan tidak lagi sesuai dengan nilai rielnya.

Dalam periode diberlakukannya sistem *fixed exchange rate*, Pemerintah Indonesia sangat ketat dalam mengontrol devisa. Meskipun usaha mengontrol devisa telah dilakukan dengan ketat, kenyataan menunjukkan Pemerintah Indonesia telah melakukan devaluasi sebanyak tiga kali

yaitu yang pertama kali dilakukan pada tanggal 17 April 1970 dimana nilai tukar rupiah ditetapkan kembali menjadi Rp.378 per dollar AS. Devaluasi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1971 menjadi Rp. 115 per dollar AS dan yang ketiga pada tanggal 15 November 1978 dengan nilai tukar sebesar Rp. 625 per satu dollar AS.

2. Sistem mengambang terkendali (1978-Juli 1997)

Pada masa ini, nilai tukar rupiah didasarkan pada sistem sekeranjang mata uang (*basket of currencies*). Kebijakan ini diterapkan bersama dengan dilakukannya devaluasi rupiah pada tahun 1978. Dengan sistem ini, pemerintah menetapkan kurs indikasi (pembatas) dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Pemerintah hanya melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau bawah dari spread.

Diambilnya kebijakan nilai tukar terkendali pada November 1978 diharapkan dapat mewujudkan tercapainya nilai tukar rupiah yang realistis. Dengan sifat "mengambang" dapat dicapai suatu nilai yang wajar berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar valuta, dan dengan sifat "terkendali" diharapkan fluktuasinya dapat diatur (*orderly manner*) sehingga unsur spekulasi yang dapat menghambat ekspor dan kestabilan moneter serta merangsang impor yang berlebihan dapat dihindari. Namun demikian, perkembangan nilai tukar rupiah tersebut sampai akhir tahun 1982/1983 belum mencerminkan nilai yang sesungguhnya (*over-valued*) sehingga menurunkan daya saing komoditi ekspor Indonesia. Oleh karena itu, pada 30 Maret 1983 pemerintah kembali melakukan devaluasi rupiah dari Rp702 menjadi Rp970 per USD.

Meskipun pemerintah melakukan devaluasi pada Maret 1983, sistem nilai tukar mengambang terkendali ini

berlangsung cukup lama yaitu sejak tahun 1978 sampai dengan Juli 1997. Dengan sistem mengambang terkendali (*managed floating*) nilai tukar rupiah diambangkan terhadap sekeranjang mata uang (*basket of currencies*) negara mitra dagang utama Indonesia. Sejak sistem ini dilaksanakan, pemerintah menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan rentang tertentu. Selanjutnya, pada tahun 1992 sampai bulan Agustus 1997 fleksibilitas nilai tukar rupiah semakin dikembangkan dengan penerapan *crawling band*.

3. Sistem kurs mengambang (14 Agustus 1997-sekarang)
Sejak pertengahan Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap US\$ semakin melemah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang maka pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi (sistem nilai tukar mengambang terkendali) dan mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate*) pada tanggal 14 Agustus 1997. Penghapusan rentang intervensi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan intervensi pemerintah terhadap rupiah dan memantapkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam negeri.

Soal dan Latihan  **Pertanyaan Untuk Diskusi dan Latihan**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan neraca pembayaran?
2. Coba Saudara diskusikan dan Identifikasi bagaimana struktur dari Neraca Pembayaran Indonesia? jelaskan!
3. Coba saudara bedakan konsep antara nilai tukar nominal dan riil. Selanjutnya diskusikan bagaimana suatu nilai tukar akan mengalami depresiasi ataupun

- apresiasi serta bagaimana dampaknya terhadap masalah ekspor impor
4. Jelaskan dan bedakan sistem nilai tukar yang Saudara ketahui.

STUDI KASUS

Coba Saudara lakukan penelitian mini terkait dengan neraca pembayaran di Indonesia. Deskripsikan secara rinci dan jelas tentang kondisi neraca pembayaran Indonesia selama dua tahun terakhir. Adakah perubahan dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

UANG DAN LEMBAGA KEUANGAN

Capaian Pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari bab 8 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep uang dan bank.

Dalam bab ini Sdr diharapkan dapat mencapai kompetensi dasar sebagai berikut :

1. Dapat mengidentifikasi dan menjelaskan konsep dari uang dan fungsinya serta proses penciptaan uang terjadi.
2. Dapat mengidentifikasi dan mendemonstrasika faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang
3. Dapat mengidentifikasi dan mendemonstrasika faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang
4. Dapat menjelaskan konsep lembaga keuangan bank dan non bank
5. Dapat mendeskripsikan dan menganalisis tentang kebijakan moneter

8.1



Defenisi Uang dan Fungsi Uang

Para ekonom memberikan pengertian uang sebagai segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang dan jasa ataupun dalam pembayaran utang. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya uang digunakan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum.

Dalam aktivitas perekonomian selalu terjadi proses spesialisasi dan pertukaran. Efisiensi pertukaran terjadi disebabkan karena adanya penggunaan uang sebagai perantara dalam tukar menukar. Pada awal terjadinya transaksi, proses pertukaran suatu barang menggunakan sistem barter. Barter yaitu proses yang terjadi dalam perekonomian dimana satu barang dapat dipertukarkan secara langsung dengan barang lainnya. Sistem barter yang terjadi pada saat itu ternyata tidak efisien dalam melakukan transaksi pertukaran, oleh karena itu keberadaan uang dapat digunakan sebagai alternatif transaksi yang lebih mudah digunakan dibandingkan dengan sistem barter.

Syarat-syarat uang

Uang mempunyai peranan yang sangat tinggi terhadap jalannya roda perekonomian suatu bangsa, oleh karena itu suatu benda yang dapat dijadikan sebagai "uang", harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya yaitu (1) Benda itu harus diterima secara umum (*acceptability*), (2) Benda itu harus memiliki nilai tinggi atau stabil, (3) Benda yang dijadikan uang harus ada jaminan dari pemerintah atas keberadaannya, (4) Benda yang dijadikan uang terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak atau bahannya harus tahan lama (*durability*), (5) kualitas dari benda yang dijadikan uang cenderung sama

(uniformity), dan (6) Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), (7) Uang mudah dibawa (*portable*), (8) Uang mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), (9) Uang memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).

Jenis-Jenis Uang

Uang menurut nilainya dibedakan menjadi uang penuh (*full bodied money*) atau sering juga disebut dengan uang komoditas (*commodity money*) dan uang tanda atau disebut juga uang flat (*flat money* atau *token money*), sedangkan menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral.

1. Uang Penuh (*Full Bodied Money*)

Uang penuh (*full bodied money*) disebut juga dengan uang komoditas (*commodity money*) adalah uang yang nilainya sebesar nilai dari komoditas itu sendiri. Misalnya pada jaman dulu uang perunggu nilainya lebih kecil dari uang perak dan uang perak nilainya lebih kecil dari nilai uang emas.

2. Uang Tanda (*Flat money / Token Money*)

Uang tanda atau *token money* adalah komoditas yang diterima sebagai uang, namun nilai nominalnya jauh lebih besar dari nilai komoditas itu sendiri (nilai intrinsiknya). Misalnya uang kertas dengan nilai nominal Rp 50.000,-. Nilai nominal uang kertas tersebut lebih tinggi dari nilai kertasnya, namun mengapa dapat diterima oleh masyarakat?. Hal ini karena uang kertas telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai uang yang sah untuk dipergunakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan jenisnya, maka uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral

1. Uang Kartal

Uang kartal adalah alat pembayaran yang sah dan digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Uang kartal ini terdiri dari dua jenis, yaitu :

1) Uang Kertas (Uang Fiat)

Uang kertas (uang fiat) adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas yang disahkan oleh Bank Indonesia menurut undang-undang yang telah ditetapkan. Contoh adalah uang kertas Rp 100.000,00.

2) Uang Logam

Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam biasanya terbuat dari emas atau perak. Uang logam ini memiliki nilai yang cenderung lebih tinggi dan stabil disebabkan karena bentuknya mudah dikenali dan sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil. Uang logam ini memiliki tiga (3) macam nilai, yaitu :

- a. Nilai instrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang dapat digunakan untuk mata uang
- b. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang misalnya Rp 100 atau Rp 1.000,00
- c. Nilai tukar, yaitu kemampuan uang untuk dapat dikeluarkan dengan suatu barang (daya beli uang).

2. Uang Giral

Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan. Untuk menarik uang giral ini pada umumnya dipergunakan cek. Berdasarkan karakteristiknya uang giral ini termasuk dalam *near money* atau uang hampir likuid, artinya untuk dapat digunakan tidak perlu ditukarkan atau dicairkan terlebih dahulu dan uang giral

ini bukanlah substitusi sempurna bagi uang kertas ataupun uang logam.

Berdasarkan konsep tersebut di atas, uang dapat dijabarkan melalui fungsinya sebagai (1) alat tukar atau transaksi (*medium of exchange*) (2) alat penyimpanan (*store of value*), dan (3) satuan unit hitung (*unit of account*)

Uang sebagai Alat tukar atau Transaksi (Medium of Exchange)

Uang berfungsi sebagai alat tukar atau transaksi (*medium of exchange*). Hal ini menunjukkan bahwa uang digunakan untuk membayar barang-barang dan jasa. Penggunaan uang sebagai alat tukar mengarahkan pada proses efisiensi dalam perekonomian, yaitu adanya pengurangan biaya transaksi. Dalam konsep barter, biaya transaksinya sangat tinggi karena setiap orang terdapat keinginan untuk saling melengkapi (*double coincidence of want*) diantara dua barang yang berlainan. Artinya bahwa setiap orang akan mencari untuk menemukan seseorang yang menginginkan barangnya sesuai dengan keinginannya dalam waktu yang sama, tetapi jika seseorang tidak ditemukannya maka hal ini menyebabkan harus dicari pihak lain yang memiliki barang yang dibutuhkan dan ini perlu biaya informasi dan biaya transaksi. Tetapi dengan uang seorang yang memiliki barang tersebut dapat menjualnya untuk memperoleh uang dan uang yang diperolehnya dipergunakan untuk membeli barang yang diinginkannya.

Dengan berfungsinya uang sebagai alat tukar, maka setiap orang yang memerlukan barang dan jasa akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan barang lagi, tetapi cukup dengan mempergunakan uang sebagai alat tukar. Hal ini tentunya amat mempermudah dan mempercepat kegiatan pertukaran dalam perekonomian modern dan biaya transaksi menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pola

barter. Kondisi yang harus dipenuhinya, yaitu bahwa uang harus dapat diterima dan mendapat jaminan kepercayaan. Jaminan kepercayaan ini pada dasarnya diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum

Uang sebagai alat penyimpanan (store of value)

Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*). Hal ini menunjukkan bahwa uang memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang dalam meningkatkan daya beli. Sehingga ketika seseorang menerima sejumlah uang atas semua transaksi yang dilakukan, maka ia dapat menyisihkan uangnya untuk digunakan membeli barang-barang dan jasa di masa mendatang

Uang sebagai satuan hitung (unit of account)

Uang berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*). Hal ini menunjukkan bahwa uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan juga dapat digunakan untuk menghitung besar kecilnya pinjaman. Dengan demikian uang sebagai alat hitung akan mampu memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya *double coincidence of wants* (kehendak ganda yang selaras) tidak diperlukan lagi, sehingga uang berperan untuk meperlancar pertukaran.

Contoh, jika kita mempunyai 5 barang yaitu A,B,C,D dan E dan kemudian kita tahu harga dari kelima barang tersebut adalah sebagai berikut, harga barang A = Rp 100.000,-; Harga barang B = Rp 50.000,-; Harga barang C = Rp 200.000,-; Harga barang D = Rp 10.000,-; dan Harga barang E = Rp 500.000,- maka dapat diketahui jumlah uang yang diperlukan

untuk mendapatkan barang-barang tersebut.

Selain ketiga fungsi tersebut, uang juga memiliki fungsi lainnya yang sering disebut dengan fungsi turunan dari uang. Fungsi turunan dari uang itu adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan (modal) dan alat untuk meningkatkan status sosial seseorang dimasyarakatnya.

8.2  **Fungsi Permintaan Uang**

Teori yang menjelaskan mengenai permintaan uang dapat dibedakan menjadi Teori Klasik dan Teori Keynesian.

8.2.1 Teori Permintaan Uang Klasik

Menurut pandangan ekonom Klasik yang mendasari perekonomian pada sistem bebas berusaha (*Laissez Faire*) adalah *self-regulating*, artinya mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangan secara otomatis. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam perekonomian. Dalam teori uang, kaum klasik memandang bahwa fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar. Menurut teori tersebut, jika uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, maka uang bersifat netral (*money neutrality*), artinya yang mempengaruhi uang hanyalah tingkat harga. Pendapat tersebut dinyatakan dalam persamaan kuantitas uang Klasik (*Classical Quantity of money*), yang dikemukakan oleh Irving Fisher.

$$M \times V = P \times T \dots\dots\dots 1)$$

di mana:

M = jumlah uang beredar

V = velositas uang

P = tingkat harga umum

T = jumlah unit transaksi

Persamaan 1) tersebut menunjukkan bahwa jumlah uang beredar yang dikalikan dengan velositas uang akan sama dengan hasil perkalian antara tingkat harga umum dengan jumlah unit transaksi. Velositas uang atau kecepatan peredaran uang merupakan konsep yang menunjukkan berapa kali dalam setahun uang berputar di dalam sebuah perekonomian.

Contoh 8.1

Jumlah uang beredar 100 juta, kecepatan peredaran uang 0,75 dan jumlah transaksi 750 ribu.

- a. Berapakan Nilai Uang
- b. Jika uang naik 2 kali dan dalam jangka pendek, kecepatan uang beredar dianggap tetap serta yang lain tetap, berapa nilai uang?

Jawab :

- a. Dengan menggunakan persamaan 1) yaitu $M \times V = P \times T$, maka diperoleh nilai uang sebagai berikut :

$$MV = PT$$

$$100.000.000 \times 0,75 = P \times 750$$

$$P = \frac{100.000.000 \times 0,75}{750.000}$$

$$P = \frac{75.000.000}{750.000} = 100$$

- b. Jika uang naik 2 kali , sehingga $M = 2 \times 100.000.000$, maka nilai uang akan berubah menjadi sebagai berikut :

$$MV = PT$$

$$200.000.000 \times 0,75 = P \times 750$$

$$P = \frac{200.000.000 \times 0,75}{750.000}$$

$$P = \frac{150.000.000}{750.000} = 200$$

Contoh 8.2

Jika dalam sebuah perekonomian suatu negara hanya memproduksi mesin, dalam setahun dihasilkan 5.000 unit mesin. Harga per unit mobil adalah Rp 25 juta, sedangkan velositas uang adalah 8 kali setahun, maka

- Berapa Jumlah uang yang dibutuhkan ?
- Jika produksi mesin meningkat 25%, sementara variabel lainnya tetap, berapa jumlah uang yang dibutuhkan?

Jawab :

- Dengan menggunakan persamaan 1) yaitu $M \times V = P \times T$, maka diperoleh jumlah uang yang dibutuhkan sebagai berikut :

$$MV = PT$$

$$8M = 25.000.000 \times 5.000$$

$$M = \frac{25.000.000 \times 5.000}{8}$$

$$M = \frac{125.000.000.000}{8} = 15.625.000.000$$

- Jika produksi mesin meningkat 25% , sehingga $T = (25\% \times 5000) + 5000$, maka jumlah uang yang dibutuhkan akan berubah menjadi sebagai berikut :

$$MV = PT$$

$$8M = 25.000.000 \times 6.250$$

$$M = \frac{25.000.000 \times 6.250}{8}$$

$$M = \frac{156.250.000.000}{8} = 19.531.250.000$$

Berdasarkan contoh di atas jika produksi mesin meningkat 20%, *ceteris pariblis*, maka jumlah uang yang dibutuhkanpun meningkat 20%.

Permasalahan yang sering ditimbulkan dari proses perhitungan diatas terletak pada pengukuran unit transaksi (T). Pengukuran unit transaksi atau T memungkinkan terjadinya penghitungan ganda, karena *output* yang dihasilkan bervariasi. Untuk mengurangi kesulitan tersebut, maka nilai untuk T yang digunakan adalah nilai *output* riil, Y, (PDB riil), sehingga persamaan 1) akan berubah menjadi sebagai berikut :

$$M \times V = P \times Y \dots\dots\dots 2)$$

di mana:

M = jumlah uang beredar

V = velositas uang

P = tingkat harga umum

Y = PDB riil

Persamaan 2) tersebut menunjukkan bahwa jumlah uang beredar yang dikalikan dengan velositas uang akan sama dengan hasil perkalian antara tingkat harga umum dengan PDB riil. Dalam jangka panjang, perubahan dalam struktur perekonomian tentunya akan mempengaruhi tingkat kecepatan peredaran uang dan dengan demikian kebalikan dari V yaitu 1/V akan sama dengan M/PT. Hal ini mencerminkan bahwa 1/V = M/PT merupakan ukuran sejumlah uang yang diperlukan pada setiap unit transaksi atau lebih dikenal dengan sebutan laju perubahan (rate of turn over) penggunaan setiap unit uang setiap waktu. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan 2) dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut :

$$M = \frac{1}{V} \cdot PY \dots\dots\dots 3)$$

Persamaan 3) menunjukkan bahwa jumlah uang beredar merupakan fungsi dari pendapatan dengan proporsi kebutuhan uang terhadap pendapatan sebesar 1/V. Jika 1/V dimisalkan dengan k serta fungsi uang semata-mata sebagai

alat transaksi dan velositas diasumsikan tetap, maka dalam Persamaan 3) di atas dapat dirubah menjadi:

$$\left(\frac{M}{P}\right)^d = kY \dots\dots\dots 4)$$

dimana:

$(M/P)^d$ = permintaan uang riil

M = nilai nominal uang

P = tingkat harga

Y = pendapatan atau *output*

k = proporsi permintaan uang terhadap pendapatan atau *output*

Persamaan 4) menunjukkan bahwa jumlah uang yang diminta berbanding proporsional dengan tingkat *output* atau pendapatan. Bila tingkat *output*, meningkat, maka permintaan uang meningkat, begitu juga sebaliknya. Jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat bukanlah semata-mata nilai nominalnya, tetapi juga daya belinya, yaitu nilai nominal dibandingkan dengan tingkat harga (*real money balances*).

8.2.2 Teori Permintaan Uang Keynesian

Keynes berpendapat bahwa sistem *laissez faire* murni tidak bisa dipertahankan. Pada tingkat makro, pemerintah harus secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi "Full Employment"-nya, sebab mekanisme otomatis ke arah posisi tersebut tidak bisa diandalkan secara otomatis. Dalam teori uang Keynes menjelaskan terdapat tiga motif orang memegang uang, yaitu motif untuk transaksi (*transaction motive*), motif berjaga-jaga (*precautivary motive*), dan motif memperoleh keuntungan (*speculation motive*).

a. *Motivasi Transaksi (Transaction Motive)*

Permintaan uang untuk transaksi dalam teori Keynes adalah sama dengan permintaan uang dalam teori Klasik. Artinya bahwa permintaan akan uang akan sangat tergantung kepada tingkat pendapatannya, sebab masyarakat memegang uang (*holding money*) dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Permintaan uang untuk transaksi berhubungan positif dengan tingkat pendapatan; Bila pendapatan meningkat, maka kebutuhan uang untuk transaksi meningkat.

b. *Motifi Berjaga-jaga (Precautionary Motive)*

Motif berjaga-jaga berkaitan erat dengan keinginan orang dalam memegang uang dengan tujuan untuk persiapan dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan dan atau tak terduga, sehingga motif ini berkaitan dengan keinginan keamanan (*security*) karena menyangkut transaksi yang tidak terencana. Dengan demikian permintaan uang untuk berjaga-jaga ini diperlukan untuk mencadangkan pengeluaran yang mendadak, dimana besar kecilnya cadangan tersebut akan sangat tergantung kepada tingkat pendapatannya. Permintaan uang untuk berjaga-jaga ini berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Jika pendapatan meningkat maka permintaan akan uang untuk berjaga-jaga juga meningkat.

Permintaan uang dengan motif untuk transaksi dan berjaga-jaga ini ternyata berhubungan secara positif dengan tingkat pendapatan. Oleh karena itu kedua motif tersebut secara matematika dapat dinyatakan dalam fungsi berikut:

$$L_1 = f(Y) \text{ atau } L_1 = kY \dots\dots\dots 5)$$

$$\frac{\partial L_1}{\partial Y} > 0$$

di mana:

L_1 = Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga

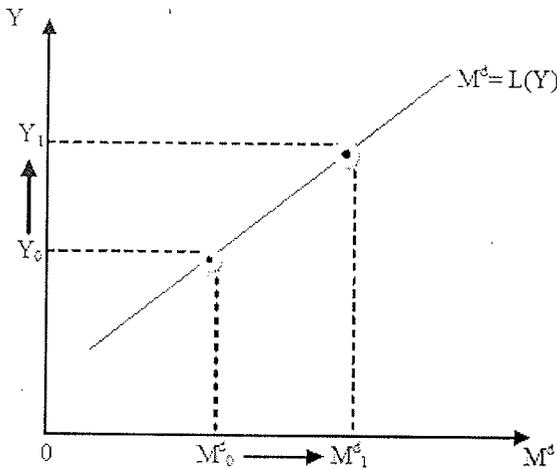
Y = pendapatan

k = Proporsi permintaan uang terhadap pendapatan atau *output*

Persamaan 5) ini menunjukkan bahwa permintaan akan uang sangat tergantung kepada tingkat pendapatan dan jika tingkat pendapatan naik, maka permintaan uang akan naik.

Secara grafik persamaan (4) atau (5) dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 8.1
Permintaan Uang untuk Motif transaksi dan berjaga-jaga



Gambar 8.1 menunjukkan bahwa pada saat Y_0 , permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga berada pada tingkat M_0^d dan pada saat pendapatan naik menjadi Y_1 , maka

permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga akan naik dan berada pada tingkat M^d .

c. *Motif untuk memperoleh keuntungan*

Permintaan uang dengan motif untuk memperoleh keuntungan ini menunjukkan bahwa seseorang kadang-kadang ingin meminta uang yang akan dipergunakan untuk melakukan investasi atau seseorang atau perusahaan ingin memegang uang karena adanya keinginan memperoleh keuntungan yang besar dari suatu kesempatan investasi yang bersifat likuid. Dengan demikian factor yang menentukan tinggi rendahnya permintaan akan uang ini akan sangat tergantung kepada tingkat bunga nominal (r) sebagai opportunity cost (biaya peluang) dari memegang uang dan merupakan biaya yang timbul karena adanya preferensi dalam memegang uang. Hal ini menunjukkan bahwa jika tingkat bunga tinggi maka permintaan uang akan menurun. Secara matematis pernyataan tersebut dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut :

$$L_2 = f(r) \text{ atau } L_2 = m_0 - m_1 r \dots \dots \dots 6)$$

$$\frac{\partial L_2}{\partial r} < 0$$

di mana:

L_2 = Permintaan uang untuk spekulasi

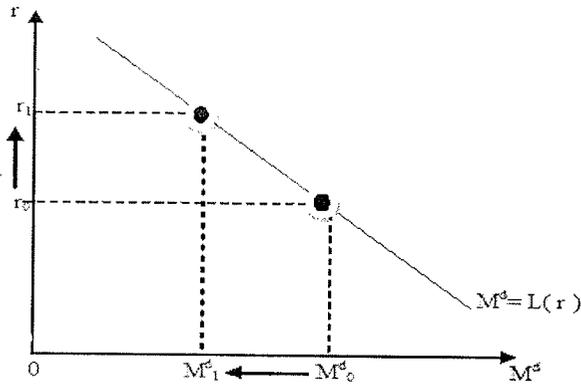
r = Tingkat Bunga nominal

m_0 dan m_1 = koefisien

Persamaan 6) ini menunjukkan bahwa permintaan akan uang untuk spekulasi sangat tergantung kepada tingkat bunga nominal dan jika tingkat bunga nominal naik, maka permintaan uang untuk spekulasi akan turun.

Secara grafik persamaan (6) dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 8.2
Permintaan Uang untuk Motif spekulasi



Gambar 8.2 menunjukkan bahwa pada saat r_0 , permintaan uang untuk spekulasi berada pada tingkat M^d_0 dan pada saat tingkat bunga naik menjadi r_1 , maka permintaan uang untuk spekulasi akan turun dan berada pada tingkat M^d_1 .

Berdasarkan ketiga motif tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa permintaan akan uang (M^d) merupakan penjumlahan dari L_1 dan L_2 , sehingga persamaan permintaan akan uang dapat ditulis sebagai berikut :

$$M^d = L(r, Y) \text{ atau } M^d = kY + m_0 - m_1r \dots\dots\dots 7)$$

$$\frac{\partial M^d}{\partial Y} > 0; \frac{\partial M^d}{\partial r} < 0$$

Dimana ;

M^d = Permintaan akan uang ($M^d = L_1 + L_2$)

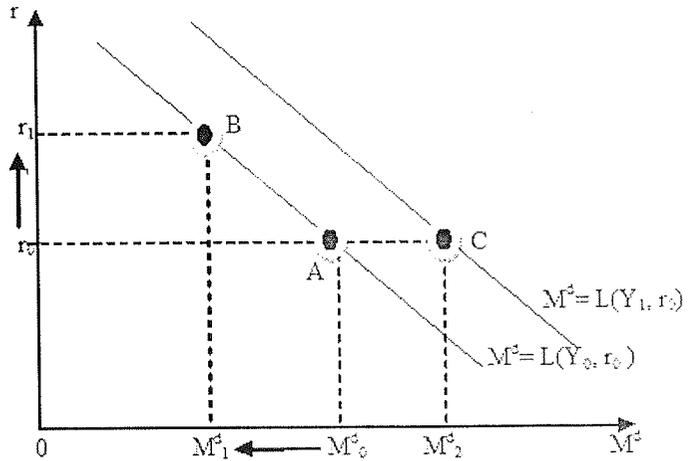
L = likuiditas

R = tingkat bunga nominal

Y = tingkat pendapatan

Secara grafik persamaan (7) dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 8.3
Permintaan Uang

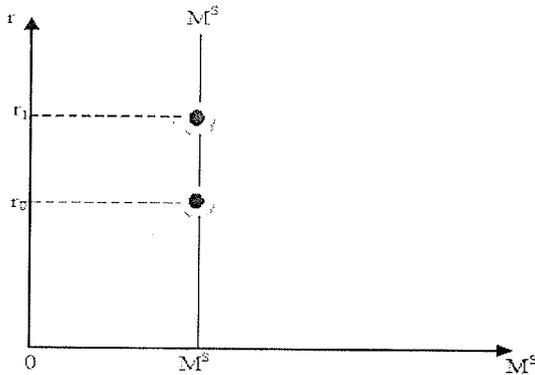


Gambar 8.3 menunjukkan bahwa pada titik A saat r_0 dan Y_0 , maka permintaan uang berada pada tingkat M_0^d dan pada saat tingkat bunga naik menjadi r_1 sedangkan Y konstan pada Y_0 , maka peningkatan tingkat bunga dari r_0 ke r_1 akan menyebabkan penurunan pada permintaan uang dan kurva permintaan uang akan bergerak dari titik A ke titik B. Sedangkan jika diasumsikan tingkat bunga konstan pada r_0 dan tingkat pendapatan meningkat dari Y_0 ke Y_1 , maka permintaan akan uang meningkat dan kurva akan bergeser ke sebelah kanan pada titik C.

8.3 Fungsi Penawaran Uang

Penawaran uang (money supply) dalam teori moneter mempunyai arti yang sama dengan jumlah uang beredar (money stock). Jumlah uang beredar adalah total persediaan uang dalam suatu perekonomian, berupa uang kartal maupun uang giral dan uang kuasi. Jumlah uang beredar dalam arti sempit disimbolkan dengan M_1 berupa uang kartal ditambah dengan uang giral, sedangkan dalam arti luas disimbolkan dengan M_2 berupa M_1 ditambah dengan uang kuasi. Jumlah uang beredar pada dasarnya ditawarkan dan ditentukan oleh Bank Sentral yang secara grafik digambarkan sebagai berikut :

Gambar 8.4 Penawaran Uang



Jumlah Uang Beredar (JUB) tidak seluruhnya ditentukan oleh Pemerintah. Perilaku bank-bank dan masyarakat umum ikut menentukan pula proses timbulnya uang beredar, meskipun pemerintah masih tetap merupakan pelaku yang paling menentukan. Dua pengertian tentang uang beredar; telah dibahas sebelumnya yaitu tentang *Narrow money*, uang kartal dan uang giral dan *Broad money*, *narrow money*

ditambah *uang quasi*, dimana *Quasi money* mencakup saldo deposito berjangka dan simpanan tabungan di bank.

Proses penciptaan uang terjadi di dalam sistem perbankan, di mana bank yang pertama kali memperoleh deposito akan menyalurkannya kepada bank berikutnya (bank kedua) sebagai pinjaman. Bank kedua selanjutnya akan menyalurkan pinjaman yang diperolehnya dari bank pertama kepada bank ketiga. Bank ketiga selanjutnya akan menyalurkan pinjaman yang diperolehnya dari bank kedua kepada bank keempat dan begitu seterusnya hingga jumlah tak terhingga. Dalam penyaluran pinjaman ke bank tersebut, besarnya deposito yang dapat diubah menjadi pinjaman akan tergantung kepada besar giro wajib minimum, disingkat GWM (*reserve requirement ratio*, disingkat RRR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. jika ketentuan giro wajib minimumnya (GWM atau RRR) 15%, maka dari setiap 15 unit deposito yang diterima bank, hanya 85%-nya yang boleh disalurkan sebagai pinjaman dan jika GWM sebesar 25%, maka hanya 75% dari deposito yang dapat disalurkan sebagai pinjaman.

Berikut adalah contoh sederhana tentang proses penciptaan uang yang terjadi dalam system perbankan. Dengan asumsi jumlah bank yang aktif dalam perekonomian tidak terbatas dan ketentuan GWM sebesar 25%, neraca bank sangat sederhana terdiri dari cadangan wajib minimum di sisi aset sedangkan setiap tambahan deposito akan memperbesar nilai kewajiban (*liabilities*).

Bank Pertama

Dimisalkan Bank pertama menerima depositi sebesar 2.000 unit. Dari deposito tersebut akan disalurkan menjadi pinjaman bagi bank kedua sebesar $(75\% \times 2000 \text{ unit} = 1.500 \text{ unit})$. Hal ini terjadi karena GWM sebesar 25% dan dengan demikian komposisi aset akan ditunjukkan dalam neraca bank pertama adalah cadangan wajib 500 dan pinjaman sebesar 1.500

Neraca Bank Pertama

| Aset (<i>Assets</i>) | | | Kewajiban (<i>Liabilities</i>) | |
|------------------------|-------|-------|----------------------------------|-------|
| Cadangan | Wajib | 500 | Deposito | 2.000 |
| Kredit | | 1.500 | | |

Bank Kedua

Bank pertama sebagai penerima pinjaman akan menyimpannya dalam bentuk deposito di bank kedua sebesar 1.500 dan oleh bank kedua akan disalurkan kepada peminjam yang lain, dengan dana yang dapat dipinjamkan adalah sebesar $(75\% \times 1.500 = 1.125$. Hal ini terjadi karena GWM sebesar 25% dan dengan demikian komposisi aset akan ditunjukkan dalam neraca bank kedua adalah cadangan wajib 375 dan pinjaman sebesar 1.125

Neraca Bank kedua

| Aset (<i>Assets</i>) | | | Kewajiban (<i>Liabilities</i>) | |
|------------------------|-------|-------|----------------------------------|-------|
| Cadangan | Wajib | 375 | Deposito | 1.500 |
| Kredit | | 1.125 | | |

Bank Ketiga

Bank kedua sebagai penerima pinjaman akan menyimpannya dalam bentuk deposito di bank ketiga sebesar 1.125 dan oleh bank ketiga akan disalurkan kepada peminjam yang lain, dengan dana yang dapat dipinjamkan adalah sebesar $(75\% \times 1.125 = 844$. Hal ini terjadi karena GWM sebesar 25% dan dengan demikian komposisi aset akan ditunjukkan dalam neraca bank ketiga adalah cadangan wajib 281 dan pinjaman sebesar 844

Neraca Bank Ketiga

| Aset (<i>Assets</i>) | | | Kewajiban (<i>Liabilities</i>) | |
|------------------------|-------|-----|----------------------------------|-------|
| Cadangan | Wajib | 281 | Deposito | 1.125 |
| Kredit | | 844 | | |

Bank Keempat

Bank ketiga sebagai penerima pinjaman akan menyimpannya dalam bentuk deposito di bank keempat sebesar 844 dan oleh bank keempat akan disalurkan kepada peminjam yang lain, dengan dana yang dapat dipinjamkan adalah sebesar $(75\% \times 844 = 633)$. Hal ini terjadi karena GWM sebesar 25% dan dengan demikian komposisi aset akan ditunjukkan dalam neraca bank keempat adalah cadangan wajib 211 dan pinjaman sebesar 633

Neraca Bank Keempat

| Aset (<i>Assets</i>) | | | Kewajiban (<i>Liabilities</i>) | |
|------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----|
| Cadangan | Wajib | 211 | Deposito | 844 |
| Kredit | | 633 | | |

Bank Kelima

Bank keempat sebagai penerima pinjaman akan menyimpannya dalam bentuk deposito di bank kelima sebesar 633 dan oleh bank kelima akan disalurkan kepada peminjam yang lain, dengan dana yang dapat dipinjamkan adalah sebesar $(75\% \times 633 = 475)$. Hal ini terjadi karena GWM sebesar 25% dan dengan demikian komposisi aset akan ditunjukkan dalam neraca bank keempat adalah cadangan wajib 158 dan pinjaman sebesar 475

Neraca Bank Kelima

| Aset (Assets) | | | Kewajiban (Liabilities) | |
|---------------|-------|-----|-------------------------|-----|
| Cadangan | Wajib | 158 | Deposito | 633 |
| Kredit | | 475 | | |

Begitu seterusnya untuk bank keenam, ketujuh hingga bank ke-n dan dengan demikian akan terjadi multiplier efek dari bertambahnya deposito sebesar 2.000 sampai putaran tak terhingga seperti ditunjukkan dalam tabel berikut :

| Bank | Penambahan Deposito |
|-----------------|--------------------------|
| Bank Pertama | 2.000 |
| Bank Kedua | $1.500 = 2.000(1-GWM)$ |
| Bank Ketiga | $1.125 = 2.000(1-GWM)^2$ |
| Bank Keempat | $844 = 2.000(1-GWM)^3$ |
| Bank Kelima | $633 = 2.000(1-GWM)^4$ |
| Dan Seterusnya | |
| Total Akumulasi | 8.000 |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dampak dari setiap penambahan deposito adalah penambahan pinjaman yang akhirnya menambah jumlah uang beredar hingga berjumlah 8.000. Dengan demikian jika GWM sebesar 25%, maka jumlah uang beredar akan menjadi 8.000

Berdasarkan contoh diatas dapat disimpulkan bahwa proses penciptaan uang beredar berawal dari timbulnya uang inti (reserve money), uang inti adalah seluruh uang yang dikeluarkan oleh pemerintah (bank sentral) ditambah saldo rekening koran milik bank-bank (atau masyarakat) pada bank sentral. Uang inti bisa pula dilihat sebagai penjumlahan antara uang kartal dengan cadangan bank (bank reserve).

Proses penciptaan uang seperti yang telah dibahas di atas dapat dijelaskan melalui model matematis sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan-persamaan berikut dibawah ini, dengan asumsi dasarnya adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah uang beredar yang digunakan notasi M_1 .
- b. Uang primer (*monetary base*) digunakan notasi B dengan maknanya bahwa uang primer adalah jumlah uang yang dipegang masyarakat dalam bentuk uang kartal (C) dan cadangan wajib (R). Uang primer dikontrol oleh bank sentral.
- c. Giro wajib minimum (GWM) (*reserve deposit ratio* atau *reserve requirement ratio*) yang besarnya ditentukan oleh bank sentral dengan notasi rr .
- d. Rasio uang kartal giral (*currency deposit ratio*) dengan notasi cr , yang menggambarkan pilihan bentuk uang yang dapat dipegang masyarakat, misalnya $x\%$ disimpan dalam bentuk uang kartal dan $y\%$ disimpan dalam bentuk uang giral (D)

Berdasarkan symbol-simbol tersebut, persamaan model matematis penciptaan uang adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah uang beredar (M_1) merupakan penjumlahan antara jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat dalam bentuk uang kartal (C) dengan jumlah uang yang disimpan di bank dalam bentuk deposit (D), secara matematis ditulis :

$$M_1 = C + D \dots\dots\dots 8)$$

- b. Jumlah uang yang dipegang masyarakat dalam bentuk kartal merupakan hasil perkalian antara *currency deposit ratio*, cr dengan deposit (D), yang ditunjukkan dalam persamaan berikut :

$$C = cr \times D \dots\dots\dots 9)$$

Substitusikan persamaan 9) ke Persamaan 8), sehingga dihasilkan persamaan berikut :

$$M_1 = (cr \times D) + D$$

$$= (cr + 1)D$$

$$D = \frac{M_1}{(1 + cr)} \dots\dots\dots 10)$$

Persamaan 10) menunjukkan adanya hubungan proposional antara jumlah uang giral dengan jumlah uang beredar.

- c. Uang Primer atau Monettare Base(B) merupakan penjumlahan antara jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat sebagai mata uang C dan oleh bank sebagai cadangan R. Dibentuk dalam matematika menjadi

$$B = C + R \dots\dots\dots 11)$$

Dimana :

- B = Uang primer
- C = Uang kartal
- R = Cadangan wajib

- d. Cadangan wajib (R) merupakan hasil perkalian antara currency deposit ratio (rr) dengan uang giral (D), dalam bentuk matematis dinyatakan :

$$R = rr \times D \dots\dots\dots 12)$$

Berdasarkan persamaan-persamaan diatas, maka uang primer, yaitu jumlah uang yang dipegang masyarakat dalam bentuk uang kartal (C) dan cadangan wajib (R) ditulis menjadi :

$$\begin{aligned}
 B &= C + R \\
 &= (cr \times D) + (rr \times D) \\
 &= (cr + rr) \times D \dots\dots\dots 13)
 \end{aligned}$$

Persamaan 13) di atas dapat juga ditulis sebagai :

$$D = \frac{B}{(cr + rr)} \dots\dots\dots 14)$$

Persamaan 14) menunjukkan adanya hubungan proporsional antara uang giral dengan uang primer.

Berdasarkan persamaan 10) dan persamaan 14) dapat disederhanakan menjadi persamaan berikut :

$$\text{Persamaan 10) : } D = \frac{M_1}{(1 + cr)}$$

$$\text{Persamaan 14) : } D = \frac{B}{(cr + rr)}$$

Sehingga persamaan 10) sama dengan persamaan 14) yaitu $D = D$ atau ditulis :

$$\begin{aligned}
 \frac{M_1}{(1 + cr)} &= \frac{B}{(cr + rr)} \\
 M_1 &= \frac{(1 + cr)}{(cr + rr)} \times B \\
 M_1 &= m \times B \dots\dots\dots 15)
 \end{aligned}$$

Dimana :

$$m = \frac{(1 + cr)}{(cr + rr)} \quad \text{merupakan pengganda uang (money multiplier).}$$

Berdasarkan hal tersebut, maka uang primer disebut juga *uang berdaya Tinggi (high powered money)*.

Implikasi dari persamaan-persamaan diatas, dimana jika ketiga variabel eksogen yaitu uang primer (*monetary base*) B , rasio deposito-cadangan (*reserve-deposit ratio*) rr dan rasio deposito-uang kartal (*currency-deposit ratio*) cr mengalami perubahan maka akan menyebabkan perubahan pada jumlah uang beredar.

- i) Karena Jumlah uang beredar, M , adalah proporsional terhadap basis moneter B , maka kenaikan basis moneter akan meningkatkan jumlah uang beredar dalam persentase yang sama.
- ii) Jika rasio deposito-cadangan rr (R/D) semakin kecil, maka pinjaman yang dilakukan bank akan semakin banyak dan pada akhirnya uang yang diciptakan oleh bank dari setiap cadangan akan semakin banyak pula.
- iii) Jika rasio deposito-uang kartal cr (C/D) semakin kecil, maka uang primer yang dipegang oleh masyarakat semakin sedikit dan cadangan semakin besar sehingga uang yang diciptakan oleh bank semakin banyak. Dengan demikian penurunan rasio deposito-uang kartal akan mampu meningkatkan pengganda uang dan jumlah uang beredar.

Untuk memudahkan pemahaman, perhatikan contoh berikut :

Dimisalkan jumlah uang primer adalah Rp 150 miliar, $rr = 0,3$, dan $cr = 0,5$, maka besarnya angka multiplier uang adalah:

$$\begin{aligned}
 m &= \frac{(cr + 1)}{(cr + rr)} \\
 &= \frac{(0.5 + 1)}{(0.5 + 0.3)} \\
 &= 1.875
 \end{aligned}$$

Sehingga jumlah uang beredar (M_1) adalah

$$\begin{aligned}
 M_1 &= m \times B \\
 &= 1.876 \times \text{Rp } 150 \text{ miliar} \\
 &= 281.25 \text{ miliar rupiah}
 \end{aligned}$$

Dalam contoh sebelumnya tentang proses penciptaan uang dengan nilai $cr = 0$ dan $rr = 0,25$, maka besarnya angka multiplier uang adalah:

$$\begin{aligned}
 m &= \frac{(cr + 1)}{(cr + rr)} \\
 &= \frac{(0 + 1)}{(0 + 0,25)} \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

Dengan demikian penambahan uang primer sebesar 2.000 menambah jumlah uang beredar sebesar 8.000.

Keseimbangan Permintaan dan Penawaran Uang

Dalam model preferensi likuiditas yang dikembangkan oleh JM Keynes, ditunjukkan bahwa keseimbangan pada pasar uang akan dapat menentukan tingkat suku bunga keseimbangan. Keseimbangan pasar uang terjadi jika kondisi permintaan uang sama dengan penawaran uang, sehingga interaksi permintaan dan penawaran uang akan senantiasa membawa suku bunga pada tingkat keseimbangan.

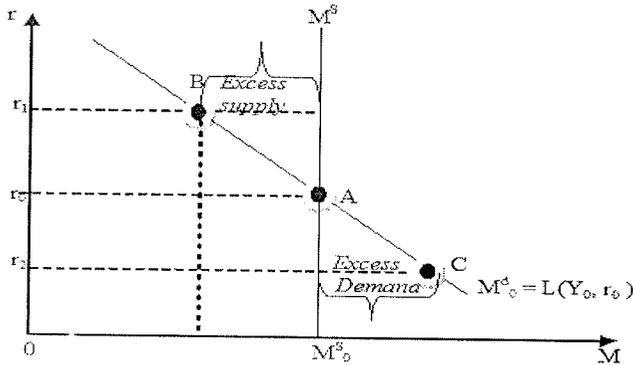
Keseimbangan pasar uang secara matematis dinyatakan sebagai berikut :

$$M^S = M^D \quad \dots\dots\dots 16)$$

$$\left(\frac{M}{P}\right)^S = L(Y, r) \quad \dots\dots\dots 17)$$

Persamaan (17) menunjukkan bahwa keseimbangan pasar uang terjadi pada saat penawaran uang sama dengan permintaan uang, yang secara grafik ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 5.5
Keseimbangan Pasar Uang

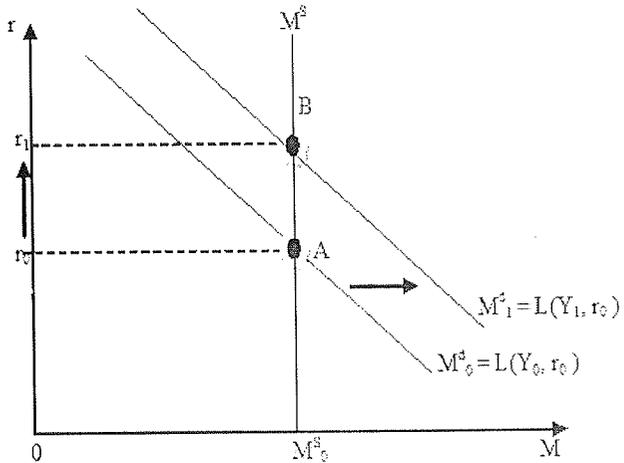


Gambar 8.5 menunjukkan bahwa pada kondisi keseimbangan pasar uang, diasumsikan bank sentral mengontrol jumlah uang yang ditawarkan pada tingkat M^S_0 , sehingga kurva penawaran uang (M^S) berbentuk vertikal pada tingkat M^S_0 . Kuantitas uang yang diminta pada posisi M^D_0 dan tingkat suku bunga berada pada r_0 dengan tingkat harga dan pendapatan konstan, maka keseimbangan $M^S = M^D$ terjadi pada titik A. Jika tingkat tingkat suku bunga ada pada r_1 , maka terjadi *excess supply* uang, dan pelaku ekonomi akan membeli obligasi dan bila tingkat suku

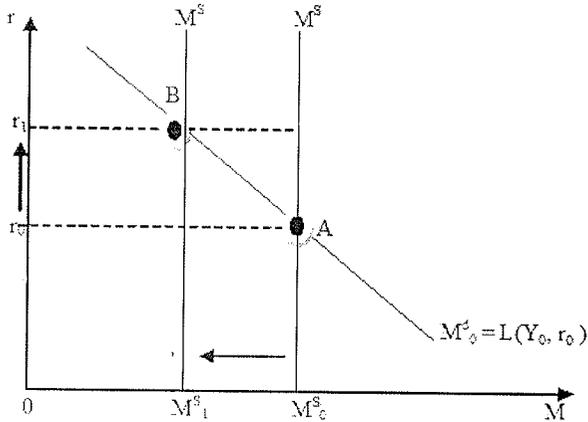
bunga pada tingkat r_2 , maka terjadi *excess demand* uang dan pelaku ekonomi akan menjual obligasi.

Perubahan keseimbangan tingkat suku bunga terjadi jika terdapat pergeseran pada kurva permintaan uang ataupun kurva penawaran uang. Faktor yang menggeser kurva permintaan uang diantaranya adalah pendapatan dan pergeseran kurva penawaran uang adalah peningkatan atau penurunan jumlah uang beredar. Misalnya pendapatan naik, maka kurva permintaan uang akan bergeser ke kanan dan tingkat suku bunga naik. Hal ini ditunjukkan dalam grafik berikut :

Gambar 8.6
Keseimbangan Pasar Uang (Perubahan Pendapatan)



Gambar 8.7
Keseimbangan Pasar Uang (Perubahan JUB)



8.4  Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrumen penting di hampir seluruh sistem perekonomian. Lembaga keuangan adalah semua badan atau lembaga yang kegiatan utamanya berada di bidang keuangan yaitu menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan motif mendapatkan keuntungan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Dengan demikian kekayaan lembaga keuangan terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial asset*) atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset non-finansial atau aset riil (*non financial assets*)

Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang modal

(pemakai dana) dengan pihak-pihak yang memilikinya (pemilik dana), sehingga kegiatan utama dari lembaga keuangan meliputi :

- a) Memberi kredit kepada nasabah
- b) Menanamkan dananya dalam bentuk surat berharga
- c) Menawarkan berbagai jasa keuangan a.l menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.

Disamping itu juga, lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi pasar uang modal. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam perekonomian modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan, yang jika diklasifikasikan terdapat dua lembaga keuangan yaitu :

1) Lembaga keuangan depository (*depository financial institution*)

Lembaga keuangan depository (*depository financial institution*) adalah lembaga keuangan yang dalam menjalankan fungsi intermediasinya diizinkan untuk menghimpun sumber dana dari masyarakat, rumah tangga, perusahaan, pemerintah atau badan, dalam bentuk Giro, Tabungan atau Deposito Berjangka dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Lembaga yang masuk dalam kategori ini adalah perbankan, seperti :

✓ Bank Umum

- - Bank Umum Pemerintah
- - Bank Pemerintah Daerah
- - Bank Umum Swasta
- - Bank Asing

- ✓ Bank Perkreditan Rakyat
- ✓ Lemb. Dana & Kredit Pedesaan

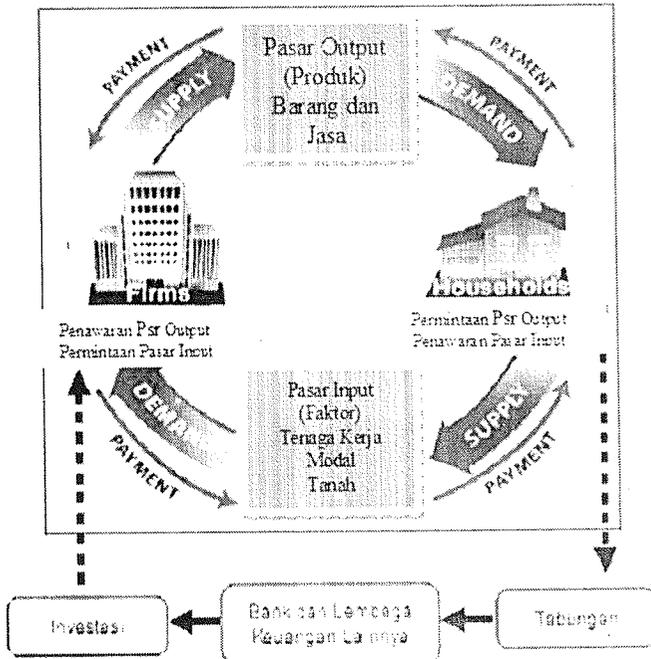
2) Lembaga keuangan nondepositori (*nondepository financial institution*)

Lembaga keuangan nondepositori (*non depository financial institution*) adalah lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk Giro, Tabungan atau Deposito Berjangka. Oleh karena itu lembaga ini disebut juga sebagai lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga yang masuk dalam katagori ini diantaranya adalah :

- a) Contractual Intermediaries, yaitu lembaga yang melakukan kontrak dengan nasabahnya untuk memberikan perlindungan financial kepada nasabahnya terhadap timbulnya kerugian jiwa dan harta, misalnya lembaga Asuransi Jiwa, Asuransi Kerugian, dan Dana Pensiun
- b) Investment Intermediaries, yaitu lembaga yang menawarkan surat-surat berharga yang dapat dimiliki dalam jangka panjang atau segera dapat dijual bila membutuhkan dananya kembali, misalnya lembaga pasar modal dengan instrumennya adalah saham dan obligasi.
- c) Financial Intermediaries, yaitu lembaga yang menawarkan jasa pembiayaan kegiatan usaha dan pembayaran dimuka atas tagihan dari nasabah, misalnya lembaga Perusahaan Pembiayaan.

Mekanisme aktivitas ekonomi masyarakat modern dengan peran lembaga keuangan baik yang bank dan lembaga keuangan depositori (bank) maupun nondepository dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 8.8
Peran Lembaga Keuangan



Lembaga Keuangan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya undang-undang tersebut mengklasifikasikan bank menjadi dua

kelompok, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran atau bank komersial.

Sifat usaha dari Bank Umum tercermin dalam tujuan utamanya, yaitu *profit motif* (Π), dimana :

$$\Pi = R(Q) - C(Q) \dots\dots\dots 18)$$

$R(Q)$ adalah *revenue* dan $C(Q)$ adalah *biaya*. *Revenue* diperoleh dari hasil kegiatan pemberian pinjaman (bunga pinjaman) dan keuntungan pembelian surat berharga (profit portfolio). Sedangkan biaya dikeluarkan untuk memberikan bunga bagi simpanan nasabah dan biaya lain dalam upaya bank menarik sumber dana masyarakat.

Kegiatan utama dalam rangka profit motif adalah menghimpun dana dengan sifat bermacam-macam (volume & jangka waktu) kemudian ditanamkan dalam portfolio & kredit guna memperoleh laba. Secara rinci kegiatan usaha bank umum diantaranya adalah :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, serta sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang;berjangka pendek dan berjangka panjang atau sekuritas kredit, dan

- d) Menempatkan dan meminjam dari atau kepada bank lain
- e) Kegiatan-kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Proses bank umum dalam proses penciptaan uang dilakukan melalui mekanisme penciptaan uang giral yang berawal dari penciptaan kredit kemudian uang yang di titipkan Bank Umum dipinjamkan lagi pada orang lain atau masyarakat sesuai dengan ketentuan reserve requirement (RR) misal 2.5%.

2) *Bank Perkreditan Rakyat*

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian BPR merupakan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat diperseamakan dengan itu.

Pada dasarnya sifat utama dari Bank Perkreditan Rakyat sama dengan Bank Umum, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya berbeda. Kegiatan-kegiatan usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh BPR menurut undang-undang adalah 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan; 2) memberikan kredit; 3) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil; dan 4) menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito dan atau tabungan pada bank lain. Sedangkan kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR di antaranya adalah 1) menerima simpanan dalam bentuk giro; 2) melakukan penyertaan modal; 3) melakukan usaha perasuransian; dan 4) melakukan usaha di luar kegiatan usaha tersebut di atas.

Lembaga Keuangan Bukan Perbankan (*Non Banking Financial Institution*)

Lembaga keuangan Bukan Perbankan (LKBB) adalah semua lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau dengan kata lain LKBB adalah Lembaga Keuangan Non Depository. Sebagai lembaga keuangan yang tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, maka kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan LKBB adalah mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai kegiatan investasi; dan atau konsumsi individu perusahaan. Beberapa LKBB yang umumnya terdapat di dalam suatu perekonomian adalah :

1) Lembaga Pembiayaan,

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan secara khusus untuk melakukan kegiatan termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan, diantaranya adalah :

- a) Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*)
- b) Perusahaan Modal Ventura (*Ventura Capital Company*)
- c) Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (*Securities Company*)
- d) Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*)
- e) Kegiatan Perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card Company*)
- f) Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*)

2) Perusahaan Perasuransian

Perusahaan perasuransian adalah suatu badan yang melakukan kegiatan pembiayaan dengan produk jasa yang ditawarkannya adalah perlindungan finansial untuk menghadapi berbagai hal yang kurang menguntungkan, misalnya kecelakaan.

3) Dana Pensiun

Lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan pada suatu badan atau perusahaan terutama yang sudah pensiun. Dengan demikian lembaga ini menawarkan jasa berupa persiapan dana pensiun. Bagi pegawai perusahaan swasta, jasa dana pensiun dapat memberikan ketenangan dan jaminan hari tua, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Lembaga dana pensiun juga merupakan sumber dana potensial bagi dunia usaha. Sebab, sama seperti perusahaan asuransi, kewajiban dana pensiun baru jatuh tempo dalam waktu yang sangat panjang, sehingga dapat menjadi sumber dana jangka panjang.

4) Perusahaan Efek

Perusahaan efek merupakan suatu lembaga yang dapat melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, manajer investasi, penasihat investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAPEPAM. Dengan demikian perusahaan efek sebagai lembaga kepercayaan masyarakat mempunyai peran strategis dalam menjaga kelangsungan Pasar Modal. Oleh karena itu, otoritas pasar modal yaitu BAPEPAM telah menetapkan berbagai ketentuan operasional dalam melakukan kegiatan perusahaan efek. Perusahaan efek dituntut untuk memelihara likuiditas yang cukup sehingga mampu memenuhi seluruh kewajibannya. Sebagai contoh, apabila perusahaan efek melakukan transaksi pembelian

efek untuk nasabah dan nasabah tersebut tidak dapat menyerahkan dana pada waktu yang ditentukan, maka perusahaan efek wajib melakukan pembayaran atas transaksi efek untuk nasabahnya.

5) Reksa Dana

Reksadana (*mutual fund*) merupakan suatu lembaga jasa keuangan yang menerima uang dari para pemodal dan kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk portofolio yang terdiversifikasi pada efek / sekuritas". Dengan demikian reksanana adalah suatu wadah investasi secara kolektif untuk ditempatkan dalam portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh institusi jasa keuangan. Kegiatan investasi reksana dapat ditempatkan pada berbagai instrumen efek, baik dipasar uang maupun pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa reksadana bersifat fleksibel, karena mampu memberikan berbagai pilihan dan alternatif bagi para investor sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya dalam berinvestasi. Sama halnya, dengan sarana investasi lainnya, reksadana selain menghasilkan tingkat keuntungan tertentu (*return*) juga mengandung unsur resiko (*risk*) yang patut dipertimbangkan. Hanya bedanya, resiko yang terkandung dapat diperkecil karena investasi tersebut dapat didiversifikasi atau disebar dalam bentuk portofolio. Jadi jelaslah sekarang bahwa reksana adalah suatu instrumen investasi sedangkan Danareksa adalah suatu perusahaan investasi.

6) Perusahaan Pegadaian

Perusahaan Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang kegiatan utamanya menyediakan dana (pembiayaan) bagi masyarakat luas, untuk tujuan konsumsi, produksi, maupun berbagai tujuan lainnya. Perusahaan Pegadaian termasuk dalam kategori lembaga keuangan karena transaksi pembiayaan yang

diberikan oleh pegadaian mirip dengan pinjaman kredit melalui bank, namun diatur secara terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam meminjam biasa. Baik Bank maupun pegadaian memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan membebankan suatu kontra prestasi atas penyerahan uang atau balas jasa atas pinjaman yang diperolehnya dalam bentuk bunga atau sewa modal. Dengan demikian perusahaan pegadaian pada prinsipnya memberi bantuan keuangan dengan jaminan aset peminjam, yang diserahkan kepada lembaga pegadaian. Aset tersebut akan dikembalikan bila peminjam telah melunasi utang berikutan bunganya.

8.5



Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter sebagai bagian kajian dari teori moneter dikembangkan oleh Milton Friedman dan para pengikutnya (Kaum Monetarisme) yang memberikan pandangan bahwa perubahan jumlah uang beredar akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi atau output nasional, kesempatan kerja dan tingkat harga. Pandangan ini muncul sebagai alternatif atas konsep kebijakan fiskal yang dilontarkan oleh kaum Keynesian. Monetaris mengkritisi terhadap konsep Keynesian tentang intervensi pemerintah, dimana menurut kaum monetaris berpendapat bahwa intervensi pemerintah dalam ekonomi harus diminimalkan. Friedman berpendapat bahwa pengendalian inflasi hanya dapat dilakukan melalui pembatasan dalam pertumbuhan jumlah uang beredar. Dengan demikian ekonom monetaris percaya bahwa pengeluaran pemerintah dan perubahan pajak hanya dapat memiliki efek sementara terhadap permintaan agregat, output dan kesempatan kerja, sedangkan kebijakan

moneter merupakan alat yang lebih efektif untuk mengendalikan permintaan agregat dan tekanan inflasi.

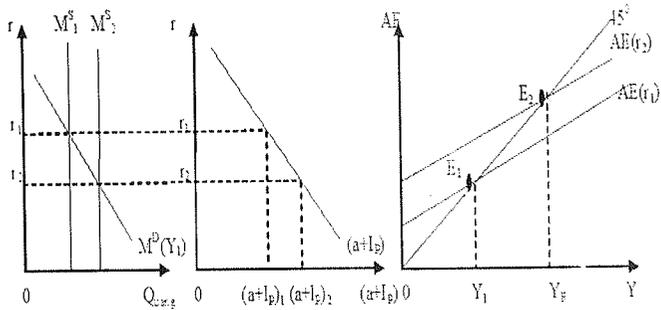
Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (BI/bank sentral) untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui pengendalian besaran moneter (JUB, uang primer, kredit perbankan) atau suku bunga. Stabilitas ekonomi makro tercermin dari laju inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, sehingga mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Dengan melakukan pengontrolan terhadap perubahan dalam jumlah uang yang beredar atau tingkat bunga dalam rangka (1) mencapai tujuan makroekonomi yaitu full employment, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, dan (2) mencapai stabilitas pasar uang (tingkat bunga, nilai tukar dan stock market). Kebijakan moneter didasarkan pada hubungan antara tingkat bunga dalam perekonomian, yaitu harga dimana uang bisa dipinjam, dan total jumlah uang beredar.

Sama halnya dengan kebijakan fiskal, dalam kebijakan moneter juga dibagi dua jenis kebijakan, yaitu (1) kebijakan moneter ekspansi (easy money policy) dan (2) kebijakan moneter kontraksi (tight money policy). Bank sentral dapat mencoba menstimulus pengeluaran konsumen dan pengeluaran pengusaha melalui kebijakan fiskal yang bersifat ekspansionary dengan cara meningkatkan penawaran uang agar dapat merangsang sensitivitas tingkat suku bunga pada investasi autonomous. Melalui kebijakan operasi pasar terbuka, Bank sentral membeli surat-surat berharga, sehingga jumlah uang beredar meningkat dan menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran uang (excess supply). Excess supply ini mendorong permintaan akan surat berharga (bond) meningkat dan harga dari surat berharga meningkat dan tingkat bunga turun dan investasi autonomos meningkat.

$$\left(\begin{array}{l} \text{Bank} \\ \text{Sentral} \\ \text{Beli} \\ \text{Bond} \end{array} \right) \rightarrow M^s \uparrow \rightarrow \left(\begin{array}{l} \text{excess} \\ \text{supply} \end{array} \right) \rightarrow B^D \uparrow \rightarrow P_n \uparrow \rightarrow r \downarrow \rightarrow (a+I_p) \uparrow \rightarrow AE_p \uparrow \rightarrow Y \uparrow$$

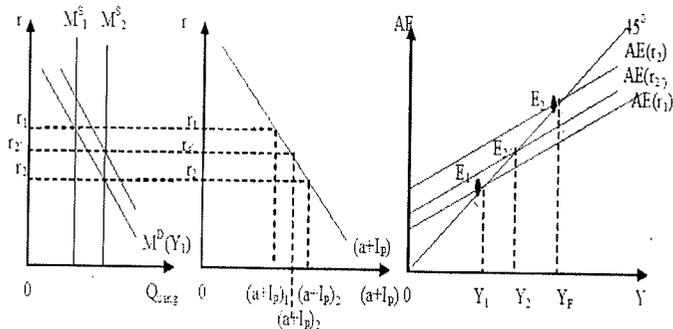
Kondisi tersebut dapat ditunjukkan melalui grafik berikut :

Gambar 8.9
Kebijakan Moneter Ekspansif



Kondisi yang digambarkan tersebut diatas, belum berakhir karena peningkatan dalam PDB riil (Y) menyebabkan permintaan uang dan tingkat suku bunga meningkat hingga $M^D(Y_2)$ dan r_2 . Hal ini menyebabkan investasi dan PDB riil kembali turun pada posisi $(a+I_p)_2$ dan $AE(r_2)$ dan Y_2 . Sehingga jika digambarkan hasilnya sebagai berikut :

Grafik 8.10
Kebijakan Moneter Ekspansif Dengan Crowding Out effect



Peningkatan permintaan uang (M^D) yang disebabkan oleh peningkatan PDB riil (output, Y) mendorong tingkat bunga kembali keatas dan output (Y) kembali mendekati tingkat full employment yang diharapkan.

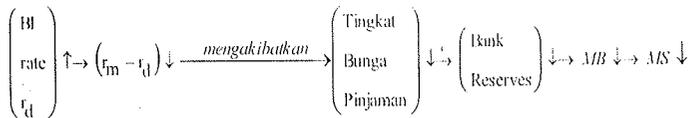
Kebijakan moneter menggunakan berbagai instrumen yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi sasaran operasionanya untuk mengontrol dan mengendalikan jumlah uang beredar agar dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dan pengangguran. Otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Kebijakan yang dipergunakan untuk mengontrol jumlah uang beredar (money supply, M^s) adalah :

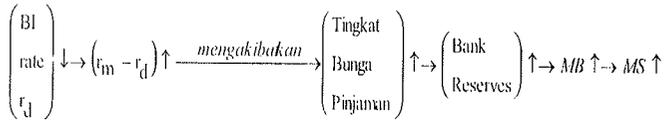
1. Open Market Operations, yaitu tindakan atau kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Sentral seperti penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI); pembelian atau penjualan surat berharga (SBI dan SUN); penyediaan fasilitas simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI); Penitipan dana

dengan prinsip wadiah; jual beli valuta asing terhadap Rupiah antara lain dalam bentuk *spot*, *forward* dan *swap*. Bank sentral mempergunakan operasi pasar terbuka agar terdapat perubahan dalam uang inti (monetary base) dan terjadi perubahan dalam jumlah uang beredar (money supply, $M^s = m \times MB$) dengan tujuan adanya perubahan dalam tingkat suku bunga umum (BI rate). Perubahan dalam tingkat bunga umum (BI rate) akan membawa perubahan dalam semua tingkat bunga pasar. Peningkatan (penurunan) dalam jumlah uang beredar (money supply) dapat dilakukan dengan cara membeli (menjual) surat berharga.



2. Discount rate (tingkat bunga) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral (BI rate). Peningkatan (penurunan) tingkat bunga umum (BI rate) melalui mekanisme uang inti (monetary base) akan mampu menurunkan (meningkatkan) jumlah uang beredar.





3. Persyaratan cadangan (reserve requirement) adalah rasio cadangan dalam bentuk giro wajib minimum yang ditetapkan oleh bank sentral. Giro wajib minimum ini merupakan salah satu alat yang dipergunakan oleh bank sentral dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Giro wajib minimum yang rendah menunjukkan bahwa kebijakan moneter bersifat ekspansif, dimana dengan rendahnya giro wajib minimum memungkinkan lebih banyaknya uang dalam sistem perbankan, sedangkan giro wajib minimum yang tinggi menunjukkan kebijakan moneter bersifat kontraksi, dan jumlah uang beredar berkurang sehingga aktivitas perekonomian melambat.

Giro wajib minimum ini akan mempengaruhi besaran multiplier, karena perubahan reserve requirement (giro wajib minimum) merupakan salah satu yang akan mengakibatkan adanya perubahan dalam multiplier uang (money multiplier, m).

$$RR \downarrow \rightarrow \left(\frac{1}{RR} \right) \uparrow \rightarrow m \uparrow \rightarrow (m * MB) \uparrow \rightarrow MS \uparrow$$

$$RR \uparrow \rightarrow \left(\frac{1}{RR} \right) \downarrow \rightarrow m \downarrow \rightarrow (m * MB) \downarrow \rightarrow MS \downarrow$$

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam ratio persyaratan cadangan (giro wajib minimum) akan meningkatkan atau menurunkan money multiplier (m), uang inti (monetary base, MB) dan jumlah uang beredar, M^s .

**Soal dan
Latihan**



**Pertanyaan Untuk Diskusi dan
Latihan**

1. Coba Saudara diskusikan dan selanjutnya jelaskan konsep dari uang dan fungsi uang? Bagaimana proses penciptaan uang terjadi?
2. Sebutkan dan jelaskan 3 motif orang memegang uang?
3. Coba lakukan proses derivasi untuk fungsi permintaan dan penawaran uang?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan dan bagaimana pengklasifikasiannya?
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bank dan apa fungsinya?
6. Diskusikan dan selanjutnya deskripsikan tentang konsep kebijakan moneter ?

STUDI KASUS

Coba Saudara lakukan penelitian mini terkait dengan analisis permintaan uang atau analisis penawaran uang di Indonesia. Deskripsikan secara rinci dan jelas tentang variabel-variabel yang diduga mempengaruhi permintaan uang ataupun penawaran uang secara parsial.

EKONOMI PEMBANGUNAN

Capaian Pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari bab 9 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep Ekonomi Pembangunan

Dalam bab ini Sdr diharapkan dapat mencapai kompetensi dasar sebagai berikut :

1. Dapat mengidentifikasi dan menjelaskan masalah pokok pembangunan ekonomi
2. Dapat mengidentifikasi karakteristik negara sedang berkembang.
3. Dapat mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian dan ukuran pembangunan ekonomi

9

9.1



Pendahuluan

Pembangunan ekonomi terdiri dari dua kata yaitu pembangunan dan ekonomi. Pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat berlangsung untuk jangka panjang. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non-ekonomi.

Studi pembangunan pada prinsipnya menggarap sungguh-sungguh terhadap masalah yang dihadapi oleh Negara-negara yang sedang berkembang. Permasalahannya terletak pada hasil pembangunan di masa lampau. Banyak Negara dunia ketiga yang sudah mengalami pertumbuhan ekonomi, tapi sedikit sekali manfaatnya terutama dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam distribusi pendapatannya.

Ketimpangan dan ketidakmerataan serta pengangguran merupakan permasalahan pembangunan ekonomi yang tidak hanya dalam konteks nasional, tetapi dalam konteks internasional. Negara-negara yang sedang berkembang saling ketergantungan satu sama lain dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan ekonomi. Di Negara maju titik berat strategi pembangunan nampaknya ditekankan untuk mengalihkan pertumbuhan menuju kepada usaha-usaha yang menyangkut kualitas hidup. Usaha-usaha tersebut dimanifestasikan secara prinsip dalam perubahan keadaan lingkungan hidup.

Pada prinsipnya problema-problema kemiskinan dan distribusi pendapatan menjadi sama-sama penting dalam pembangunan Negara tersebut. Penghapusan kemiskinan yang meluas dan pertumbuhan ketimpangan pendapatan merupakan pusat dari semua problema pembangunan yang banyak mempengaruhi strategi dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu ahli ekonomi mengemukakan bahwa untuk perbaikan jurang pendapatan nasional hanya mungkin bila strategi pembangunan mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok, serta yang dinamakan kebutuhan dasar.

9.2 Masalah Pokok Pembangunan Ekonomi

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh, serta: (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pada dasarnya tujuan dari suatu negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Ketika membahas tentang masalah dalam pembangunan ekonomi, pada hakekatnya masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu negara adalah masalah ekonomi yang sifatnya menyeluruh yang juga harus diatasi secara menyeluruh pula.

Beberapa masalah pokok yang dihadapi oleh suatu negara, terutama negara sedang berkembang dan negara terbelakang baik permasalahan dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Permasalahan pembangunana ekonomi dalam jangka pendek terkait dengan masalah kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, pengangguran, Sedangkan dalam jangka panjang permasalahan pembangunan ekonomi terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan pembangunan ekonomi dalam jangka pendek, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Masalah Pokok Pembangunan Ekonomi yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global dan merupakan masalah bagi setiap negara. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll. Masalah kemiskinan mendorong setiap negara untuk melakukan pembangunan. Masalah kemiskinan ini harus diatasi karena memiliki dampak yang sangat luas bagi kehidupan seseorang ataupun suatu bangsa, baik dari dimensi ekonomi maupun nonekonomi.

2. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Masalah Pokok Pembangunan Ekonomi yang kedua yaitu ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Masalah kemiskinan seringkali dihubungkan dengan masalah

ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus tidak selalu dapat mengurangi tingkat kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi positif dengan distribusi pendapatan.

Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu dimana satu individu / kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan individu/kelompok lain, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga terjadi di beberapa negara di dunia. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan membuat jurang si kaya dan si miskin semakin curam yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadinya berbagai tindakan kriminal.

3. Pengangguran

Masalah Pokok Pembangunan Ekonomi yang berikutnya yaitu pengangguran. Masalah pengangguran merupakan masalah pokok yang harus dihadapi oleh suatu negara. Sekalipun suatu negara memiliki pengangguran sama dengan nol atau negatif, belum tentu negara tersebut tidak memiliki masalah pengangguran karena pengangguran itu sendiri memiliki banyak kategori.

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

Persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial. Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan

perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Dampak-dampak yang ditimbulkannya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Inflasi

Masalah Pokok Pembangunan Ekonomi yang terakhir yaitu inflasi. Terjadinya kemerosotan nilai uang akibat jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga memicu kenaikan harga barang-barang akan berdampak pada menurunnya pendapat riil orang-orang yang berpenghasilan tetap sehingga daya belinya ikut menurun. Penurunan daya beli masyarakat akan berdampak pada dunia usaha, karena perusahaan akan mengurangi kapasitas produksinya, atau bahkan menghentikan produksinya.

Akibatnya terjadi PHK yang akan meningkatkan jumlah pengangguran. Inflasi yang tinggi juga membawa dampak pada meningkatnya suku bunga, yang akan membuat perbankan terpuruk. Itulah mengapa inflasi termasuk ke dalam masalah pokok pembangunan, sebab inflasi yang meningkat tajam akan mengganggu kestabilan perekonomian nasional

Masalah lainnya dalam pembangunan ekonomi masih cukup banyak, terutama dinegara-negara berkembang, misalnya masalah hutang luar negeri, defisit neraca pembayaran, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, pangan dan beras, dan korupsi dan inefisiensi ekonomi.



Karakteristik Negara Sedang Berkembang

Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, negara-negara di dunia biasanya dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu negara-negara maju (developed countries) dan negara-negara yang sedang berkembang (developing countries). Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara berkembang. Sedangkan Negara sedang berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relative terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global.

Yang dikelompokkan kedalam negara-negara yang sudah maju adalah negara-negara yang ada di Eropa Barat, Australia, Amerika Serikat, Jepang, dsb. Selain itu, negara-negara maju juga berasal dari negara-negara komunis seperti yang terdapat di Eropa Timur: Uni Sovyet, Polandia, dan Cekoslowakia. Sebagian besar negara-negara sedang berkembang dan terbelakang terdapat di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin dimana diperkirakan dua pertiga penduduk dunia tersebut tinggal.

Karakteristik negara berkembang yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1) Menurut Todaro

Todaro mengklasifikasi terdapat enam (6) karakteristik atau ciri-ciri dari negara berkembang, yaitu sebagai berikut :

- a) Ketergantungan dan dominasi pada negara maju. Ketergantungan di sini bisa pada sumbangan (piutang), teknologi, suplai sumber daya alam, ataupun bantuan tenaga-tenaga ahli.

- b) Tingkat pertumbuhan dan ketergantungan penduduk tinggi
 - c) Tingkat pengangguran yang tinggi, masalah ini adalah umum pada negara-negara berkembang hal ini akan membawa dampak pada banyak hal seperti, kriminalitas dan gejolak-gejolak sosial lainnya.
 - d) Masih menggantungkan pada sektor pertanian, dan negara tersebut belum sempat mengembangkan sektor-sektor yang lain. Seperti sektor industri yang masih tertinggal jauh.
 - e) Taraf kehidupan yang rendah
 - f) Tingkat produktivitas rendah
- 2) Menurut G.M. Meilir dan R.E. Baidwin
- Dalam bukunya *Economic Development Theory History and Policy*, ia mengatakan bahwa ciri-ciri dari negara berkembang adalah sebagai berikut:
1. Belum memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya secara optimal, dan masih menggantungkan pada bantuan negara yang lebih maju. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia dan penguasaan teknologi.
 2. Penduduknya masih terbelakang, maksudnya sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan dan juga angka melek hurufnya masih sedikit.
 3. Kekurangan modal dalam melakukan pembangunan negaranya, sering melakukan hutang luar negeri guna menutup kekurangan modal ini.
 4. Mempunyai orientasi pada perdagangan luar negeri, hal ini dimaksudkan untuk menambah devisa negara tersebut.
 5. Sebagai produsen barang-barang primer, maksudnya adalah barang-barang yang masih mentah seperti: kayu gelondongan yang baru ditebang, belum dibuat bahan jadi ataupun setengah jadi (alat-alat pertukangan, meubel).

6. Mempunyai masalah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, namun tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas untuk kehidupan yang layak (fasilitas kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, lapangan pekerjaan, dan sebagainya).

Faktor-faktor yang turut membentuk suatu negara menjadi negara maju ataupun masih menjadi negara berkembang adalah sebagai berikut.

- 1) Tingkat hubungannya dengan negara-negara lain dalam percaturan dunia internasional.
- 2) Kondisi alam negara itu sendiri (kondisi geologis, letak dan posisi geografis, kekayaan alam (SDA), serta aspek luas negara).
- 3) Kondisi kependudukan negara itu sendiri (sejarah negara, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan keragaman etnis).
- 4) Stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan negara itu sendiri.

9.4 Pengertian dan Ukuran Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah manifestasi dari suatu proses menuju kemajuan material perekonomian, sehingga ukuran-ukuran keberhasilannya dapat terlihat dari besaran indikator ekonomi seperti pertumbuhan GDP, pertumbuhan PDRB, proses akumulasi modal untuk investasi, dan tingkat konsumsi masyarakat.

Istilah *pembangunan ekonomi* (*economic development*) dan *ekonomi pembangunan* (*development economics*) seringkali dipakai saling bergantian dengan pengertian yang sama, pada hal, dua istilah ini memiliki arti dan orientasi yang berbeda dalam konteks studi pembangunan.

Langkah-langkah pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur sosial, sikap-sikap yang sadar terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk percepatan / ekselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut.

Dengan demikian pembangunan ekonomi merupakan usaha suatu masyarakat untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan usaha-usaha pembangunan secara keseluruhan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik dan kebudayaan. Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara atau pembangunan ekonomi adalah pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Studi tentang pembangunan ekonomi di-kenal sebagai ekonomi pembangunan.

Dari pernyataan di atas, dua istilah didefinisikan sekaligus:

1. Pembangunan ekonomi, sebagai proses pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara/daerah dalam rangka memakmurkan warganegara/penduduk daerah setempat.
2. Ekonomi pembangunan, sebagai bidang studi yang mengkaji pembangunan ekonomi di suatu negara/daerah.

Economic development refers to increases in the standard of living of a nation's population associated with sustained growth from a simple, low-income economy to a modern, high-income economy.
[(1). Deardorff's *Glossary of International Economics* online (2009);
(2). Myint & Krueger "Economic development," *Encyclopedia*

Britannica (2009)]. Its scope includes the process and policies by which a nation improves the economic, political, and social well-being of its people. [O'Sullivan & Sheffrin (2003). *Economics: Principles in action* Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall]. Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi merujuk pada upaya meningkatkan standar hidup penduduk suatu negara/bangsa terkait dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dari ekonomi yang sederhana, berpendapatan-rendah menuju ekonomi moderen, yang berpendapatan-tinggi.

Konsep pembangunan ekonomi dapat dilihat dari sisi deskripsi tujuan (*objectives*) dan proses (*process*) yang terkandung di dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Tujuan pembangunan ekonomi adalah penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup (*the creation of jobs and wealth, and the improvement of quality of life*), sedangkan proses pembangunan ekonomi adalah untuk mempengaruhi pertumbuhan dan penataan kembali suatu ekonomi dalam rangka meningkatkan kemakmuran ekonomi suatu masyarakat (*as a process that influences growth and restructuring of an economy to enhance the economic well being of a community*).

Dalam pengertian paling luas, pembangunan ekonomi mengarah pada kebijakan dan program berikut:

- a) Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dalam arti luas yang mencakup pengendalian inflasi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. (*Policies that government undertakes to meet broad economic objectives including inflation control, high employment, and sustainable growth*).
- b) Kebijakan dan program yang bertujuan memberikan/menyediakan layanan kepada publik yang mencakup pembangunan jalan raya, pengelolaan taman, dan layanan medis bagi golongan kurang mampu. (*Policies and programs to provide services including building highways, managing parks, and providing medical access to the disadvantaged*).

- c) Kebijakan dan program yang secara eksplisit ditujukan pada perbaikan iklim usaha melalui upaya-upaya khusus, keuangan usaha, pemasaran, pemba-ngunan kawasan hunian, retensi dan ekspansi usaha, alih teknologi, pengem-bangan properti/estat dan lain seba-gainya. (*Policies and programs explicitly di-rected at improving the business cli-mate through specific efforts, business finance, marketing, neighborhood de-velopment, business retention and ex-pansion, technology transfer, real es-tate development and others*).

Dewan Pembangunan Ekonomi Amerika (AEDC: *American Economic Develop-ment Council*) merumuskan apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi, dan bagaimana kebijakan pemerintah berperan di dalamnya, seperti yang diadopsi oleh Greg Last (2004: 23; 2007: 24) berikut: "... proses penciptaan kemakmuran melalui mobilisasi sumber-sumber daya manusia, finansial, modal, fisik, dan alam untuk menghasilkan barang dan jasa yang bisa dipasarkan") termasuk dalam definisi ini:

- a) Intervensi dalam ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi.
- b) Proses yang mempengaruhi pertumbuhan dan penstrukturan suatu ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
- c) Penciptaan lapangan kerja dan kemak-muran, dan perbaikan kualitas hidup.

Pembangunan ekonomi mencakup proses dan kebijakan yang diterapkan negara un-tuk memperbaiki ekonomi, politik, dan kesejahteraan sosial warganegara / penduduknya. Pembangunan ekonomi meliputi tiga sifat penting, yaitu sebagai berikut :

1. Suatu proses, yang berarti perubahan yang terjadi secara terus-menerus.
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan

3. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus berlaku dalam jangka panjang

Para ahli mengatakan bahwa pembangunan ekonomi sebagai (i) peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertumbuhan GDP suatu tahun tertentu melebihi dari tingkat pertumbuhan penduduk dan (2) perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat yang dibarengi dengan perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya, yang pada umumnya masih bercorak tradisional.

Syarat utama pembangunan ekonomi adalah bahwa proses pertumbuhan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri untuk memperbaiki nasib dan prakarsa. Untuk menciptakan kemajuan material harus diprakarsai oleh yang bersangkutan dan tidak dapat digabungkan dari luar, kekuatan ini sebaiknya tidak hanya untuk merangsang atau membantu kekuatan nasional. Bantuan ini hanya bersifat mengawali atau merangsang perubahan dan tidak bersifat mempertahankan.

Adapun yang menjadi ukuran dari pembangunan ekonomi dapat dilihat dari empat Indikator pokok, yaitu :

1. Indikator Moneter

Indikator ini berkaitan dengan uang. Uang disini berupa tingkat income yang diterima oleh masyarakat. Dalam indicator moneter, ada beberapa indicator yang dapat diukur, yakni :

- a. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita seringkali digunakan pula sebagai indicator pembangunan selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara Negara-negara maju dengan Negara sedang berkembang. Pendapatan per kapita selain dapat memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan

kesejahteraan masyarakat di berbagai Negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai Negara.

Melalui indikator pendapatan perkapita ini Bank Dunia (2003) mengklasifikasikan negara menjadi tiga golongan, yaitu :

- 1) Negara berpenghasilan rendah (*low-income economies*). Negara-negara ini memiliki Pendapatan perkapita Kurang atau sama dengan US\$ 745 pada tahun 2001.
- 2) Negara berpenghasilan menengah (*middle-income economies*). Kelompok Negara ini memiliki Pendapatan perkapita lebih dari US\$ 745 namun kurang dari US\$ 8.626 pada tahun 2001. kelompok Negara ini dibagi menjadi :
 - a) Negara berpenghasilan menengah papan bawah (*lower-middle-income economies*) dengan GDP perkapita antara US\$ 746 sampai US\$2.975.
 - b) Negara berpenghasilan menengah papan atas (*upper-middle-income economies*) dengan GDP perkapita antara US\$2.976 sampai US\$ 9.025.
 - c) Negara berpenghasilan tinggi (*high-income economies*). Negara di dalam kelompok ini mempunyai GDP perkapita sebesar US\$ 9.206 atau lebih pada tahun 2001.

b. Indikator Kesejahteraan Ekonomi Bersih

Suatu perkembangan baru mengenai Indikator Pembangunan Ekonomi kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dikemukakan oleh William Nordhaus dan James Tobin (1972). Mereka mencoba menyempurnakan nilai-nilai GNP dalam upaya untuk memperoleh suatu indikator ekonomi yang lebih baik yakni dengan menggunakan atau mengenakan konsep *Net Economic Welfare* (NEW).

2. Indikator Non-Moneter

Indikator ini merupakan indicator yang diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan indicator sebelumnya, Indikator memiliki beberapa macam-macam sub- Indikator, diantaranya adalah:

a. Indikator Sosial

Ahli Pembangunan Ekonomi yang bernama Beckerman membedakan berbagai penelitian tentang cara-cara membandingkan tingkat kesejahteraan dalam 3 kelompok.

- 1) Kelompok pertama, merupakan suatu usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan yang terjadi dalam masyarakat yang ada di dalam dua atau beberapa Negara dengan cara memperbaiki pelaksanaan dalam perhitungan pendapatan nasional biasa. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark yang selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis.
- 2) Kelompok kedua, dengan usaha membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan melihat pertimbangan perbedaan tingkat harga disetiap Negara.
- 3) Kelompok ketiga, adalah usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan dari setiap Negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter seperti, jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan, dan usaha ini dipelopori oleh tokoh yang bernama Bennet.

b. Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, ada sebuah indeks gabungan yang dikenal dengan Physical Quality of Line Index (PQLI) dan Indeks Kualitas Hidup

(IKH). Indeks ini diperkenalkan oleh Morris D. Morris. Indeks Kulaitas Hidup (IKH) terdiri dari 3 indikator yakni, tingkat harapan hidup, angka kematian, dan tingkat melek huruf.

Sejak tahun 1990, United Nations for Development Program (UNDP) mengembangkan indeks yang sering dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Sedangkan indicator yang digunakan untu mengukur indeks ini adalah (i) tingkat harapan hidup, (ii) Tingkat melek huruf masyarakat dan (iii) Pendapatan riil perkapita berdasarkan daya beli masing-masing Negara.

3. Indikator Campuran
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) Perumahan
 - d) Angkatan Kerja
 - e) KB dan Fertilitas
 - f) Ekonomi
 - g) Kriminalitas
 - h) Perjalanan Wisata
 - i) Akses Media Massa

**Soal dan
Latihan**



**Pertanyaan Untuk Diskusi dan
Latihan**

1. Coba Saudara diskusikan dan identifikasi berbagai masalah pokok dalam pembangunan ekonomi di negara maju, negara berkembang dan di Indonesia?
2. Jelaskan berbagai karakteristik negara sedang berkembang?

3. Coba Saudara diskusikan dan identifikasi serta jelaskan berbagai konsep yang terkait dengan pengertian pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan?
4. COba Saudara diskusikan dan analisis berbagai ukuran dari pembangunan ekonomi?

STUDI KASUS

Coba Saudara lakukan penelitian mini terkait dengan analisis berbagai masalah pokok dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Deskripsikan secara rinci dan jelas berbagai variabel yang dipermasalahkan dan gunakan dukungan data secara optimal yang up to date.

PERTUMBUHAN EKONOMI

10

Capaian Pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari bab 10 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep Pertumbuhan ekonomi dan berbagai model pertumbuhan Ekonomi

Dalam bab ini Sdr diharapkan dapat mencapai kompetensi dasar sebagai berikut :

1. Dapat menjelaskan konsep pertumbuhan ekonomi
2. Dapat mengidentifikasi indikator adanya pertumbuhan ekonomi.
3. Dapat membedakan model-model pertumbuhan ekonomi

10.1



Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian itu terdapat tiga aspek yang perlu digaribawahi, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang.

Pertumbuhan sebagai proses, berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat, namun menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita, berarti harus memperhatikan dua hal, yaitu output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan aspek jangka panjang, mengandung arti bahwa kenaikan output per kapita harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama (10, 20, atau 50 tahun, bahkan bisa lebih lama lagi). Kenaikan output per kapita dalam satu atau dua tahun kemudian diikuti penurunan *bukan* pertumbuhan ekonomi, sehingga kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka panjang tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (self generating).

Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak.

Teori pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah suatu "ceritera" logis mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi. Teori ini menjelaskan dua hal, yaitu (1) mengenai *faktor-faktor apa* yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan (2) mengenai *bagaimana* faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Satu hal yang perlu diingat bahwa dalam ilmu ekonomi tidak hanya terdapat *satu* teori pertumbuhan, tetapi terdapat *banyak* teori pertumbuhan. Sampai sekarang tidak ada suatu teori pertumbuhan yang bersifat menyeluruh dan lengkap dan merupakan *satu-satunya* teori pertumbuhan yang baku. Para ahli ekonomi mempunyai pandangan yang tidak selalu sama mengenai pertumbuhan ekonomi. Pandangan para ahli tersebut sering dipengaruhi oleh keadaan atau peristiwa-pewistiwa yang terjadi pada zaman mereka hidup dan oleh ideologi yang mereka anut.

10.2



Model-model Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai model pertumbuhan ekonomi didasarkan pada teori-teori pertumbuhan ekonomi baik pada masa klasik (Klasik) maupun pada masa yang baru (Modern).

- a) *Teori-teori Klasik* : Termasuk dalam teori Klasik adalah teori dari Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772- 1823), dan Arthur Lewis.
- b) *Teori-teori Modern* , mencakup empat sub-golongan, yaitu :
 - 1) Teori Keynesian : meliputi teori pertumbuhan Harrod-Domar dan teori Kaldor.
 - 2) Teori Neo-Klasik : diwakili oleh teori Robert Solow dan Trevor Swan.
 - 3) Teori Pertumbuhan Optimum : meliputi teori " Dalil Emas" (Golden Rule) dan teori " Jalan raya" (Turnpike).

- 4) Teori pertumbuhan dengan Uang : perkembangan teori Neo-Klasik dengan tambahan uang sebagai alat tukar dan alat penyimpanan.
- c) Model Pertumbuhan ekonomi endogen

Dalam pengantar ini, teori-teori yang disebutkan diatas, hanya akan dibahas beberapa teori saja mewakili dari setiap masanya.

Teori Pertumbuhan Adam smith

Menurut Adam Smith (1776) terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu (a) pertumbuhan output total dan (b) pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total terdapat tiga unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ialah (i) sumber daya alam yang tersedia sebagai faktor produksi, (ii) sumber daya insani sebagai tenaga kerja (Labor) dan (iii) stok barang modal yang ada sebagai kapital (K).

Menurut Adam Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jika suatu saat nanti semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh maka pertumbuhan output pun akan berhenti. Sedangkan sumber daya insani memiliki peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output dan stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Sedangkan pada pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup.

Faktor kapital merupakan faktor yang aktif dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu akumulasi kapital sangat berperanan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Untuk menjelaskan bagaimana peranan akumulasi kapital

dalam proses pertumbuhan, Smith mengajukan sebuah teori yang sangat terkenal, yaitu mengenai *spesialisasi dan pembagian kerja*. Stok kapital (K) mempunyai dua pengaruh terhadap tingkat output total (Q), yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. K berpengaruh langsung terhadap Q karena pertambahan K (yang diikuti pertambahan tenaga kerja, L) akan meningkatkan Q.

Secara matematis, dapat ditulis : $Q = f(K,L)$.

Pengaruh tidak langsung dari K terhadap Q adalah berupa peningkatan *produktivitas per kapita* melalui dimungkinkannya spesialisasi dan pembagian kerja (*specialization and division of labor*) yang lebih tinggi. Makin besar kapital (K) yang digunakan, makin besar kemungkinan dilakukan spesialisasi dan pembagian kerja, dan selanjutnya akan meningkatkan produktivitas per pekerja.

Peningkatan produktivitas tersebut bersumber dari tiga hal, (1) dengan spesialisasi akan meningkatkan ketrampilan setiap pekerja dalam bidang pekerjaannya, (2) dengan sistem pembagian kerja akan menghemat waktu dari waktu ketika pekerja beralih dari macam pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain, dan (3) ditemukannya mesin-mesin yang mempermudah dan mempercepat pekerjaan.

Dari penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa peningkatan stok kapital (K) secara terus menerus dengan menganggap tenaga kerja (L) selalu terpenuhi, juga akan diikuti oleh peningkatan output total (Q) terus menerus sampai mencapai batas atas sumberdaya alam. Di sini proses pertumbuhan ekonomi berhenti. Tahap di mana proses pertumbuhan ekonomi telah berhenti disebut posisi stasioner (*stationary state*). Pada posisi ini, semua proses pertumbuhan berhenti: pertumbuhan kapital berhenti, pertumbuhan penduduk berhenti, pertumbuhan output berhenti.

Teori Keynesian : Teori pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar menekankan pentingnya peranan investasi (I). Mereka berpendapat bahwa investasi (I) mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat (AD) melalui proses multiplier, dan mempunyai pengaruh terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Investasi (I) dapat diartikan sebagai tambahan stok kapital (ΔK). Jadi $I = \Delta K$.

Hubungan antara stok kapital (K) dan output total potensial (Q^p) dapat dirumuskan sebagai :

$$Q^p = hK \dots\dots\dots 1)$$

Dimana h, menunjukkan berapa unit output yang dapat dihasilkan dari setiap unit kapital. Koefisien ini disebut *output-capital ratio*, dan kebalikannya 1/h adalah *capital output ratio (COR)*. Hubungan antara K dan Q^p tersebut bersifat proporsional. Oleh karenanya, $K/Q^p = \Delta K/\Delta Q^p = 1/h$. $\Delta K/\Delta Q^p$ disebut *incremental capital-output ratio (ICOR)*. Dari hubungan ini, selanjutnya dapat dikatakan bahwa penambahan kapasitas tersebut akan meningkatkan output potensial sebesar,

$$\Delta Q^p = h\Delta K = hI \dots\dots\dots 2)$$

Besar nilai h tergantung pada keadaan masing-masing negara, tetapi secara umum berkisar antara 0,25-0,50. Misalnya, nilai h di suatu negara 0,5 maka ini berarti bahwa investasi (I) Rp 4 juta diharapkan dapat menghasilkan output per tahun sebesar Rp 2 juta. Peningkatan investasi (I) juga berpengaruh terhadap permintaan agregat (AD) melalui proses multiplir. Berdasarkan teori multiplier, investasi (I) akan menimbulkan permintaan agregat (Z) sebesar :

$$AD = \frac{1}{1 - MPC} \cdot I = \frac{1}{MPS} \cdot I \dots\dots\dots 3)$$

$$\frac{\Delta AD}{\Delta I} = \frac{1}{1 - MPC} = \frac{1}{MPS}$$

Warranted Rate of Growth

Agar perekonomian suatu negara selalu menggunakan kapasitas pabrik-pabriknya secara penuh, maka syarat yang harus dipenuhi dimana $AD = Q^p$ adalah sebagai berikut :

Dari persamaan 2) diketahui bahwa $\Delta Q^p = h\Delta K = hI$. Apabila syarat $AD = Q^p$ harus dipenuhi maka berarti $\Delta AD = hI$. Jika persamaan $\Delta AD = hI$ dibagi dengan persamaan 3) maka diperoleh :

$$\frac{\Delta AD}{AD} = sh = \frac{\Delta Q^p}{Q^p} = g_w \dots\dots\dots 4)$$

Dari persamaan 4) menunjukkan bahwa apabila ingin agar stok kapital selalu digunakan sepenuhnya, maka output potensial dan permintaan agregat harus tumbuh dengan laju yang sama, yaitu sebesar s dikalikan h atau marginal propensity to save (MPS) dikalikan output-capital ratio. Laju pertumbuhan yang menjamin keseimbangan antara output potensial dan permintaan agregat ini (atau keseimbangan di pasar barang), yaitu g_w , disebut *warranted rate of growth*.

Natural Rate of Growth

Dalam pembahasan di atas, Output total potensial hanya dikaitkan dengan stok kapital saja, sedangkan output tidak hanya dihasilkan oleh stok kapital saja, melainkan juga oleh faktor-faktor yang lain, misalnya tenaga kerja (Labor, N). Jika, output total potensial (Q^p) dilihat dari sisi *jumlah tenaga kerja yang tersedia*, maka dalam model Harrod-Domar tingkat output potensial (diberi simbol, Q^n) dianggap mempunyai hubungan proporsional sederhana dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia (N). Secara matematis dapat ditulis :

$$Q^n = nN \dots\dots\dots 5)$$

Di mana n adalah *output-labor ratio*. N disini adalah tenaga kerja (Labor) yang dikaitkan dengan produktivitas. Jadi, bukan jumlah orang semata tetapi termasuk keahliannya atau kualitasnya. Oleh karena itu, di sini peranan *kemajuan teknologi* masuk dalam analisis. Dengan demikian laju pertumbuhan

tenaga kerja (N) dan juga laju pertumbuhan Q^n dapat ditulis sebagai :

$$g_n = \frac{\Delta N}{N} = \frac{\Delta Q^n}{Q^n} = p + t \dots\dots\dots 6)$$

Di mana p = laju pertumbuhan penduduk dan t = laju pertumbuhan teknologi. Laju pertumbuhan Q^n , yaitu sebesar g^n , disebut *natural rate of growth*. Natural rate of growth dapat diartikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi yang disyaratkan oleh *pasar tenaga kerja* agar tidak ada tenaga kerja yang menganggur (full employment). Dengan kata lain dapat diartikan bahwa pada posisi natural rate of growth, pasar tenaga kerja dalam keadaan keseimbangan.

Dalam jangka panjang, keadaan yang paling ideal adalah apabila perekonomian suatu negara tumbuh pada jalur warranted rate of growth *dan sekaligus* juga pada jalur natural rate of growth. Pada posisi ini seluruh stok kapital dan juga seluruh tenaga kerja dimanfaatkan secara penuh untuk proses produksi. Berarti, baik pasar barang maupun pasar tenaga kerja dalam keadaan keseimbangannya. Posisi perekonomian demikian, oleh Prof. Joan Robinson dari Universitas Cambridge disebut posisi "Zaman Keemasan" atau "Golden Age". Posisi Zaman Keemasan ini merupakan posisi *keseimbangan jangka panjang*, atau *posisi keseimbangan umum (general equilibrium)*. Dalam teori pertumbuhan, posisi keseimbangan jangka panjang ini disebut dengan istilah *steady state growth*. Ciri dari steady state growth adalah semua variabel (I, Q^p, AD, K, N, Q^n) tumbuh dengan laju yang sama, yaitu dengan laju $g_n = g_w$. Sedangkan ciri dari stationary state (Klasik), $g_n = g_w = 0$. Ini berarti, semua variabel (stok kapital, jumlah penduduk, dan output potensial) tidak mengalami pertumbuhan lagi.

Contoh 10.1

Diketahui $COR = v = 25\%$ per tahun, $MPS = s = 15\%$ dan kenaikan pendapatan (Y) yang diharapkan adalah 250 milyar dollar per tahun. Jika full employment dipertahankan setiap

tahunnya maka jumlah investasi yang harus ditanam adalah sebesar 250 milyar dollar $\times 0.15 = 37.5$ milyar dollar. Jumlah ini akan menaikkan kapasitas produksi setiap tahunnya sebesar 37,5 milyar dollar $\times 0.25 = 9.375$ milyar dolar, dan pendapatan nasional akan naik sebesar itu pula. Akan tetapi kenaikan relatif pendapatan akan sama dengan kenaikan absolut dibagi pendapatan itu sendiri, yaitu :

$$250 \times \frac{0,15 \times 0,25}{250} = 0,15 \times 0,25 = 0.0375 \text{ atau } 3,75 \text{ persen.}$$

Jadi untuk mempertahankan full employment, pendapatan harus meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 3,75 persen per tahun.

Contoh 10.2

Diketahui :

COR (v) suatu negara adalah 5, dan negara tersebut mengharapkan laju pertumbuhan (g) terjamin untuk mencapai steady state adalah sebesar 3,75%.

Ditanya :

Berapakah besarnya rasio tabungan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan terjamin.

Jawab :

$s = gv = 5 \times 0,0375 = 0,1875$ atau 18,75% artinya dengan rasio output sebesar 5, dibutuhkan setiap tahun tabungan masyarakat sebanyak 18,75% dari pendapatannya pertahun agar negara tersebut bisa mencapai laju pertumbuhan sebesar 3,75%. Sebaliknya jika diketahui COR = 5 dan rasio tabungan pendapatan atau v sebesar 3,75% maka laju pertumbuhan terjamin yang dapat dicapai adalah $g = s/v = 0,0375 \times 5$ atau 0,1875 atau 18,75%

Teori Neo-Klasik : Teori Pertumbuhan Robert Solow

Model Solow sebagai salah satu model pertumbuhan ekonomi memberikan analisis statis bagaimana keterkaitan antara akumulasi modal, pertumbuhan populasi penduduk, dan perkembangan teknologi serta pengaruh ketiganya terhadap tingkat produksi output. Model ini memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa perekonomian di suatu negara bisa tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi di negara lain.

Teori yang dicetuskan oleh Robert Solow tentang pertumbuhan ekonomi dimulai dengan melakukan asumsi dasar tentang neoklasikal fungsi produksi dengan *decreasing returns to capital*. Dimana *rates of saving* dan pertumbuhan populasi adalah faktor yang eksogenous. Kedua variabel itulah menentukan kondisi *steady-state level of income*. Karena masing-masing negara memiliki kondisi *saving rate* dan pertumbuhan populasi yang berbeda, maka berbeda pula tingkat *steady state* di negara-negara tersebut. Semakin tinggi tingkat *saving*, semakin kaya negara tersebut. Dan Semakin tinggi tingkat *population growth*, semakin miskinlah negara tersebut.

Untuk menganalisis diasumsikan kondisi keseimbangan antara permintaan agregat dengan penawaran agregat ditunjukkan oleh persamaan $Y^d = Y$. Berarti secara otomatis ada keseimbangan antara investasi dan saving yaitu $I = S$. Kemudian fungsi konsumsi, $C = cY$, dimana c adalah marginal propensity to consume (MPC) dan $S = Y - C$ sehingga $S = Y - cY$ atau disederhanakan menjadi $S = (1 - c)Y$. Jika $s = 1 - c$, maka dapat ditulis sebagai berikut :

$$S = sY \dots\dots\dots 7)$$

oleh karena dalam keseimbangan makro $I = S$, maka

$$I = sY \dots\dots\dots 8)$$

dalam bentuk rasio tenaga kerja, L :

$$\frac{I}{L} = s \frac{Y}{L} \dots\dots\dots 9)$$

selanjutnya dimisalkan bahwa $\frac{I}{L} = i$ dan $\frac{Y}{L} = y$ maka :

$$i = sy \dots\dots\dots 10)$$

Jika keseimbangan penawaran agregat (AS) digunakan fungsi produksi :

$$Y = F(K, L) \dots\dots\dots 11)$$

dengan asumsi constan return to scale, dan dirasionakan dengan tenaga kerja, L, maka persamaan 11) menjadi :

$$\begin{aligned} \frac{Y}{L} &= F\left(\frac{K}{L}, \frac{L}{L}\right) \\ y &= F(k, 1) \dots\dots\dots 12) \\ y &= f(k) \end{aligned}$$

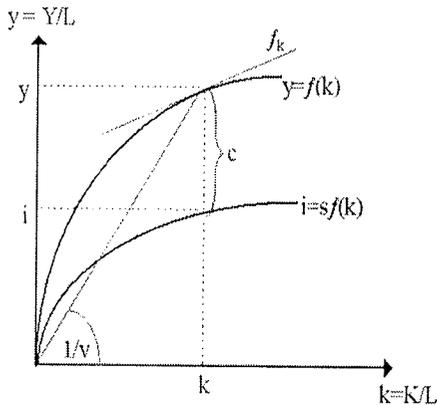
Dimana $f(\cdot)$ adalah "intensive" atau "per capita" dari bentuk produksi $F(\cdot, \cdot)$. Selanjutnya jika persamaan 12) disubstitusikan ke persamaan 10) maka diperoleh keseimbangan makroekonomi sebagai berikut:

$$i = s f(k) \dots\dots\dots 13)$$

Persamaan 13) menunjukkan adanya keseimbangan investasi untuk per kapita tenaga kerja. Jika diasumsikan bahwa keseimbangan makroekonomi selalu terjadi sepanjang waktu

(selalu terjadi $I+S$), maka $i = sf(k)$ dinyatakan sebagai investasi per kapita secara aktual.

Gambar 10.1
Intensive Production Function



Gambar 10.1 menunjukkan fungsi produksi intensif $y = f(k)$ dan fungsi aktual (equilibrium) investasi, $i = sf(k)$. Oleh karena itu bisa diturunkan investasi per kapita, i dan output per kapita, y , maka sisanya adalah merupakan konsumsi per kapita yaitu $c = \frac{C}{L} = y - i$. Slope dari fungsi produksi intensif ini adalah

$f_k = \frac{df(k)}{dk}$ yang merupakan besaran marginal product of capital atau $f_k = f'_k$ dan rasio kapital output, $v = K/Y = k/y$, digambarkan sebagai slope garis lurus dari titik origin ke fungsi produksi. Ini berarti bila k berubah maka garis lurus dan v juga berubah.

Untuk menurunkan model pertumbuhannya digunakan beberapa persamaan sebagai berikut :

$$C = cY \dots\dots\dots 14)$$

$$I = \frac{dk}{dt} = v \left(\frac{dY}{dt} \right) \dots\dots\dots 15)$$

Dalam pasar barang dengan asumsi $I = S$, maka keseimbangan pendapatan nasional adalah :

$$Y = C + I \dots\dots\dots 16)$$

Fungsi produksi $Y = F(K, L)$ dengan asumsi constant return to scale dan dinyatakan dengan L menjadi :

$$Y/L = F(K/L) \dots\dots\dots 17)$$

Diasumsikan bahwa penduduk tumbuh secara eksponensial, sehingga keseimbangan penawaran tenaga kerja adalah :

$$L^S = e^{mt} \dots\dots\dots 18)$$

Model pertumbuhan Solom yang bermula dari keseimbangan pendapatan yaitu :

$$Y = C + I = cY + I$$

$$I = Y - cY = (1 - c)Y \dots\dots\dots 19)$$

Oleh karena $s = 1 - c$, yang merupakan MPS, maka persamaan 19 menjadi :

$$I = sY \dots\dots\dots 20)$$

Berdasarkan persamaan 15) diperoleh :

$$\frac{dK}{dt} = sY \dots\dots\dots 21)$$

Dibagi dengan Kapital, K , maka hasilnya adalah

$$\frac{dK}{dt} \cdot \frac{1}{K} = s \frac{Y}{K} \dots\dots\dots 22)$$

Dinyatakan dalam satuan tenaga kerja, L , maka :

$$\frac{d \frac{K}{L}}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{K}{L}} = s \frac{Y/L}{\frac{K}{L}} \dots\dots\dots 23)$$

Selanjutnya disesuaikan dengan persamaan 17 sehingga

$$\frac{d \frac{K}{L}}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{K}{L}} = s \frac{F(\frac{K}{L})}{\frac{K}{L}} \dots\dots\dots 24)$$

Jika persamaan penawaran tenaga kerja persamaan 18) dinyatakan dalam bentuk linier, maka :

$$\ln L^S = nt \dots\dots\dots 25)$$

Persamaan 25) diturunkan terhadap waktu (t) maka hasilnya adalah :

$$\frac{d \ln L^S}{dt} = n \dots\dots\dots 26)$$

Selanjutnya dari persamaan 24, pada sisi kirinya dapat dicari :

$$\frac{d \frac{K}{L}}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{K}{L}} = \frac{d \ln \frac{K}{L}}{dt} = \frac{d \ln K}{dt} - \frac{d \ln L}{dt} = \frac{dK}{dt} \frac{1}{K} - n \dots\dots\dots 27)$$

Jika sisi kanan persamaan 27) dinyatakan dalam rasio tenaga kerja (L) yang selanjutnya persamaan 24 disubsitusikan maka akan diperoleh :

$$\frac{d \frac{k_t}{L_t}}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{k_t}{L_t}} = \frac{d \frac{k_t}{L_t}}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{k_t}{L_t}} - n$$

$$\frac{d \frac{k_t}{L_t}}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{k_t}{L_t}} = s \frac{f(\frac{k_t}{L_t})}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{k_t}{L_t}} - n$$

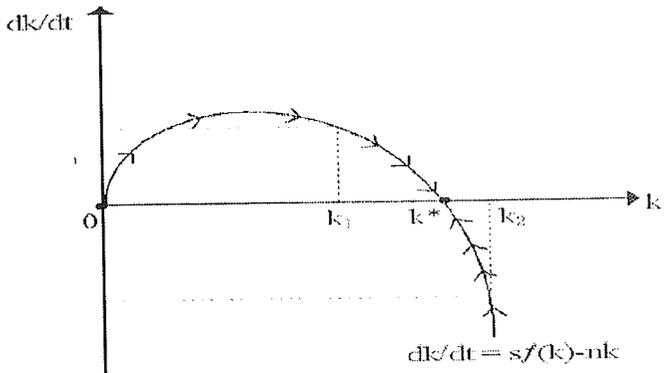
$$\frac{d \frac{k_t}{L_t}}{dt} = s f(\frac{k_t}{L_t}) - n(\frac{k_t}{L_t})$$

jika $k = \frac{k_t}{L_t}$, maka :

$$\frac{dk}{dt} = s f(k) - n(k) \dots\dots\dots 28)$$

Persamaan 28 merupakan persamaan dasar dari model pertumbuhan Solow, dan jika dalam bentuk phase diagramnya ditunjukkan pada gambar 10.2

Gambar 10.2
The Solow Phase Diagram



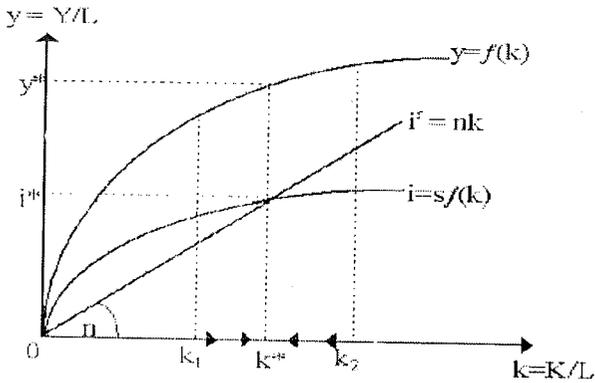
Dalam kondisi steady state rasio kapital-tenaga kerja (k), $dk/dt=0$, sehingga :

$$0 = sf(k) - n(k) \quad \text{atau} \quad \dots\dots\dots 29)$$

$$sf(k) = n(k)$$

Solo model menggambarkan diagram pertumbuhan steady state yang bisa terjadi berdasarkan pada persamaan 29)

Gambar 10.3
Steady State Growth



Gambar 10.3 menunjukkan bahwa garis lurus yang melalui titik origin adalah fungsi nk . Sedangkan kurva lainnya menggambarkan fungsi $sf(k)$. Garis ini ditarik sedemikian rupa sehingga menunjukkan produktivitas marginal kapital yang semakin menurun. Pada titik dua kurva itu, yaitu $nk = sf(k)$ dan $dk/dt = 0$.

Pada waktu $dk/dt = 0$, rasio kapital tenaga kerja adalah konstan dan stok kapital harus diperluas sama besar dengan laju pertumbuhan tenaga kerja, n . Secara serentak rasio kapital tenaga kerja k tercapai dan ia akan dipertahankan, dan kapital beserta tenaga kerja akan tumbuh proporsional.

**Soal dan
Latihan**



**Pertanyaan Untuk Diskusi dan
Latihan**

1. Coba Saudara diskusikan dan identifikasi tentang konsep pertumbuhan ekonomi?
2. Jelaskan dan identifikasi indikator adanya pertumbuhan ekonomi?
3. Coba Saudara diskusikan dan identifikasi serta jelaskan berbagai konsep yang terkait dengan model-model pertumbuhan ekonomi?

STUDI KASUS

Coba Saudara lakukan penelitian mini terkait dengan analisis faktor faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atas dasar model solow. Deskripsikan secara rinci dan jelas berbagai variabel yang dipermasalahkan dan gunakan dukungan data secara optimal yang up to date.

DAFTAR PUSTAKA

- Dornbush R, Stanley Fischer, Richard Startz, (2004) *Macroeconomics*, Edisi ke 9, McGraw Hill
- Mankiw, N. Gregory, (2003), *Macroeconomics*, Edisi ke 5, Worth Publisher
- Nanga, Muana. (2001). "Makro Ekonomi Teori Masalah dan Kebijakan." Jakarta. PT. Raja Grafindo Perkasa
- Raharja, Prathama dan Manurung Mandala 2001. "Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar." Jakarta, LPFE-UI
- Richard T. Froyen, (1990) *Macroeconomics : Theories and Policies*, New York : McMillan Publishing Co.
- Robert J. Branson and Xavier Sala-i Martin, (1995) *Economics Growth*, Singapore : McGraw-Hill Book Co.
- Samuelson, Paul A. & Nordhaus, W.D. (2001). *Macroeconomics*. 17nd Edition. New York: The McGraw-Hill Company, Inc.
- Slavin, S.L. (1999). *Macroeconomics*. 5th Edition. New York: The McGraw- Hill Company, Inc.
- Sukirno, Sadono. (2003). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: UI Press
- William H. Branson, (1989), *Macroeconomics : Theory and Policy*, Third Ed., New York : Happer & Row Publishers.

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Dr. Dede Ruslan, M.Si



UNIMED PRESS

ISBN 78-602-0888-74-3



9 786020 1888743

U n i t e d P r e s s